



MAKASSAR

SITUASI PARA PEMAIN PERKOTAAN

AKHIR
FEBRUARI 2021



ASEAN
AUSTRALIA
SMART CITIES
TRUST FUND
Asian Development Bank



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



Pengakuan

Laporan ini telah disiapkan dengan dukungan Asian Development Bank, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Pemerintah Kota Makassar)



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



Ramboll (Ramboll)
Tingkat 3
100 Jalan Raya Pasifik
Kotak PO 560
Sydney Utara
NSW 2060
Australia

T +61 2 9954 8100
F +61 2 9954 8150
<https://ramboll.com>

Nama proyek **Rencana Kota Makassar Layak Huni**

Penerima **Asian Development Bank (DFAT dan Kota Makassar)**

Tipe dokumen **Laporan Penilaian Situasi Akhir**

Versi **2.0**

Tanggal **04/02/2020**

Disiapkan oleh **Craig Niles**

Deskripsi **Rencana Kota Makassar Layak Huni: Laporan Penilaian Situasi**

Gambar sampul: **Foto: Tepi Laut Kota Makassar**
Sumber: Unsplash

Penulis mencatat: Dokumen ini adalah rancangan laporan dan akan dikembangkan lebih lanjut dengan masukan dari sumber tambahan, termasuk data tambahan dan analisis peningkatan miskin perkotaan dan kumuh.

ISI

1.	Perkenalan	10
1.1	Tujuan dokumen	10
1.2	Tentang ASEAN Australia Smart City Trust Fund	10
1.3	Rencana Kota Makassar Layak Huni	11
1.4	Struktur laporan	15
2.	Visi Kota Makassar	18
3.	Tinjauan Makassar	23
3.1	Makassar Snapshot	23
3.2	Fitur utama	26
4.	Modal Dibangun: Infrastruktur Perkotaan dan Layanan	36
4.1	Ruang Publik	36
4.2	Pasokan Air	43
4.3	Sanitasi	47
4.4	Pengelolaan Limbah Padat	53
4.5	Air Badai dan Drainase	56
4.6	Listrik / Energi	58
4.7	Mobilitas dan transportasi perkotaan	61
4.8	Penetrasi digital	70
5.	Human Capital: Kesejahteraan dan Mata Pencaharian	73
5.1	Kesehatan dan Layanan	73
5.2	Pasokan Pangan	77
5.3	Pendidikan Umum	77
5.4	Perusahaan dan Mata Pencaharian	81
5.5	Perlindungan Sosial	82
6.	Modal Alam: Darat, Air, dan Udara	86
6.1	Perencanaan Penggunaan Lahan	86
6.2	Pengelolaan Air dan Sumber Daya Alam	92
6.3	Manajemen Risiko Bencana	99
6.4	Perubahan Iklim dan Bahaya Alam	100
7.	Modal Sosial: Tata Kelola dan Komunitas	109
7.1	Pemerintahan	109
7.2	Strategi pengembangan ekonomi yang ditargetkan	115
7.3	Keberlanjutan keuangan yang inklusif dan transparan	129
7.4	Jenis Kelamin, Pemuda, dan Inklusi	139
7.5	Keterlibatan Warga / Pemberdayaan Masyarakat	148
8.	Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya	149
8.1	Temuan kunci	149
8.2	Langkah berikutnya	150

Volume pendukung

151

- Volume 1. Pembangunan perkotaan**
- Volume 2. Pasokan air**
- Volume 3. Sanitasi**
- Volume 4. Pengelolaan limbah yang solid**
- Volume 5. Drainase air badai**
- Volume 6. Sosial dan GESI**
- Volume 7. Lingkungan, pengelolaan lahan, dan energi**
- Volume 8. Tata kelola perkotaan**
- Volume 9. Keberlanjutan keuangan dan pengembangan ekonomi**
- Volume 10. Pariwisata**
- Volume 11. Mobilitas perkotaan**
- Volume 12. Infrastruktur pintar**
- Volume 13. Perubahan iklim dan bahaya alam**

DAFTAR TOKOH

Gambar 1: Manfaat bagi Makassar dari rencana holistik	11
Gambar 2: Pendekatan persiapan MLCP	13
Gambar 3: Kerangka Analisis Kota Layak Huni ADB	15
Gambar 4: Dimensi kerangka kerja PESTLE	15
Gambar 5: Rencana Aksi Smart City ASCN Makassar (2018)0F	18
Gambar 6: Program Makassar Smart City dan jumlah inisiatif cerdas di bawah setiap program3F	19
Gambar 7: Kerangka Kerja Rencana Smart City Makassar5F	20
Gambar 8: Makassar Sombere dan Smart City7F	21
Gambar 9: Pidato Wali Kota Makassar, September 20199F	22
Gambar 10: Rencana lokalitas Makassar	25
Gambar 11: Area studi Kota Makassar	27
Gambar 12: Batas darat Kota Makassar	28
Gambar 13: Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2019	30
Gambar 14: Populasi per Kecamatan (2019 dan 2040)	31
Gambar 15: Penggunaan lahan Kota Makassar pada tahun 1994 (a), 2001 (b), 2015 (c), dan tren penggunaan lahan pada tahun 1994 hingga 2015 (d)12F	33
Gambar 16: Pemukiman dengan kepadatan tinggi yang dapat mengakses ruang terbuka hijau dengan berjalan kaki dalam waktu 15 menit	38
Gambar 17 Infrastruktur Hijau	40
Gambar 18: Green Open Spaces targetkan Makassar18f	42
Gambar 19: Bagan aliran limbah padat kota Makassar (2017)	54
Gambar 20: Data energi Makassar untuk 2017	59
Gambar 21: LCM khas untuk konsumsi energi listrik di Makassar33F	59
Gambar 22: Ikhtisar Angkutan Umum Kota Makassar	62
Gambar 23: Peta Jaringan Jalan Kota Makassar Berdasarkan Fungsi Jalan	63
Gambar 24: Pemanfaatan Lahan Makassar, Dilapisi Jaringan Jalan berdasarkan Kelas Jalan	65
Gambar 25: Pelabuhan Kota Makassar	66
Gambar 26: Penetrasi Digital di Indonesia dari 2019 hingga 202042F	71
Gambar 27: Akses 15 menit ke rumah sakit dengan sepeda motor di Kota Makassar	75
Gambar 28: Keterjangkauan rumah sakit dengan mobil dalam waktu 15 menit	76
Gambar 29 Keterjangkauan SMA dengan mobil dalam waktu 15 menit	79
Gambar 30: Jumlah rumah tangga miskin di Kota Makassar berdasarkan Kecamatan	83
Gambar 31: Jumlah rumah tangga miskin (2019)	84
Gambar 32: Hierarki Rencana Kota Makassar58F	86
Gambar 33: Hubungan Rencana Tata Ruang Umum dan Rencana Tata Ruang Terperinci	88
Gambar 34: Profil pengembangan Makassar59F	90
Gambar 35: Hub konektivitas utama untuk distribusi barang ke Indonesia Timur60F	91
Gambar 36: Infrastruktur biru	93
Gambar 37: Pengembangan pemanfaatan lahan di wilayah Makassar61F	95
Gambar 38: Tutupan pohon hilang di Makassar (ha)62F	96
Gambar 39: Bunga dari waktu ke waktu Sulawesi Selatan64F	97

Gambar 40: Makassar Profil Risiko	100
Gambar 41: Peta Kerentanan Dampak Perubahan Iklim Kota Makassar	103
Gambar 42: Rata-rata curah hujan dan suhu jangka panjang di Makassar	104
Gambar 43: Kepadatan penduduk dengan daerah yang mengalami banjir	105
Gambar 44: Meningkatnya Suhu di Makassar	106
Gambar 45: Tantangan utama terkait perubahan iklim	106
Gambar 46 : Manfaat Tata Kelola Cerdas	110
Gambar 47: Kawasan ekonomi dan jalan penting di Makassar	117
Gambar 48: Penggunaan lahan ekonomi	118
Gambar 49: Pelabuhan Kapal Tradisional Paotere Pinisi, Makassar	120
Gambar 50: Manfaat untuk Makassar dari rencana holistik	125
Gambar 51: Elemen perkembangan ekonomi yang cerdas	126
Gambar 52: Target KPBU	128
Gambar 53: Pendapatan rata-rata ke Kota Makassar, 2016-2020	131
Gambar 54: Lokal income, rata-rata, 2016-2020	133
Gambar 55: Transfer pusat melalui Dana Perimbangan (rata-rata % 2016-2020)	133
Gambar 56: Transfer pusat melalui Dana Lain (rata-rata % 2016-2020)	134
Gambar 57: Pengeluaran Daerah 2016-2020	136
Gambar 58: Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang	148
Gambar 59 Benefits dari Rencana Kota Layak Huni Makassar	149

DAFTAR TABLES

Tabel 1: Struktur Penilaian Situasi (penyelarasan dengan kerangka kerja PESTLE)	16
Tabel 2: Perubahan tutupan penggunaan lahan (LUCC) Kota Makassar pada tahun 1994 hingga 2015 dan proyeksi spasial pada tahun 2031 ^{13F}	34
Tabel 3: Perbandingan populasi dan area bawaan pada tahun 2015 dan proyeksi pada tahun 2031 di Kota Makassar ^{14F}	34
Tabel 4: Jumlah ruang terbuka hijau menurut Kecamatan berdasarkan jenis (2015) ^{17F}	39
Tabel 5: Sumber utama air minum di kota Makassar, 2018 ^{19F}	43
Tabel 6: Sumber air utama untuk mandi/mencuci di kota Makassar, 2018 ^{20F}	44
Tabel 7: Jumlah pelanggan dan air terdistribusi di kota Makassar, 2019 ^{21F}	44
Tabel 8: Fasilitas pengolahan air limbah di Kota Makassar per 2015 ^{23F}	48
Tabel 9: Fasilitas pengolahan air limbah terjadwal di Kota Makassar ^{24F}	49
Tabel 10: Jumlah Kendaraan oleh Pemerintah Kota/Kota untuk Sulawesi Selatan 2018 ^{34F}	64
Tabel 11: Jumlah Kunjungan Kapal dengan Jenis Pengiriman, 2015-2018 ^{35F}	67
Tabel 12: Jumlah penumpang naik dan turun di pelabuhan Makassar, 2015-2018 ^{36F}	67
Tabel 13: Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Makassar, 2020 ^{48F}	73
Tabel 14: Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Bulanan Warga Makassar, 2020 ^{49F}	77
Tabel 15: Tingkat Partisipasi Bersih dan Kotor berdasarkan Tingkat Pendidikan di Makassar Municipality, 2018 dan 2019	78
Tabel 16: Proyeksi permintaan fasilitas pendidikan untuk kota Makassar 2021-2040 ^{52F}	80
Tabel 17: Jumlah Penduduk Miskin di Makassar tahun 2015 – 2019 ^{53F}	82
Tabel 18: Layanan ecosystem Makassar ^{63F}	97
Tabel 19: Penilaian Tata Kelola Makassar	111
Tabel 20: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Pembangunan dan ekonomi	112
Tabel 21: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Infrastruktur	113
Tabel 22: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Sosial dan lingkungan	114
Tabel 23: 5 sektor industri teratas, berdasarkan kontribusi terhadap PDB, 2015-2019	116
Tabel 24: Profil FDI di Makassar 2016-Mar 2020 (USD '000) ^{101F}	127
Tabel 25: Ringkasan investasi anggaran nasional di sektor-sektor utama, Indonesia, 2021	130
Tabel 26: Ikhtisar APBD Kota Makassar, 2016-2020, ID rupiah, miliaran	131
Tabel 27: Pendapatan ke Kota Makassar, 2016-2020 (Rp RPD miliaran)	132
Tabel 28: Pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan manajemen kekayaan, 2016-2020, IND rupiah miliaran ^{107F}	132
Tabel 29: Pengeluaran daerah, Kota Makassar, Rp miliaran, 2016-2020 ^E	135
Tabel 30: Tantangan ekonomi dan keuangan utama Makassar, ringkasan	137
Tabel 31: Penilaian DRIFT Makassar untuk keberlanjutan keuangan	138
Tabel 32: Proyeksi Jumlah Pemuda dan Anak di Makassar, th.2020-2030	144

SINGKATAN DAN DEFINISI

AASCTF	ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund
ADB	Asian Development Bank
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Regional Government Budget
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Nasional National Government Budget
ASCN	ASEAN Smart Cities Network
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASUS	ASEAN Sustainable Urbanization Strategy
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Regional Planning Development Agency
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional National Planning Development Agency
BKPSDMD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Local Office of Personnel and Human Resource Development
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana National Board on Disaster Management
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Local Disaster Management Office
BPJ	Badan Pertanahan Nasional National Land Agency
BPS	Badan Pusat Statistik Central Statistics Agency
BULOG	Badan Urusan Logistik Indonesian Bureau of Logistics
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
DFAT	Department of Foreign Affairs and Trade
DID	Dana Insentif Daerah Regional Incentive Funds
District	Lowest tier of autonomous government (Kabupaten)
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informasi Communication and Information Office
DKPSD	Perbaikan Kinerja dan Tunjangan Kinerja Aparatus Sipil Negara Implementation of Performance Improvement and Government Apparatus Performance Allowance
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat House of Representatives
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Regional House(s) of Representatives
Dukcapil	Kependudukan dan Catatan Sipil Population and Civil Archives
GCA	Government Contracting Agency
GESI	Gender Equality and Social Inclusion
GOI	Government of Indonesia
GR	Government Regulation
ICT	Information, Communication, and Technology
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah Communal waste water treatment
ISA	Information Security Assurance

ISPP	Pelaksanaan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Implementation of Planning and Budgeting Integration
IT	Information and Technology
KEN	Komite Ekonomi Nasional National Economic Committee
KemenPAN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform/MoSA-RB
KIN	Komite Inovasi Nasional National Innovation Committee
KOTAKU	Penataan Kota Tanpa Kumuh City without Slums
KUA-PPAS	Kebijakan Umum Anggaran-Platform Pagu Anggaran Sementara General Budget Policy-Temporary Budget Ceiling Priority
KRISNA	Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Data Center e-Government, Planning, and Information Performance Budget
MANTRA	Aplikasi Manajemen integrasi dan pertukaran data Management Integration and Data Exchange Application
MoF	Ministry of Finance Kementrian Keuangan
MoHA	Ministry of Home Affairs Kementerian Dalam Negeri
MoNE	Ministry of National Education Kementrian Pendidikan Nasional
MoSA BR	Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Musrenbang	Musyawarah Rencana Pembangunan Community Consultation on Development Plan
MP3EI	Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Masterplan for Acceleration and Expansion of Economic Development of Indonesia
MSS	Minimum Service Standards Standar Pelayanan Minimum/SPM
NDC	Nationally Determined Contribution
NSPK	Norma Standar Prosedur dan Kriteria Norm, Standard, Procedure, and Criteria
OPD	Organisasi Perangkat Daerah Personnel of Local Organization
PAMSIMAS	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Community based drinking water and sanitation
PCM	Public Complaint Mechanism
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum Local Drinking Water Company
Progam PKT	Padat Karya Tunai Cash Labor Intensive Program
PLN	Perusahaan Listrik Negara State-owned Electric Company
PNS Mail	Pegawai Negeri Sipil Mail Civil Servant Mail
PNS Box	Private Network Security Box
PPP	Public Private Partnerships
PR	Presidential Regulation
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	One Stop Service
PUSDATIN	Pusat Data dan Informasi Pertanahan Center of Land Data and Information
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Regional Government Budget Plan
RANPRB	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana Disaster Management Plan
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang Detailed Spatial Plan
Renstra KLHK	<i>Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i> Strategic Plan of Environment and Forestry
RIPPARDA	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Local Master Plan for Tourism Development
RIPPARNAS	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional National Master Plan for Tourism Development
RISPAM	Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Masterplan on drinking water supply development system
RKP	Rencana Kerja Pemerintah Annual Development Plan
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provincial/District Annual Development Plan
RKTN	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional National Level Forestry Plan
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana Disaster Prevention Plan
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mid-Term Development Plan
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provincial/District Mid-Term Development Plan
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provincial/District Long-Term Development Plan
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional National Mid-Term Development Plan
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional National Long-Term Development Plan
RTBL	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Environment and Building Plan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah Spatial Plan
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Regional Spatial Plan
SANIMAS	Sanitasi Berbasis Masyarakat Community based sanitation
SDA	Software-Defined Architecture
SDGs	Sustainable Development Goals
Sekda	Sekretaris Daerah Regional Secretary
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Population Administration Information System
SIAP	<i>Sistem Informasi Administrasi Presensi</i> Attendance Administration Information System

SIKAMASETA	Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data Electronic Data Information System on Poor Community) and
SIMATA	Sistem Informasi Managemen Aset Pertanahan Land Asset Management Information System
siMAYA	Administrasi Perkantoran Office Administration MAYA
SIMPEG	Sistem Informasi Pegawai Personnel Information System
SIMTANAS	Sistem informasi Managemen Pertanahan Nasional National Land Management Information System
SIPPD	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
SKM Plus	Survey Kepuasan Masyarakat
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah Local Government Work Unit
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum Supply of drinking water system
TOD	Transit oriented development
TORA	Tanah Obyek Reforma Agraria Land Objects for Agrarian Reform
TPS 3R	Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle Solid waste management with reduce, reuse, recycle concept
UN	United Nations
UNCRPD	United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
UNDP	United Nations Development Programme
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria Principles of Agraria

1. PERKENALAN

1.1 TUJUAN DOKUMEN

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mengembangkan pemahaman holistik tentang lingkungan perkotaan yang ada dan penduduk Kota Makassar. Penilaian Situasi adalah bagian dari rangkaian dokumen yang akan bekerja untuk menciptakan Kota Makassar yang lebih layak huni bagi semua penduduk, pekerja, dan pengunjung.

Penilaian Situasi adalah langkah pertama menuju kerangka kota yang cerdas dan layak huni: **Makassar Livable City Plan.**



1. Penilaian Situasi Perkotaan

Identifikasi data dasar utama dan penilaian kebutuhan cepat kondisi terkini di Makassar



2. Laporan Skenario Perkotaan

Tinjauan rencana dan proyeksi yang ada untuk pengembangan kota dan penilaian tuntutan di masa depan (fisik, demografis dan keuangan) untuk perencanaan, pembiayaan, dan pengiriman layanan



3. Rencana Kota Makassar Layak Huni

Kerangka kerja perkotaan strategis untuk memandu pengembangan kota di masa depan dan memprioritaskan intervensi untuk meningkatkan perencanaan, pengiriman layanan, dan pembiayaan

1.2 TENTANG ASEAN AUSTRALIA SMART CITY TRUST FUND

ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF) membantu kota-kota ASEAN dalam meningkatkan sistem perencanaan, pengiriman layanan, dan manajemen keuangan mereka dengan mengembangkan dan menguji solusi dan sistem perkotaan digital yang sesuai. Dengan bekerja dengan kota-kota, AASCTF memfasilitasi transformasi mereka menjadi lebih layak huni, tangguh, dan inklusif, sementara dalam proses mengidentifikasi praktik terbaik dan berikutnya yang dapat diskalakan untuk direplikasi di seluruh kota di Asia dan Pasifik.

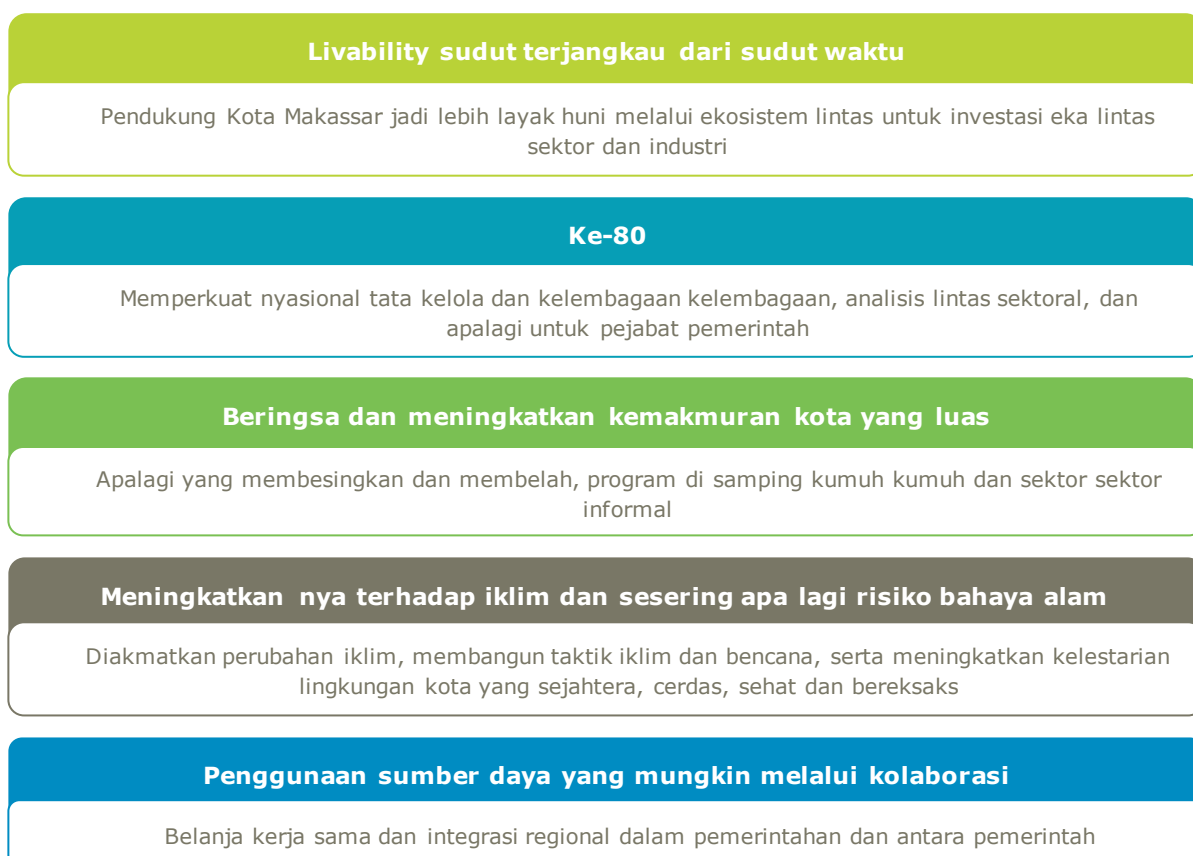
1.3 RENCANA KOTA MAKASSAR LAYAK HUNI

1.3.1 Perlu rencana holistik

Makassar memiliki rencana perluasan dan pengembangan terperinci untuk layanan publiknya termasuk: rencana penggunaan lahan yang komprehensif; rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan strategi kota cerdas. Namun, rencana-rencana ini menjadi ketinggalan zaman karena pertumbuhan populasi yang lebih tinggi dari yang diharapkan, dampak perubahan iklim dan solusi teknologi baru. Berdasarkan tinjauan kami tentang situasi saat ini, Makassar akan mendapat manfaat dari kerangka kerja luas kota baru yang membahas banyak langkah khusus sektor yang sedang berlangsung untuk menghadapi pertumbuhan kota yang cepat, sambil secara bersamaan menyelaraskannya dengan solusi teknologi pintar terbaru dan mengatasi implikasi negatif dari perubahan iklim. Berdasarkan tinjauan holistik tema lintas-pemotongan, prioritas akan diidentifikasi untuk intervensi kota yang cerdas dan layak huni.

Rencana Kota Layak Huni (MLCP) Makassar bukanlah rencana tata ruang, dirancang sebagai kerangka kerja yang mengadaptasi rencana spasial saat ini dan inisiatif besar (**Sombere and Smart City**) untuk menghasilkan kerangka kerjayang mengintegrasikan strategi untuk pembangunan yang cerdas dan berkelanjutan, termasuk : tata kelola, pembangunan, infrastruktur, budaya, program masyarakat, ketahanan dan mekanisme ekonomi. Kerangka ini mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan mengadaptasi berbagai potensi intervensi menuju Makassar yang Cerdas dan Layak Huni.

Gambar 1: Manfaat bagi Makassar dari rencana holistik



1.3.2 Pendekatan MLCP

MLCP akan memberikan elemen-elemen kunci berikut untuk mendukung Makassar yang cerdas dan layak huni:

- Membangun kerangka kerja perkotaan strategis yang mengintegrasikan rencana, tindakan, dan inisiatif kota pintar yang ada di bawah kerangka kerja holistik
- Menghasilkan visi yang halus dan terintegrasi untuk Makassar yang cerdas dan layak huni
- Menguraikan pendekatan cerdas dan kolaboratif
- Menyelidiki berbagai mekanisme kebijakan untuk mencapai hasil yang diperlukan
- Memprioritaskan proyek lintas sektor dan mengidentifikasi proyek transformasi potensial. Mempromosikan sinergi dan multi-fungsi di seluruh program
- Membentuk instrumen digital untuk perencanaan, pengiriman layanan, dan keuangan
- Identifikasi peta jalan (rencana implementasi) untuk implementasi dan institusi yang efektif
- Prioritas solusi smart digital dan livability yang akan didanai di Makassar.

MLCP akan menghasilkan prioritas untuk berbagai inisiatif berdasarkan area fokus dari lintas sektor dan departemen. Kerangka kerja MLCP akan mendukung Kota Makassar untuk mengimplementasikan hasil dan mengamankan dana dari berbagai sumber, termasuk dengan pemerintah Nasional dan Provinsi, melalui ADB dan investasi lokal serta berbagai organisasi internasional potensial.

Pendekatan MLCP (langkah-langkah utama) diilustrasikan dalam Gambar 3, yang juga menunjukkan fase implementasi dan tautan ke sumber investasi dan pendanaan potensial.

Gambar 2: Pendekatan persiapan MLCP



1.3.3 Tujuan Rencana Kota Layak Huni

MLCP bertujuan untuk memberikan tiga output berikut untuk Kota Makassar:



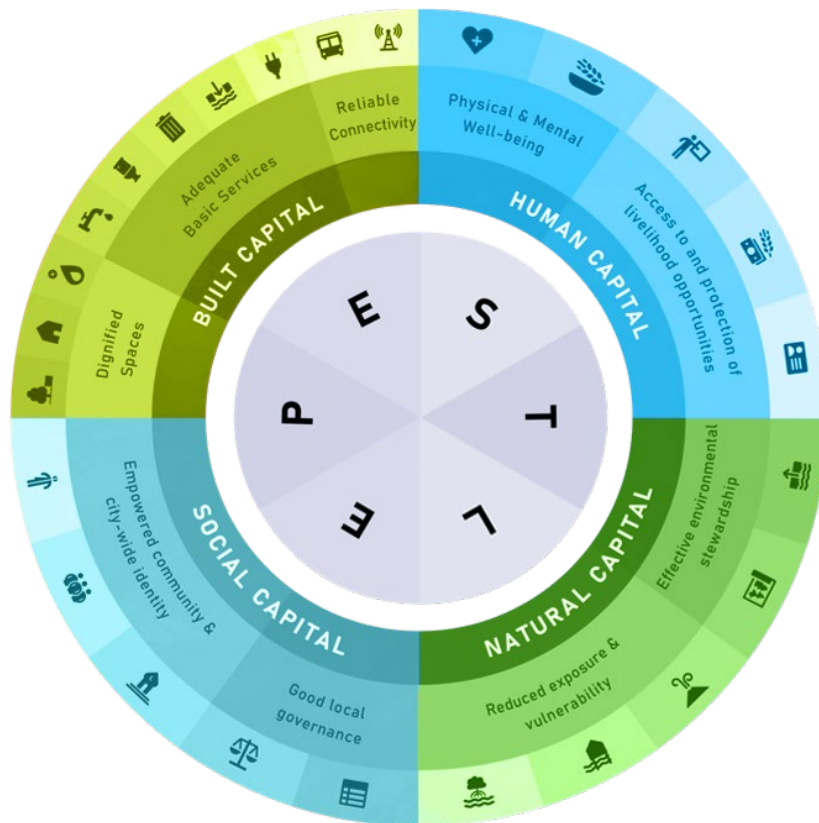
- **Output 1: Sistem perencanaan yang ditingkatkan diMakassar.** Proyek ini akan mengidentifikasi dan mengembangkan rencana kota cerdas dan layak huni di masa depan yang akan bertindak sebagai kerangka strategis untuk menguraikan solusi digital untuk dipiloti di kota menuju mencapai visi "kota yang cerdas dan layak huni" yang sama. Kerangka strategis akan menjadi alat untuk mengembangkan daftar proyek yang diprioritaskan di seluruh sektor, menciptakan kejelasan tentang suksesi investasi untuk mengamankan sinergi dan multi-fungsi jika memungkinkan.
- **Keluaran 2. Peningkatan pengiriman layanan diMakassar.** Proyek ini akan mencakup analisis dan perkiraan kelembagaan dan infrastruktur yang akan memeriksa setiap sektor layanan termasuk semua layanan perkotaan. Investasi terpilih yang diidentifikasi mungkin tercakup oleh Pinjaman Investasi Penyelesaian Layak Huni yang dibayangkan ADB yang memiliki fokus pada peningkatan akses ke layanan dasar di pemukiman informal.
- **Keluaran 3. Peningkatan pengelolaan keuangan diMakassar.** Proyek ini akan mencakup analisis dan perkiraan kelembagaan dan infrastruktur, termasuk analisis keuangan dan ekonomi.

1.4 STRUKTUR LAPORAN

Selaras dengan kerangka kerja PESTLE, Penilaian Situasi menggambarkan kondisi Makassar yang ada sehubungan dengan empat dimensi utama Kerangka Analisis Kota Layak Huni ADB (Gambar 4):

- **Modal pembangunan:** Investasi atau kebijakan yang mendukung infrastruktur fisik kota
- **Human Capital:** Investasi atau kebijakan yang mendukung kesejahteraan individu penduduk kota
- **Modal Alam:** Investasi atau kebijakan yang mendukung ekosistem alam dan sekitar kota
- **Modal Sosial:** Investasi atau kebijakan yang mendukung kaitan sosial kota.

Gambar 3: Kerangka Analisis Kota Layak Huni ADB



Gambar 4: Dimensi kerangka kerja PESTLE



Struktur Laporan Penilaian Situasi sejalan dengan kerangka kerja PESTLE, dengan kriteria tambahan yang disesuaikan yang mencerminkan penilaian di seluruh kota sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 ini.

Tabel 1: Struktur Penilaian Situasi (penyelarasan dengan kerangka kerja PESTLE)

Alu			TEMPLAT LAPORAN MAKASSAR	
Dimensi	Tujuan	Solusi (Indikator)	Bagian	Volume laporan
Modal Dibangun : Investasi atau kebijakan yang mendukung infrastruktur fisik kota	Tujuan 1. Spasi bermartabat	Ruang publik yang inklusif dan dapat digunakan	Ruang publik	1. Pengembangan perkotaan
		Perumahan terjangkau	Perumahan & tempat berlindung	
		Bangunan yang aman untuk kebakaran		
	Tujuan 2. Layanan dasar yang memadai	Air minum bersih	Pasokan air	2. Pasokan air
		Sanitasi yang efektif	Sanitasi	3. Sanitasi
		Pengelolaan limbah padat yang efektif	Pengelolaan limbah yang solid	4. Pengelolaan limbah yang solid
		Sistem drainase yang efektif	Drainase air badai	5. Drainase air badai
		Pasokan energi yang terjangkau	Listrik / energi	7. Lingkungan, pengelolaan lahan dan energi
	Tujuan 3. Konektivitas yang andal	Mobilitas perkotaan multimodal	Mobilitas perkotaan	11. Mobilitas perkotaan
		Penetrasi digital yang memadai	Penetrasi digital	12. Infrastruktur pintar
Human Capital : Investasi atau kebijakan yang mendukung kesejahteraan individu penduduk kota	Tujuan 4. Kesejahteraan Fisik dan Mental	Layanan kesehatan umum yang terjangkau	Sektor kesehatan / kesehatan & layanan	6. Sosial dan GESI
			Pasokan / keamanan pangan	
	Tujuan 5. Akses ke dan Perlindungan Peluang Mata Pencapaian	Akses ke pendidikan umum	Pendidikan umum	
		Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Perusahaan	Perusahaan dan mata pencaharian	
		Perlindungan sosial dan jaring pengaman	Perlindungan sosial	
Modal Alam: Investasi atau kebijakan yang mendukung ekosistem alam dan sekitar kota	Tujuan 6. Pengelolaan Lingkungan yang Efektif	Perencanaan Penggunaan Lahan	Pengelolaan lahan	7. Lingkungan, pengelolaan lahan dan energi
				1. Pengembangan perkotaan
		Pengelolaan air dan sumber daya alam	Pengelolaan air dan sumber daya alam	7. Lingkungan, pengelolaan lahan dan energi
	Tujuan 7. Mengurangi EKSPOSUR dan Kerentanan	Pariwisata dan pengembangan berbasis ekosistem	Pariwisata	10. Pariwisata
		Manajemen Risiko Bencana		7. Lingkungan, pengelolaan lahan dan energi
			Manajemen risiko bencana	13. Perubahan iklim dan bahaya alam
			Perubahan iklim dan bahaya alam	
Modal Sosial: Investasi atau kebijakan yang mendukung kaitan sosial kota	Tujuan 8. Tata Kelola Lokal yang Baik	Manajemen publik yang transparan dan aturan hukum	Manajemen kelembagaan dan aturan hukum	8. Tata Kelola Perkotaan
			Pariwisata di Makassar	10. Pariwisata
		Strategi pengembangan ekonomi yang ditargetkan	Ekonomi digital	9. Keberlanjutan keuangan dan pembangunan ekonomi
			Daya tarik investasi (Ramah terhadap investasi)	
			Keberlanjutan keuangan yang inklusif dan transparan	
		Data dan pemetaan terintegrasi	Penetrasi digital	12. Infrastruktur pintar
	Tujuan 9. Komunitas Berdaya dan Identitas Di Seluruh Kota	Inklusi gender dan kelompok minoritas	Jenis kelamin, pemuda, dan inklusi	6. Sosial dan GESI
		Proses perencanaan partisipatif	Keterlibatan warga / proses pemberdayaan masyarakat	
		Warisan budaya dan pelestarian bersejarah	Identitas dan warisan budaya di seluruh kota	4. Lingkungan, pengelolaan lahan dan energi

Smart

Ditinggali

Berkelanjutan

Visi Kota Makassar

Nyaman

Dapat diilahi

**Berorientasi
pada
pariwisata**

**Ramah
terhadap
investasi**

Berkelanjutan

**Tata kelola
yang cerdas**

2. VISI KOTA MAKASSAR

2.1.1 Visi awal

Visi **Cerdas, Layak Huni, Berkelanjutan** untuk Kota Makassar akan tunduk pada penyempurnaan karena analisis dan kolaborasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan utama dilakukan, dengan visi akhir yang akan dimasukkan dalam Rencana Kota Layak Huni Makassar.

Visi Kota Makassar

2005-2025 - "Makassar sebagai Kota Maritim, Perdagangan, Pendidikan, Budaya dan Layanan Berorientasi Global, Ramah Lingkungan dan Paling Ramah"

2014-2019 - "Makassar, Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua Orang"

2019-2025 – "Untuk 12025 – "Untuk 1200 kota kelas dunia yang layak huni untuk semua"

2.1.2 Jaringan Kota Cerdas ASEAN

Makassar merupakan salah satu kota percontohan yang masuk dalam inisiatif ASEAN Smart Cities Network (ASCN) yang diusulkan Singapura dalam KTT ASEAN ke-32, yang berlangsung pada Mei 2018. Rencana Aksi Smart City untuk Makassar yang dikembangkan selama workshop ASCN memiliki visi yang jelas selaras dengan Kerangka Smart City Makassar.

Gambar 5: Rencana Aksi Smart City ASCN Makassar (2018).¹

Smart City Action Plan	
Vision	
Makassar city is at the center of rapid socio-economic growth, backed by a growing population, good geography and a thriving service industry. The city's vision is: "To create Makassar as Livable World Class City for All"	
Focus Areas	
Health and Well-being: -deliver healthcare services to citizens - integrate existing healthcare systems	Public Services: -Increase the revenue of Makassar city through an integrate e-tax system
Strategic Targets	
Health and Well-being: -inventory of healthcare data, system and services - integrate health system through a single health platform	Public Services: -integrate tax services by developing a central repository of taxation data

¹ Sumber: <https://asean.org/storage/2020/01/ascn/Makassar.pdf> [Diakses 18-12-2020]

2.1.3 Makassar Pintarkan 'War Room'

Makassar menginisiasi, pada tahun 2014, bekerja sama dengan IBM, pusat operasi kota pintar bernama 'The War Room' sebagai bagian dari strategi smart city dengan tujuan memulai 'perang' melawan masalah Makassar. Data real-time dari berbagai sistem pengumpulan data dikumpulkan dan ditampilkan pada monitor besar bernama The War Room Dashboard. Data diambil dari transportasi, langkah-langkah keamanan jalan, langkah-langkah keamanan terkait lainnya seperti CCTV, dari layanan publik dan pemerintah seperti van kesehatan perawatan rumah. ²

Sementara War Room merupakan salah satu inisiatif smart city pertama di bawah Kerangka Kota Pintar Makassar, lebih dari 100 inisiatif lainnya telah diinisiasi di Makassar. ³

Gambar 6: Program Makassar Smart City dan jumlah inisiatif cerdas di bawah setiap program. ⁴

Component	Smart Governance	Smart Branding	Smart Economic	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
Program	Tata Kelolah IT Governance	Branding City		Economic Transformation		
	Livable World City	Public Engagement		Environment Protection		
Smart Innovation Projects	Tata Kelolah IT Govern- ance: 26	Branding City: 11		Economic Transformation: 18		
	Livable World City: 22	Public Engagement: 29		Environment Protection: 24		

² USAID dan JSI, Membangun Kota Sehat – Penilaian Penggunaan dan Akses Data Makassar (2019)

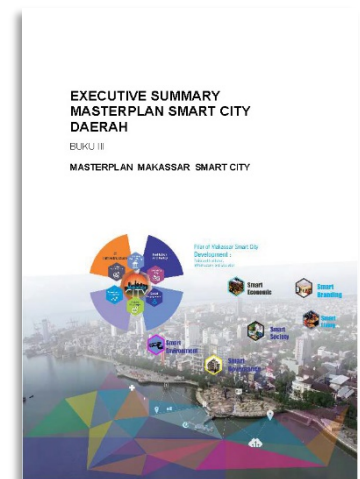
³ Masterplan Makassar Smart City Baku III, Masterplan Ringkasan Eksekutif Smart City Daerah, KomInfo Makassar

⁴ Masterplan Makassar Smart City Baku III, Masterplan Ringkasan Eksekutif Smart City Daerah, KomInfo Makassar

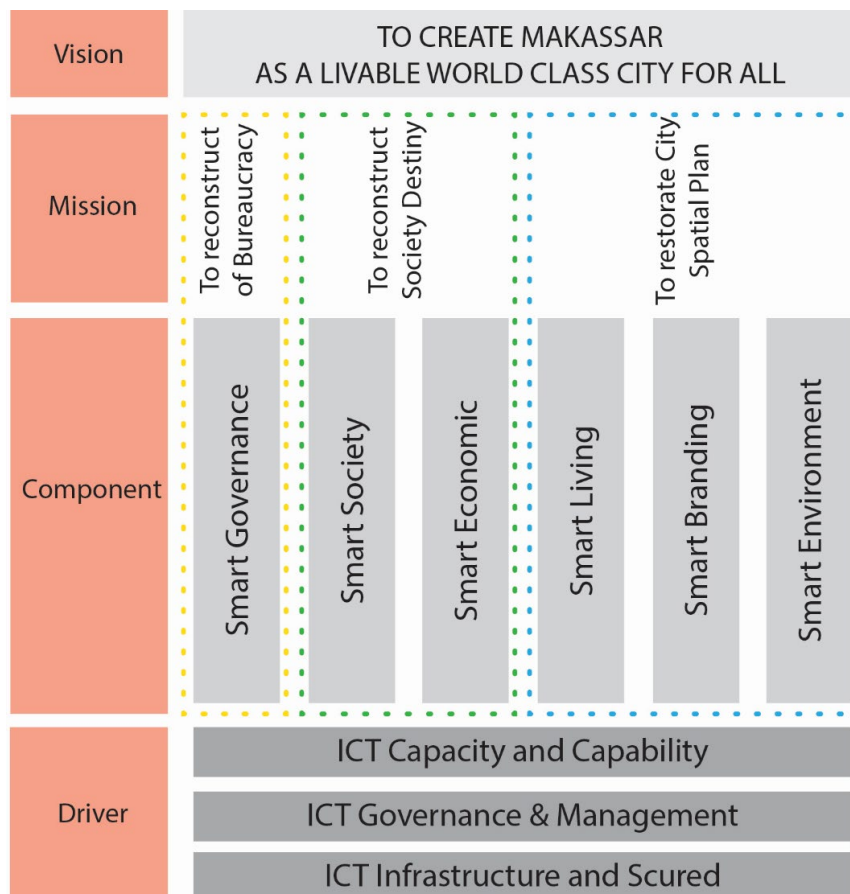
2.1.4 Makassar Smart City Program

Program Makassar Smart City P [Program Smart City Kota Makassar] dimulai pada tahun 2015 dengan tujuan mempromosikan visi untuk Makassar Smart City, memberikan peningkatan kualitas hidup bagi warganya melalui infrastruktur, lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, serta penerapan solusi cerdas, termasuk TIK. Kerangka kerja kota cerdas (lihat Gambar 8) dikembangkan termasuk visi menyeluruh, misi tiga tingkat, enam komponen utama dan tiga driver sebagai enabler lintas-pemotongan.

Masterplan Makassar Smart City – Buku III...⁵ ini memberikan kerangka kerja untuk masa depan Makassar sebagai smart city (Gambar 8).



Gambar 7: Kerangka Kerja Rencana Smart City Makassar.⁶



⁵ KomInfo Makassar, 2019

⁶ Masterplan Makassar Smart City Buku III, Masterplan Ringkasan Eksekutif Smart City Daerah, KomInfo Makassar

Di bawah visi untuk "Sombere [baik hati] dan Smart City", Visi cerdas untuk Makassar menggabungkan teknologi dan kearifan lokal untuk menawarkan solusi sosialteknik untuk masalah pembangunan dan struktural kota. 'Sombere' ditafsirkan sebagai alat jantung dan 'kota pintar' ditafsirkan sebagai perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam konteks ini, visi untuk Kota Makassar yang cerdas secara unik menggabungkan nilai-nilai budaya dan penerapan teknologi. Konsep smart city Makassar didasarkan ⁷pada *"tidak hanya didefinisikan dalam penggunaan alat informasi dan teknologi tetapi juga penggunaan artefak informasi dan teknologi dalam konteks sosial dan organisasi yang lebih luas"* ⁹.

Gambar 8: Makassar Sombere dan Smart City ¹⁰



⁷ CIO Australia <https://www.cio.com/article/3322917/smart-city-profile-makassar.html>

⁸ Kemajuan dalam Riset Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (AEBMR), volume 43 Konferensi Internasional tentang Ilmu Administrasi (ICAS 2017) *Konsep Tata Kelola Smart City di Kota Makassar*, Muhlis Madani Dan Nasrulhaq, 2017

⁹ Kemajuan dalam Riset Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (AEBMR), volume 43 Konferensi Internasional tentang Ilmu Administrasi (ICAS 2017) *Konsep Tata Kelola Smart City di Kota Makassar*, Muhlis Madani Dan Nasrulhaq, 2017

¹⁰ <http://world-cities.eu/wp-content/uploads/2017/06/Makassar-BAHAN-KOMISI-EROPA.pdf>

2.1.5 Kota Cerdas Makassar Beyond 2020

KomInfo baru-baru ini mengembangkan peta jalan ambisius untuk batch berikutnya dari inisiatif kota pintar dalam program kota pintar. Peta jalan ini berfokus pada teknologi cerdas dan digital dan mencerminkan visi penerapan teknologi baru untuk meningkatkan sektor perawatan kesehatan, keamanan, dan mobilitas di luar 2020. ¹¹



Banyak solusi cerdas dan digital telah diidentifikasi berkaitan dengan berbagai ICT yang memungkinkan seperti: 5G, analitik, akses broadband, cloud, manajemen data, sensor dan kontrol, privasi dan keamanan.

Gambar 9: Pidato Wali Kota Makassar, September 2019¹²

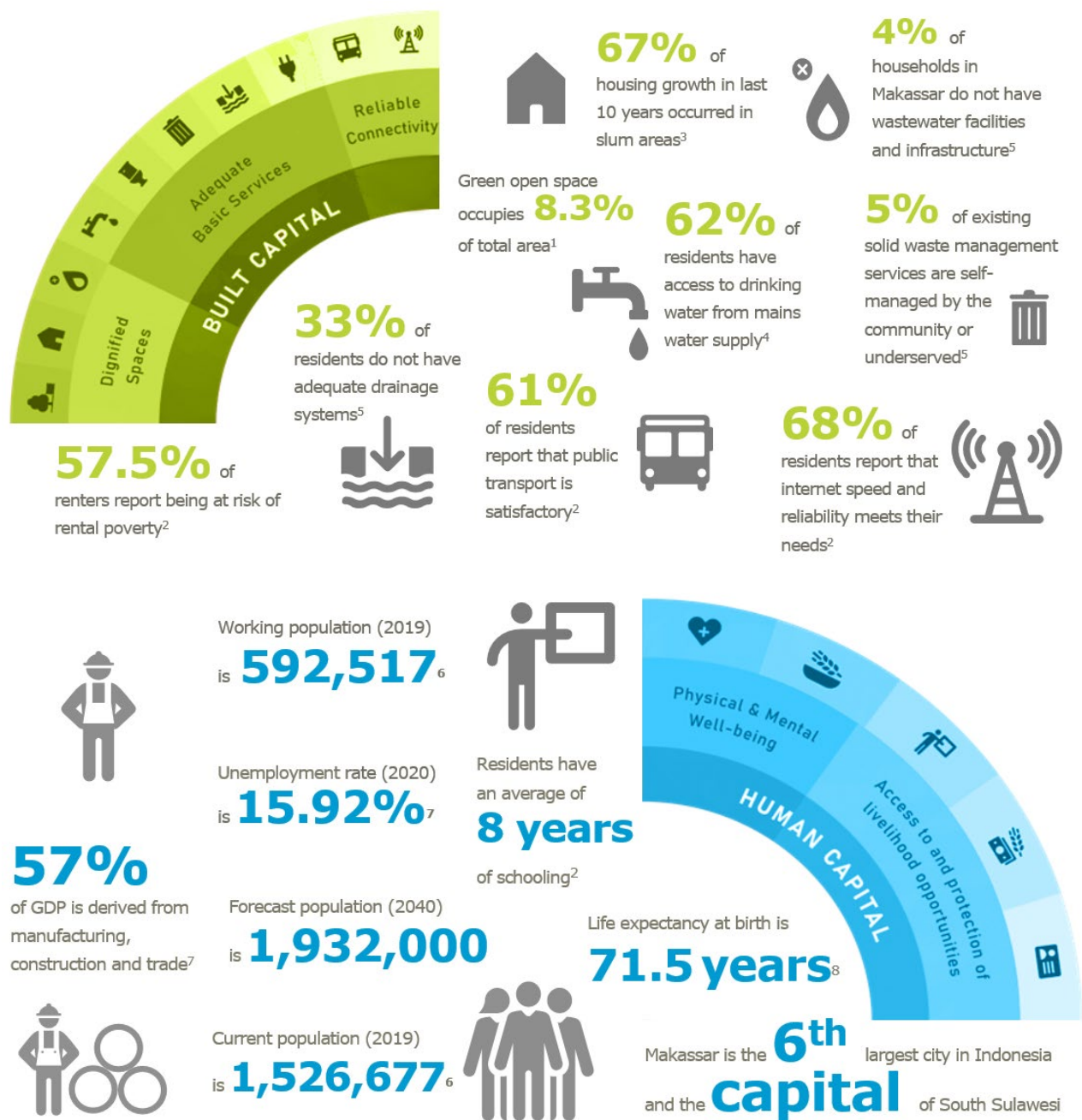
Wali Kota Makassar, September 2019

¹¹ KomInfo Kota Makassar, *Rencanakan Makassar SMart City di luar 2020* (2020)

¹² Masterplan Makassar Smart City Buku III, Executive Summary Masterplan Smart City Daerah, DisKomInfo Makassar

3. TINJAUAN MAKASSAR

3.1 MAKASSAR SNAPSHOT



1. Perda RTRW Makassar 2015-2034

2. Imd World Competitiveness Center's Smart City Observatory

3. Pengendalian Pencemaran lingkungan dan Pengelolaan Keberlanjutan Pemukiman Kumuh di Kota Makassar (2019)

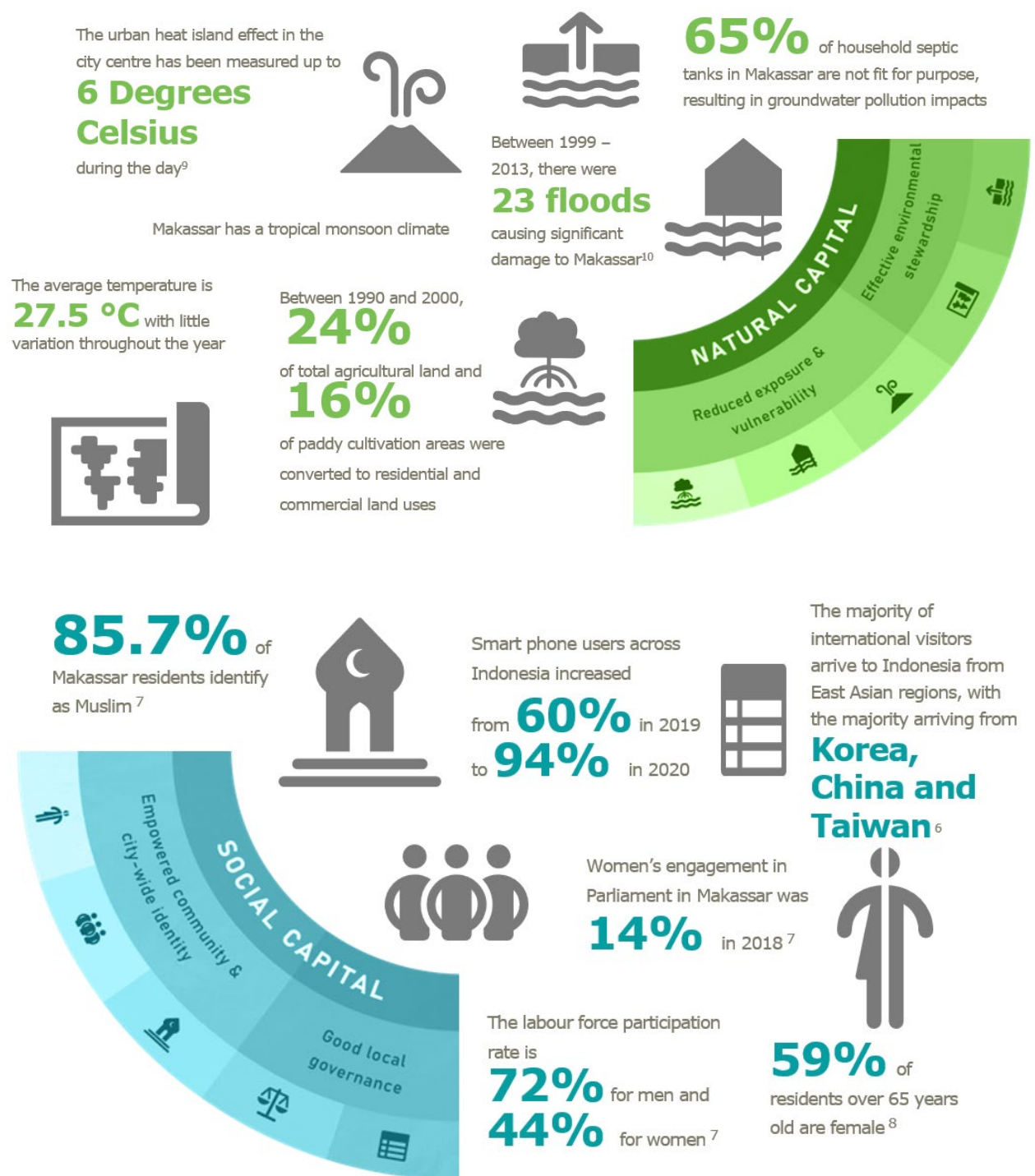
4. CSIRO (2015)

5. Strategi Sanitasi Makassar 2018-2022

6. BPS 2019

7. BPS 2020

8. BPS 2010



1. Perda RTRW Makassar 2015-2034
2. Imd World Competitiveness Center's Smart City Observatory
3. Pengendalian Pencemaran lingkungan dan Pengelolaan Keberlanjutan Permukiman Kumuh di Kota Makassar (2019)
4. CSIRO (2015)
5. Strategi Sanitasi Makassar 2018-2022
6. BPS 2019
7. BPS 2020
8. BPS 2010
9. Maru, Invanna & Rasyid (2015)
10. Kota Kita (2013)

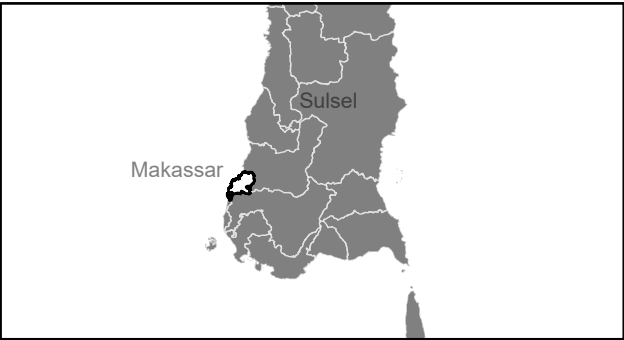
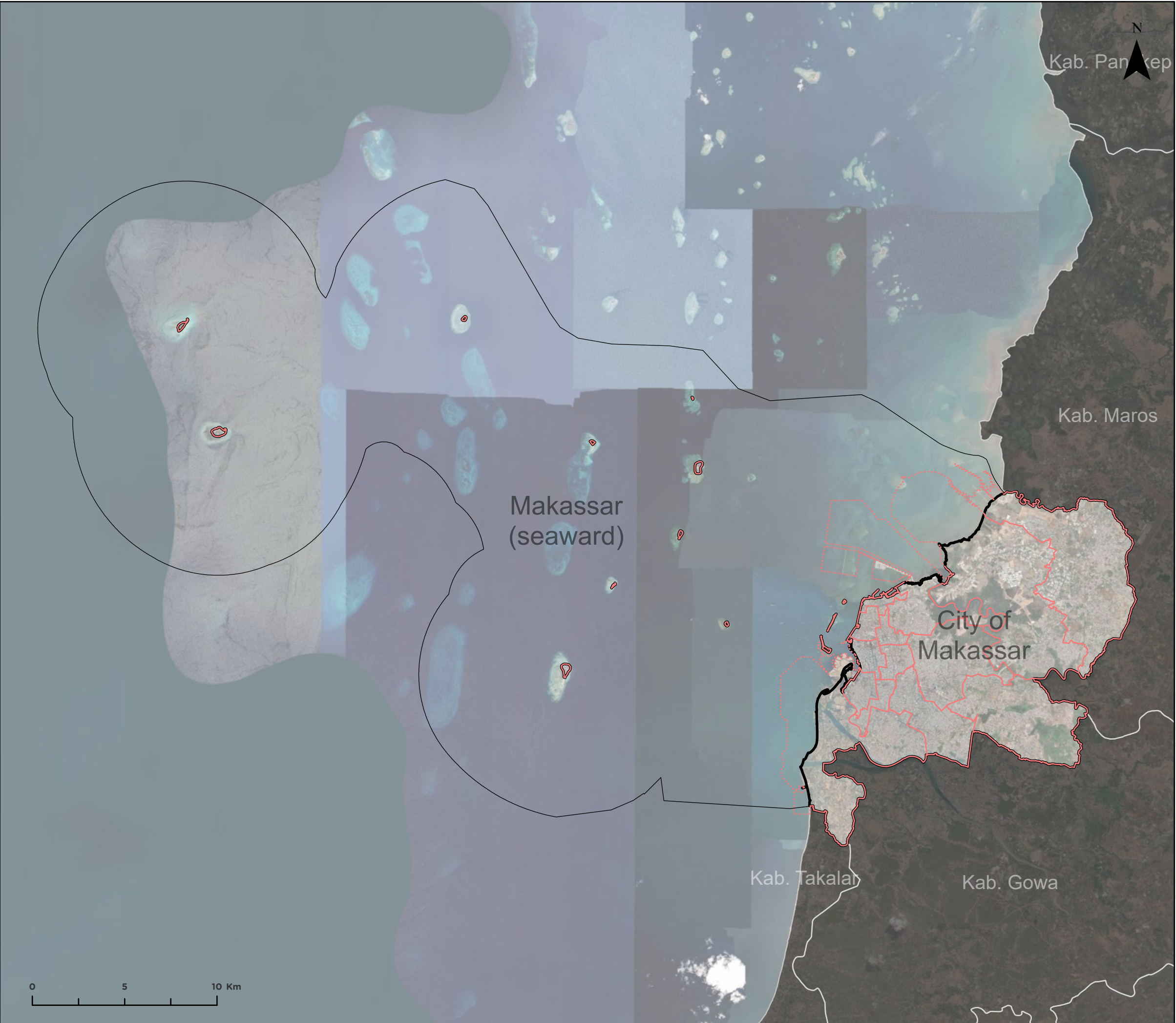
Gambar 10: Rencana lokalitas Makassar



3.2 FITUR UTAMA

3.2.1 Geografi

	Wilayah: Pesisir barat Sulawesi Selatan
	Posisi global: Makassar terletak antara 119018'28"-119032'31" bujur timur dan 5030'30"-5 14'49" Lintang Selatan
	Lokal: Makassar adalah kota pesisir, terletak di kaki Gunung Bawakaraeng di sebelah timur dan Selat Makassar di barat
	Medan: Makassar relatif datar, sebagian besar medan dataran rendah • Makassar Barat: ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 0 meter hingga 5 meter • Makassar Timur dan Utara: ketinggian rata-rata di atas permukaan laut 5 meter hingga 25 meter.
	Hidrologi: Makassar terletak di dasar DAS Jeneberang yang luas dengan tiga sungai utama yang mempengaruhi tangkapan kota: • Sungai Maros di utara • Sungai Tallo di pusat Makassar • Sungai Jeneberang di selatan
	Ekosistem pesisir: Makassar memiliki berbagai jenis ekosistem alam (misalnya ekosistem mangrove, terumbu karang, dan dasar lamun)
	Iklim: Makassar memiliki iklim musim hujan tropis
	Suhu: Suhu rata-rata untuk tahun ini adalah 27,5 °C, dengan sedikit variasi karena garis lintangnya yang hampir khatulistiwa. Suhu tinggi rata-rata sepanjang tahun adalah sekitar 32,5 °C dan suhu rendah rata-rata sekitar 22,5 °C.
	Curah hujan: Makassar rata-rata hujan sekitar 3.137 mm per tahun • November hingga April: 2.715 mm • Mei hingga Oktober: 422 mm • Agustus: curah hujan yang dapat diabaikan



- Key**
- City of Makassar
 - Makassar - seaward
 - Kabupaten (regency)
 - Kecamatan (sub-districts)

Date: 22/01/2021
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment

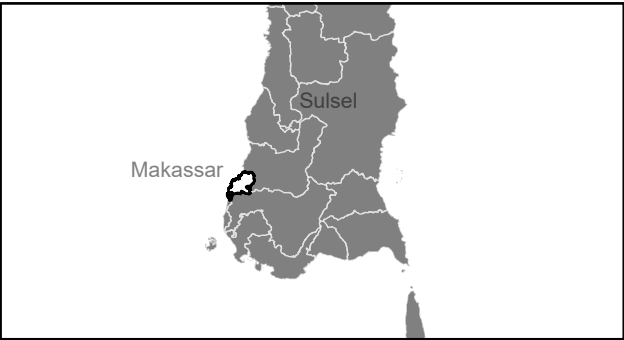
Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection system:

Figure 11: Makassar City study area



ASEAN
AUSTRALIA
SMART CITIES
TRUST FUND
Asian Development Bank





- Key**
- City of Makassar
 - Makassar - seaward
 - Kabupaten (regency)
 - Kecamatan (sub-districts)
 - Kelurahan (village)

Date: 22/01/2021
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment
Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection system:

Figure 12: Makassar City land boundaries

3.2.2 Kepadatan penduduk

Makassar memiliki 175,77 km² yang meliputi 15 Kecamatan (kecamatan) dan kepadatan penduduk Makassar telah meningkat 16,6% dari 7,200 jiwa/km² pada 2010 menjadi 8.422.83 jiwa/km² berdasarkan populasi 2019 sebesar 1.480.480 (Pemkot Makassar Makassar menjadi kota terpadat di Indonesia timur (Bahru, 2013).

Kepadatan penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 sekitar 8.686 jiwa/km². Kecamatan Makassar memiliki kepadatan penduduk tertinggi 33.935 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tamalanrea memiliki kepadatan penduduk terendah kurang lebih 3.638 jiwa/km².

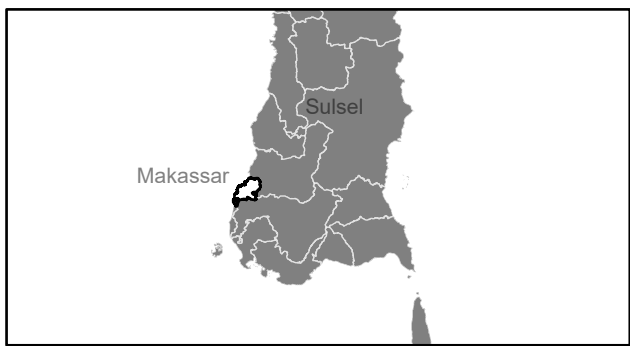
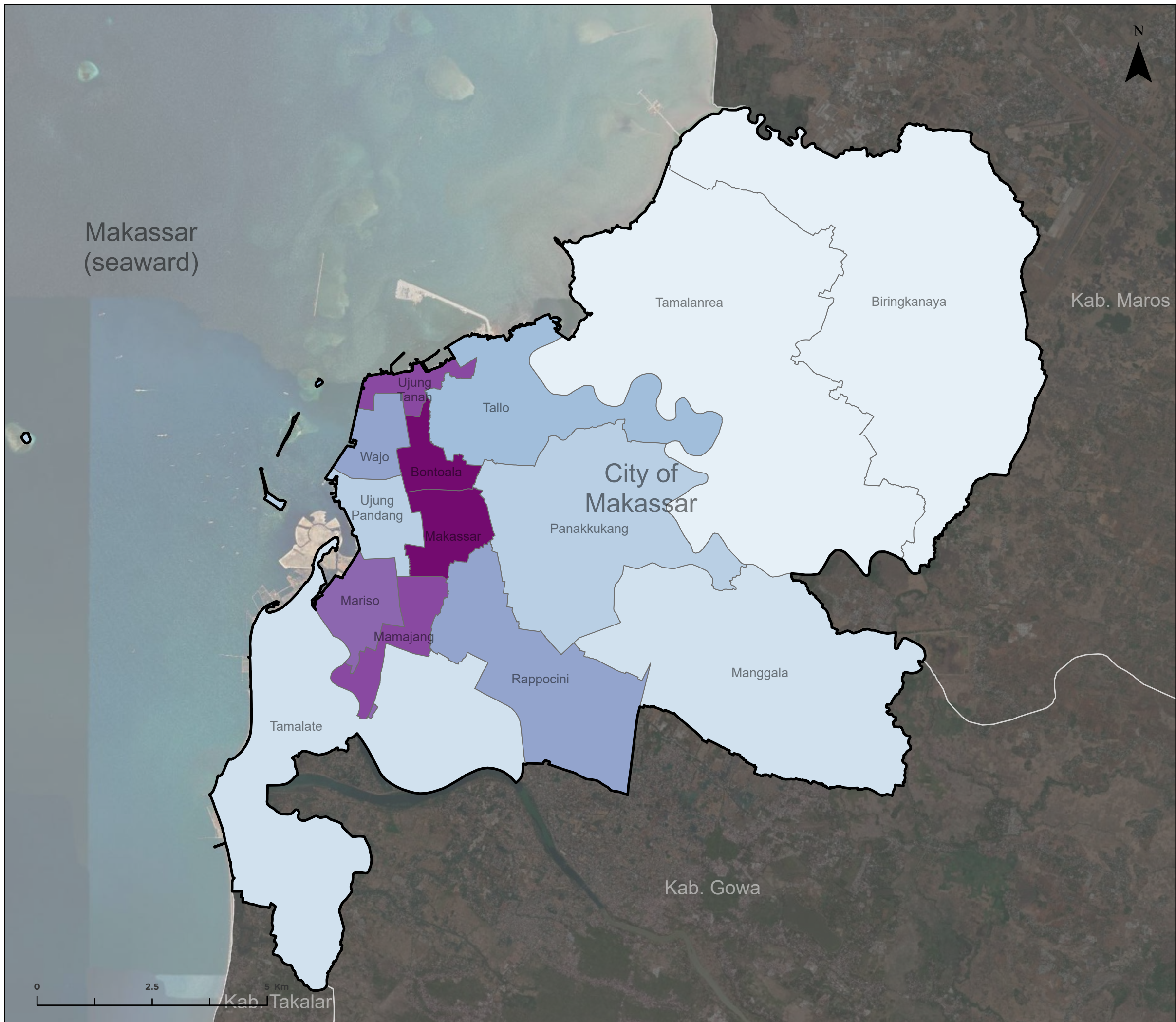
Tabel 2: Kepadatan Penduduk Kota Makassar menurut kecamatan (orang/km²).¹³

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	POPULASI	KEPADATAN (ORANG/KM2)
Biringkanaya	48.22	220,456	4,572
Bontoala	2.1	57,197	27,237
Makassar	2.52	85,515	33,935
Mamajang	2.25	61,452	27,312
Manggala	24.14	149,487	6,193
Mariso	1.82	60,499	33,241
Panakkukang	17.05	149,664	8,778
Rappocini	9.23	170,121	18,431
Sangkarang	1.54	14,531	9,436
Batang	5.83	140,330	24,070
Tamalanrea	31.84	115,843	3,638
Tamalate	20.21	205,541	10,170
Ujungpandang	2.63	29,054	11,047
UjungTanah	4.4	35,534	8,076
Wajo	1.99	31,453	15,806
Total	175.77	1,526,677	8,686

Gambar 13 peta kepadatan penduduk saat ini (2019) untuk setiap Kecamatan di Makassar.

Gambar 15 menunjukkan perubahan perkiraan populasi untuk setiap Kecamatan untuk 2019 dan 2040.

¹³ Sumber: Kota Makassar di Angka 2020



Key

Kepadatan penduduk menurut kakecamatan bupaten -
Orang / sqkm 2019 (population density by district -
people / sqkm 2019)

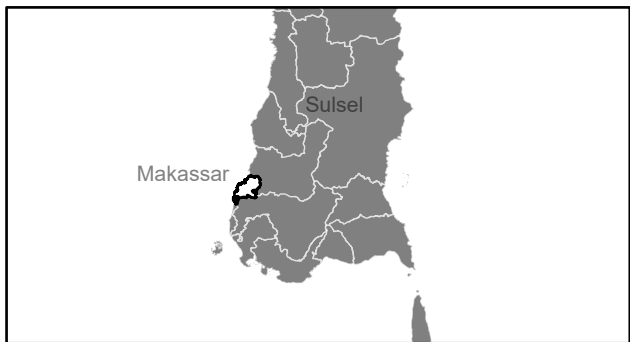
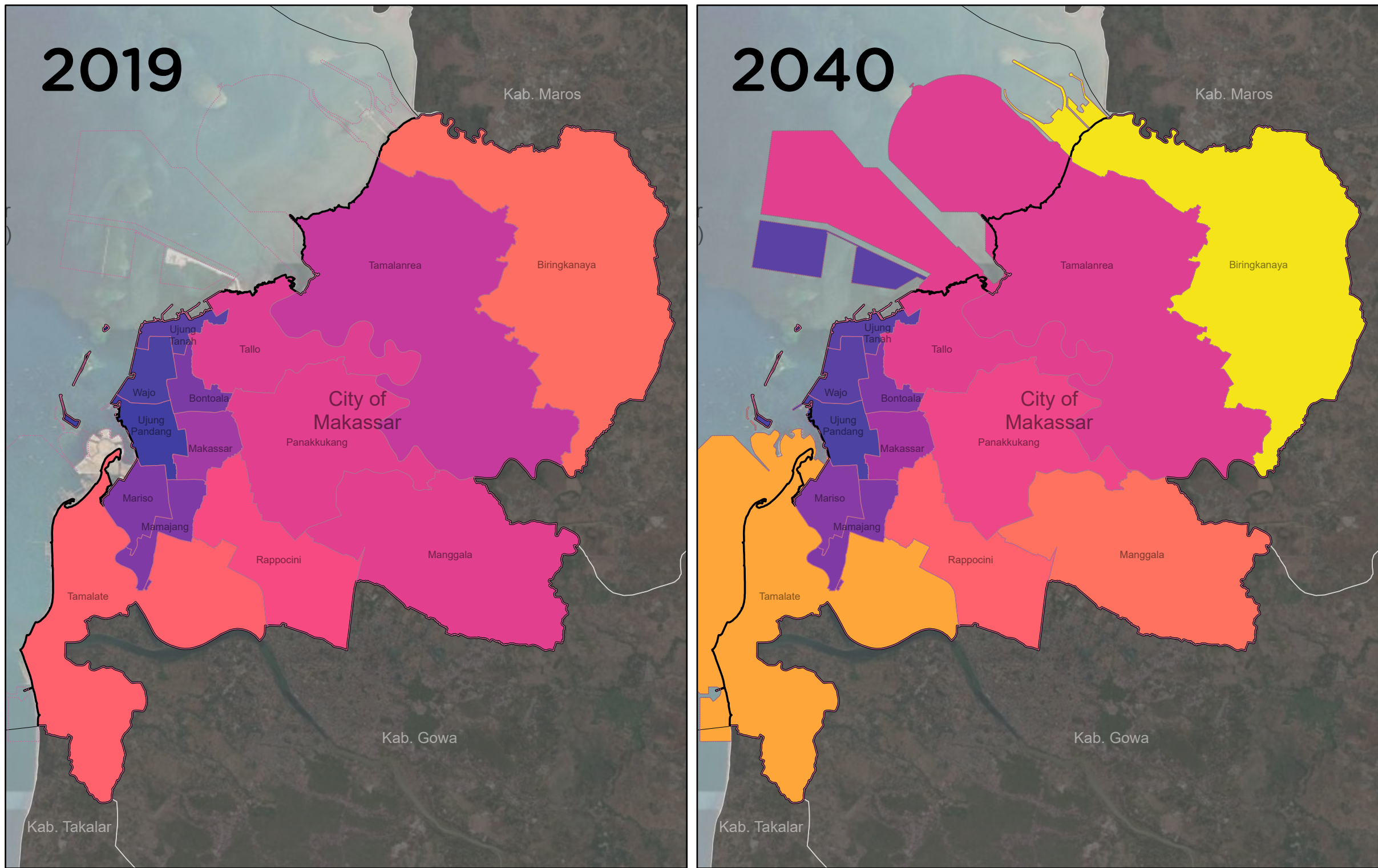
3000

33000

Date: 18/12/2020
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment

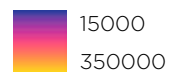
Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection System:

Figure 13
Population density by Kecamatan
2019



Key

Populasi per distrik (Population per district)



Date: 18/12/2020
 By: JC
 Report: Makassar Urban Situation Assessment

Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
 Projection System:

Figure 14 Population per Kecamatan 2019 and 2040

0 2.5 5 Km

3.2.3 Penggunaan lahan perkotaan

Penggunaan lahan yang ada berdasarkan data tematik RTRW Kota Makassar 2015 didominasi oleh penggunaan lahan hunian seluas 6.674,44 ha atau 37,97% dari total luas kota Makassar. Selain itu, ada beberapa penggunaan lahan produktif lainnya seperti pendidikan, perkantoran dan komersial. Marak dan mobilitas kawasan perkotaan didominasi oleh fungsi pemanfaatan lahan. Mobilitas eksternal antara Kecamatan di sekitar kota Makassar didominasi oleh destinasi dalam kegiatan primer seperti kegiatan perdagangan/jasa dan industri, terutama pada jam sibuk sedangkan pergerakan internal di dalam kota dari sub-kota ke pusat kota didominasi oleh kegiatan motivasi untuk bekerja, berbelanja atau bersekolah.

Tabel 3: Penggunaan lahan Makassar berdasarkan area ¹⁴

PENGUNAAN LAHAN YANG ADA	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Mangrove	471.69	2.68
Danau	84.95	0.48
Kota Hutan	44.52	0.25
Industri	621.70	3.54
Taman Campuran	1,444.19	8.22
Kolam	3.07	0.02
Komersial	308.12	1.75
Bidang	110.54	0.63
Lahan Kosong	528.94	3.01
Lapangan Olahraga	139.16	0.79
Makam	64.89	0.37
Median	0.39	0.00
Pasir	116.11	0.66
Port	93.32	0.53
Pendidikan	182.90	1.04
Kantor	5.81	0.03
Pemukiman	6,674.44	37.97
Rawa	382.74	2.18
Sawah	2032.98	11.57
Irigasi Sawah	764.71	4.35
Padang semak	476.58	2.71
Sungai	550.87	3.13
Taman	109.11	0.62
Kolam	2,353.32	13.39
TPA	13.66	0.08
Total	17,578.68	100.00

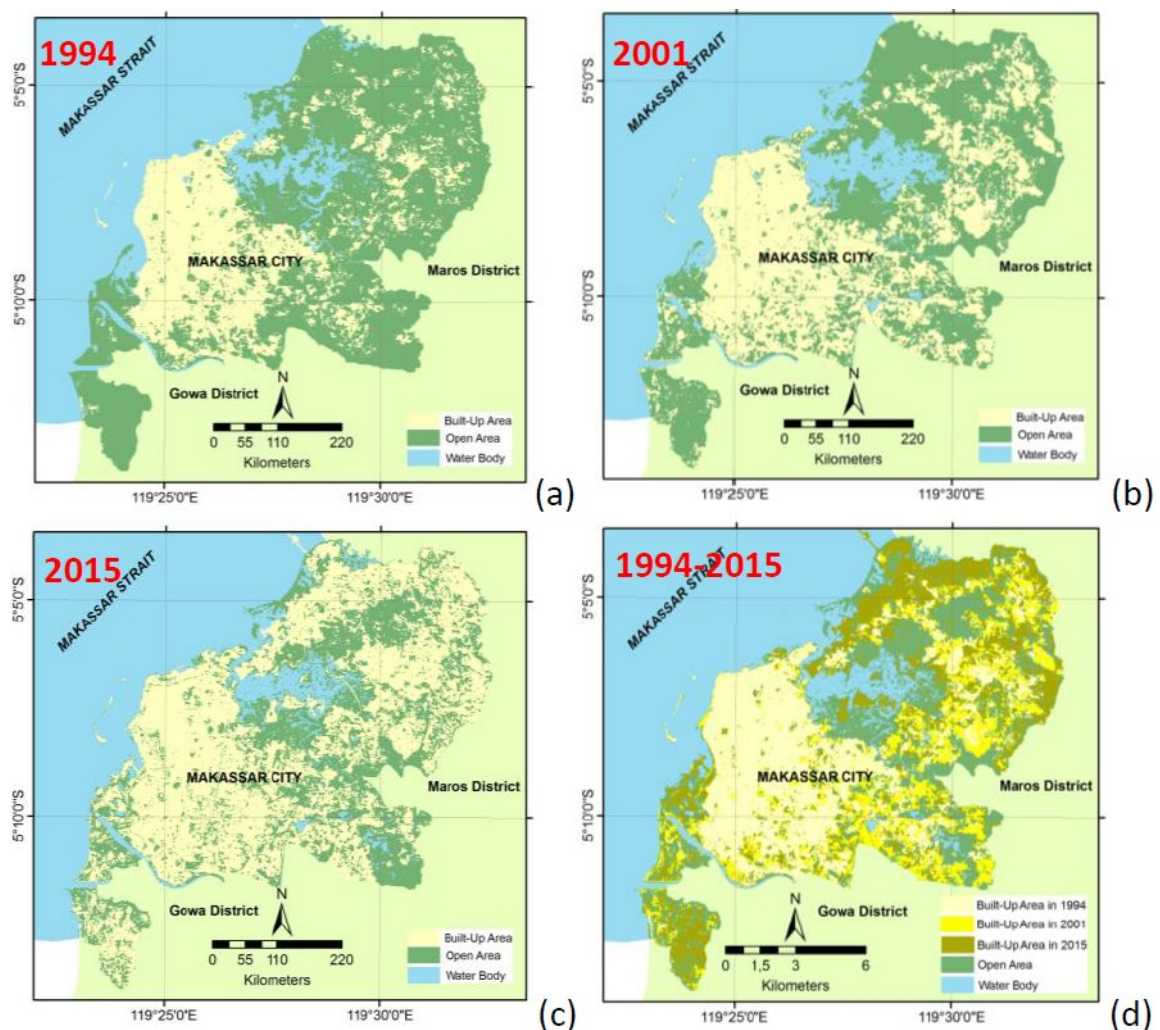
Pemisahan perkotaan adalah fitur kota yang melekat dan menjadi masalah ketika mengecualikan kelompok tertentu dari mengakses layanan, kegiatan, dan ruang. Dinamika pertumbuhan Kota Makassar dan hubungannya dengan alokasi ruang yang sedang dikembangkan menunjukkan gejala pemisahan spasial berdasarkan strata sosial ekonomi masyarakat (Suraya et al., 2020).

¹⁴ Sumber: RTRW Kota Makassar 2015

3.2.4 Urbanisasi

Gambar 17 menunjukkan perubahan penggunaan lahan dari 1994, 2001, hingga 2015. Pada tahun 1994, kawasan yang dibangun di Kota Makassar sebagian besar terletak di pusat kota dan kota tua, terutama di daerah pesisir Losari. Pengembangan kawasan binaan pada 2011 mulai merembet ke arah timur perbatasan Kota Makassar dengan Kecamatan Maros juga menyebar ke selatan perbatasan Kota dengan Kabupaten Gowa. Hingga pada tahun 2015, kawasan binaan di Kota Makassar semakin berkembang di seluruh Wilayah Kota Makassar, dengan perubahan ruang terbuka menjadi kawasan yang dibangun secara signifikan sejak tahun 1994, 2001, hingga tahun 2015 seperti dapat dilihat dari arah utara kota, seperti Kecamatan Biringkanaya, dan arah barat kota, seperti Kecamatan Tamalate. Pengembangan kawasan binaan terjadi secara linier mengikuti jaringan jalan, misalnya di arah timur kota, lahan yang dibangun terjadi di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan, arah utara, pembangunan terjadi mengikuti Jalan Tol, dan arah barat, pengembangan kawasan binaan terjadi setelah pengembangan Jalan Metro Tanjung Bunga.

Gambar 15: Penggunaan lahan Kota Makassar pada tahun 1994 (a), 2001 (b), 2015 (c), dan tren penggunaan lahan pada tahun 1994 hingga 2015 (d).¹⁵



¹⁵ Amri dkk., 2017

Pada tahun 1994, jumlah luas lahan terbuka di Kota Makassar dua kali lipat dari luas lahan yang dibangun, dengan luas lahan terbuka 11.570 hektar, luas lahan bawaan 3.791 hektar dan badan air seluas 98.260 hektar. Luas lahan yang dibangun pada tahun 2001 meningkat menjadi 6.478 Ha atau 71% dibandingkan tahun 1994, sementara lahan terbuka menurun menjadi 8.738 Ha atau -24%. Luas badan air juga berkurang menjadi 98.190 (pengurangan 70 Ha). Pada tahun 2015, lahan yang dibangun Kota Makassar meningkat menjadi lebih luas dari lahan terbuka yang ada, dengan luas 9.839 Ha, meningkat 51% dari tahun 2001 sedangkan luas lahan terbuka sebesar 6.396 Ha atau turun 27%. Dari tahun ke tahun, telah terjadi pengurangan luas lahan terbuka karena konversi area terbuka menjadi Gambar 15 atas. Diproyeksikan pada tahun 2031 luas lahan yang dibangun akan meningkat menjadi 11.600 Ha, sedangkan lahan terbuka akan berkurang menjadi 5.564 Ha.

Tabel 2: Perubahan tutupan penggunaan lahan (LUCC) Kota Makassar pada tahun 1994 hingga 2015 dan proyeksi spasial pada tahun 2031 ¹⁶

TAHUN	AREA BAWAAN (HA)	AREA TERBUKA (HA)	BADAN AIR (HA)
1994	3.791	11.570	98.260
2001	6.478	8.738	98.190
2015	9.839	6.396	97.740
2031	11.600	5.654	97.290

Tabel 3: Perbandingan populasi dan area bawaan pada tahun 2015 dan proyeksi pada tahun 2031 di Kota Makassar ¹⁷

TAHUN	AREA PENGGUNAAN LAHAN				POPULASI	PERTUMBUHAN EKONOMI (JUTA)
	RUANG TERBUKA (HA)	%	AREA TERPASANG (HA)	%		
2015	7.682,40	44,99	9.392,49	55,01	1.547.941	88.740.213,15
2031	5.611,75	32.73	11.531,36	67,27	2.060.309	1.159.463.308

Urbanisasi yang cepat tanpa kontrol penggunaan lahan yang tepat memiliki kontribusi positif terhadap penurunan kualitas lingkungan (misalnya polusi udara) ¹⁸. Makassar telah mengalami ekspansi cepat ke sekitarnya terutama ke arah selatan, timur dan utara termasuk konversi delta Jeneberang, yang sebagian besar lahan basah dan area pertanian, menjadi daerah dibangun besar. ¹⁹

¹⁶ Amri dkk., 2017

¹⁷ Amri dkk., 2017

¹⁸ Al Jarah, dkk., 2019

¹⁹ Useng, 2013

3.2.5 Daerah pesisir

Peraturan *Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2039* mendefinisikan sebagai berikut:

- **Wilayah pesisir:** daerah transisi antara ekosistem darat dan laut yang terdampak perubahan darat dan laut
- **Perairan pesisir:** laut yang berbatasan dengan daratan yang mencakup perairan sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan islands, muara, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna
- **Garis Pantai:** batas pertemuan antara laut dan darat pada saat pasang tertinggi.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (disingkat PWP-3-K) merupakan koordinasi perencanaan, ation utili, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara intersektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rencana Zona Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (disingkat RZWP-3-K) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya masing-masing unit perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola tata ruang di wilayah perencanaan yang berisi kegiatan yang dapat dan tidak boleh dilaksanakan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Izin berikut diperlukan untuk Zona Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

- Ketentuan perizinan menjadi kewenangan pemerintah daerah
- Setiap orang yang menggunakan ruang dari beberapa perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dalam skala menetap harus memiliki Izin Lokasi dari Gubernur
- Setiap orang yang menggunakan sumber daya perairan harus memiliki Izin Pengelolaan dari Gubernur
- Masyarakat lokal dan masyarakat adat yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetap harus memiliki izin dari Gubernur.

RZWP-3-K menyatakan bahwa ation utilipulau-pulaukecil dan perairan sekitarnya akan dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi dengan pulau-pulau besar di dekatnya. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk tujuan berikut:

- Konservasi
- Pendidikan dan pelatihan
- Penelitian dan pengembangan
- Budidaya laut
- Pariwisata
- Bisnis perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan industri perikanan
- Pertanian organik
- Peternakan
- Defence dan keamanan nasional.

4. MODAL DIBANGUN: INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN LAYANAN



4.1 RUANG PUBLIK

4.1.1 Kebijakan, hukum, dan regulasi

Untuk keperluan penelitian ini, definisi ruang publik meluas melampaui ruang terbuka hijau untuk mencakup fasilitas umum utama seperti pusat olahraga, pusat komunitas, ruang keagamaan, dan kedai kopi (Warung Kopi). Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai persentase total luas lahan yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau sebesar 30% (terdiri dari 20% publik dan 10% swasta) melalui *Kebijakan Kementerian "Peraturan Menteri (Permen) PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Hutan Dan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan"*.

Kebijakan Daerah Lainnya "*Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034*", mendefinisikan ruang terbuka publik dalam dua tipologi utama, ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka non-hijau publik. Ruang terbuka hijau publik menunjukkan ruang khusus yang ditanam dengan vegetasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, termasuk daerah di pinggiran sungai atau konservasi alam. Ruang terbuka publik non-hijau menggabungkan area seperti pejalan kaki, plaza, alun-alun, dan ruang terbuka biru sebagai zona pesisir dan sungai.

Fungsi ruang publik juga telah didefinisikan melalui kebijakan yang berbeda. Penggunaan ruang publik untuk mengakomodasi kegiatan kesehatan dan kebugaran tercermin dalam Kedua Konstitusi, dalam Undang (UU) RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Kebijakan Daerah, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 6 Tahun 2006. Kebijakan lainnya berfokus pada ruang publik sebagai tempat mengakomodasi area safe play bagi anak (UU, Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Kebijakan lainnya difokuskan untuk memasukkan ruang publik dalam perkembangan baru untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki (peraturan daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034).

4.1.2 Situasi pengiriman layanan yang ada

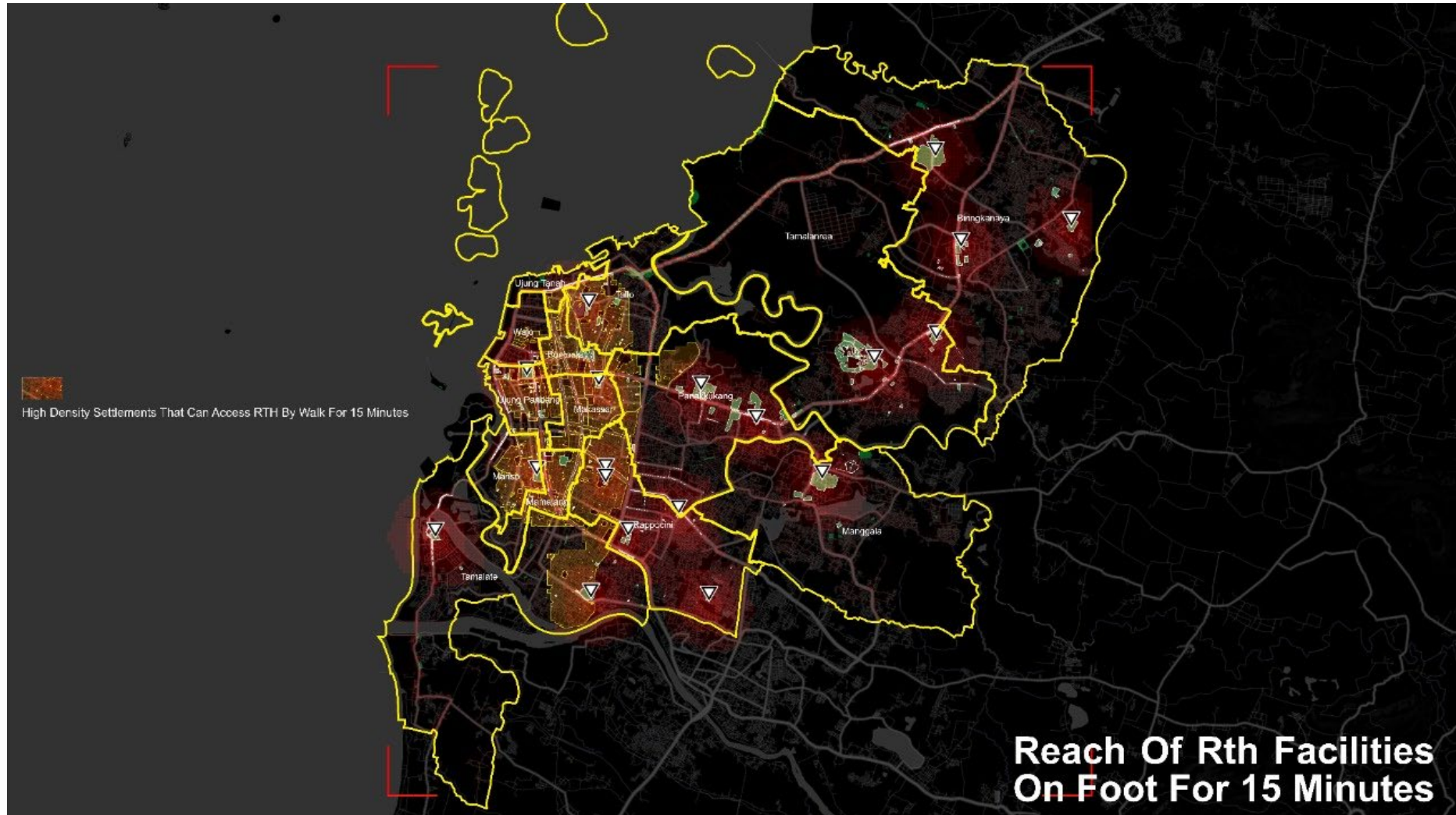
Selama 30 tahun terakhir, ruang terbuka hijau di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan dan Makassar, telah menurun dari 35% menjadi rata-rata 10% dari luas lahan. Saat ini, sekitar 11% lahan telah dialokasikan untuk membuka ruang di seluruh Makassar, dan tidak merata. Gambar 18 menunjukkan area di seluruh Makassar yang dalam jarak 15 menit berjalan kaki ke ruang terbuka.

Tabel 4 menunjukkan jumlah ruang terbuka hijau (hektar) untuk setiap Kecamatan, termasuk jenis ruang terbuka hijau dan persentase luas lahan untuk 2015. Pada tahun 2015, Kecamatan dengan jumlah luas lahan tertinggi meliputi ruang terbuka hijau meliputi Biringkanaya,

Panakkukang, Tallo dan Tamalate Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah ruang terbuka hijau terendah antara lain Kepulauan Sangkarrang, Wajo dan Bontoala.

Gambar 19 peta infrastruktur hijau di seluruh kota termasuk kategori yang ditunjukkan dalam Tabel 4.

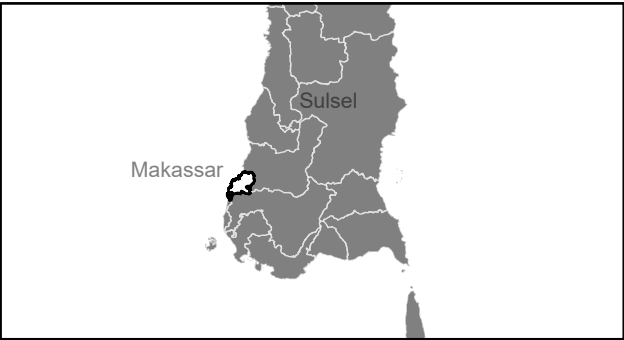
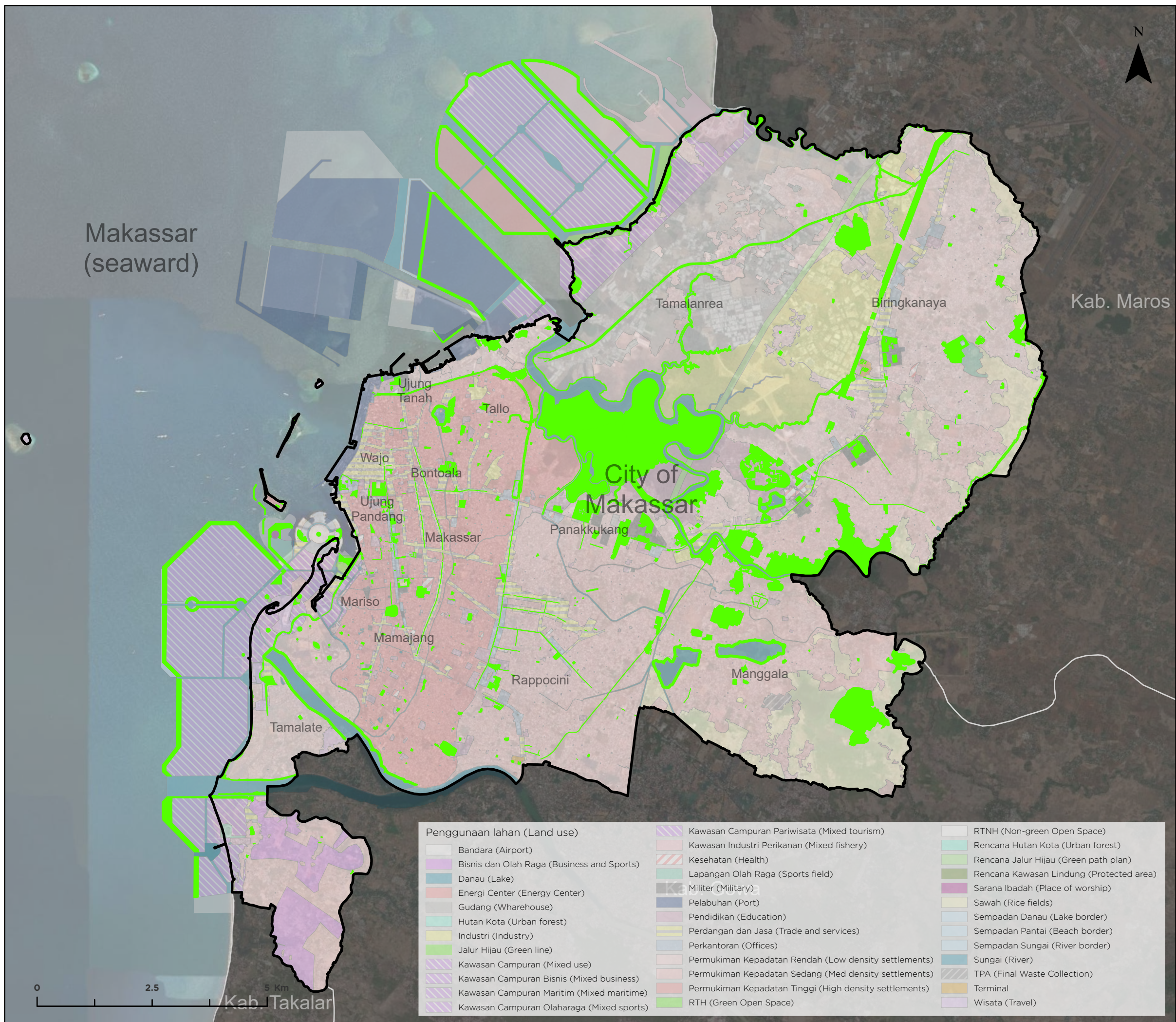
Gambar 16: Pemukiman dengan kepadatan tinggi yang dapat mengakses ruang terbuka hijau dengan berjalan kaki dalam waktu 15 menit



Tabel 4: Jumlah ruang terbuka hijau menurut Kecamatan berdasarkan jenis (2015).²⁰

KECAMATAN	HUTAN KOTA (HA)	SALURAN HIJAU (HA)	LAPANGAN (HA)	(YAITU KEBUN-KEBUN) ATAU TAMAN-TAMAN (DAN) KEBUN	PEMAKAMAN (HA)	MANGROVE (HA)	KORIDOR PERBATASAN HIJAU	TOTAL (HA)	% DARI WILAYAH KOTA
Biringkanaya	62.93	8.86	108.96	61.21	17.08	10.1		269.14	1.53
Bontoala		0.45		4.7	1.16			6.31	0.04
Kepulauan Sangkarrang			0.39		0.31			0.7	0
Makassar		2.63	0.29	3.87	1.88			8.65	0.05
Mamajang		0.15	0.26	1.74	4.44			6.59	0.04
Manggala		2.18	13.47	3.1	37.05	17.9	2.11	75.8	0.43
Mariso	0.54	1.93	5.63	2.04				10.14	0.06
Panakkukang	17,90	10.31	14.87	11.44	13.34	145.88	35.6	249.33	1.42
Rappocini		9.32	9.42	5.06	1.25			25.04	0.14
Tamalanrea	44.51	16.17	13.62	11.47	5.31	20.99	74.53	186.61	1.06
Tamalate	0.75	6.43	15.52	14.44	5.07		161.83	204.04	1.16
Ujung pandang		2.98	8.46	4.44				15.89	0.09
UjungTanah		4.24	2.76	1.55				8.56	0.05
Wajo		1.16	0.02	0.73	0.03			1.94	0.01
Total	126.64	71.21	197.60	132.90	100.02	558.93	274.07	1,461.34	8.31%

²⁰ Dinas Pertamanan Kota Makassar, 2015



Key
Ruang terbuka hijau (Green open space)

Date: 17/12/2020
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment

Projection System:
Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S

Figure 17 Green infrastructure

4.1.3 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Rencana Tata Ruang Perkotaan Makassar berisi Rencana Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, ditunjukkan pada Gambar 20. Rencana ini mengidentifikasi area hijau minimum untuk setiap area utama di seluruh kota, mulai dari 20% hingga 60% di beberapa area.

Perencanaan ruang publik di Makassar difokuskan untuk meningkatkan jumlah ruang publik berdasarkan persentase total luas lahan. Namun, masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dan implementasi kebijakan nasional. Meskipun ruang publik terbukti dapat mendorong perekonomian lokal, penyediaan fasilitas catering untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan anak-anak telah dibatasi. Tantangan seperti rendahnya kesadaran dan advokasi di sebelah kanan untuk ruang publik, terutama bagi penyandang disabilitas dan anak-anak telah berkontribusi pada keterbatasan. Anggaran yang dialokasikan terbatas dan implementasi siloed semakin menunda ketentuan tersebut. Sebagai contoh, kisaran tunjangan anggaran untuk fasilitas difabel ditentukan di bawah beberapa instansi seperti kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan) dan pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Ke depan, pemangku kepentingan juga perlu menyelidiki dampak ekologis dan lingkungan serta manfaat ruang publik, mengakui nilai sosial dan nilai lingkungannya terhadap kota Makassar.

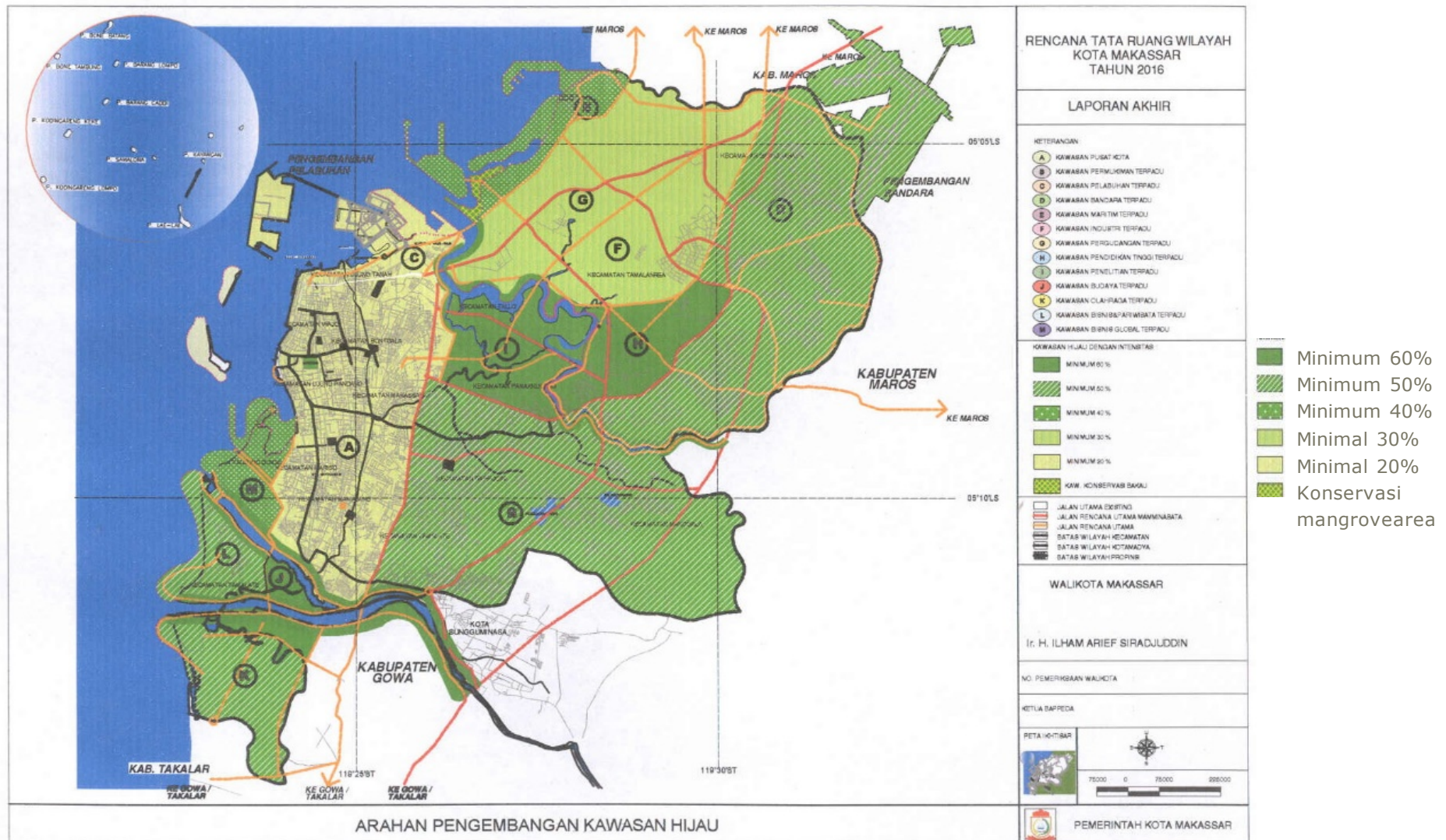
Tujuan Kota Makassar untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan hasil kesehatan bagi warga juga dapat dicapai melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan ruang publik yang terdistribusi dengan baik di seluruh kota. Sejak 2016, pejabat Kota Makassar telah merencanakan jalan setapak pejalan kaki Bundaratta di pusat kota. Pada akhir 2020, para pejabat telah menggulirkan program revitalisasi untuk taman kota.

Tantangan untuk ruang publik di samping jalan-jalan di Makassar termasuk kurangnya pemeliharaan jalan setapak, parkir informal yang tidak diatur dan pendudukan oleh pedagang kaki lima. Tantangan ini dapat menyebabkan persaingan untuk ruang sisi jalan yang terbatas. Dukungan untuk sektor informal, seperti mengatur lokasi untuk kegiatan mata pencaharian, dapat berkontribusi pada alokasi ruang yang efisien dan aman untuk berbagai kegiatan, sambil menjaga jarak kaki dan pergerakan lalu lintas yang lebih aman.

Selama pandemi Covid-19, aktivitas kebugaran melonjak di seluruh kota, terutama lari dan bersepeda (RRI, 2020). Karena jumlah dan distribusi ruang terbuka, jalan setapak, dan jalur sepeda yang tidak memadai, pelari dan pengendara sepeda terpaksa menggunakan jalan raya dengan risiko insiden lalu lintas.

Bagian penting dari pendekatan untuk menarik pengunjung ke Makassar adalah penyediaan ruang publik yang berkualitas dan semarak, diaktifkan dengan perusahaan ritel dan komersial, dengan peluang dan atraksi layanan makanan. Ruang publik yang aman, mudah diakses, menarik, dan bersemangat adalah elemen kunci untuk menarik wisatawan dan mendorong pengunjung untuk tinggal lebih lama.

Gambar 18: Green Open Spaces targetkan Makassar.²¹



²¹ Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2016

4.2 PASOKAN AIR

4.2.1 Situasi pengiriman layanan yang ada

Sumber air minum

Pasokan air masyarakat di Kota Makassar menjadi tanggung jawab the Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. PDAM Kota Makassar sejauh ini merupakan utilitas air largest di Mamminasata. PDAM Kota Makassar mengoperasikan lima instalasi pengolahan air permukaan dengan total kapasitas terpasang 3.050 L/detik selama musim hujan.

Tiga sumber air utama untuk konsumsi manusia dan untuk mandi/ mencuci adalah air kemasan, pasokan air umum dan air tanah dari sumur yang dibor / dipompa. Layanan yang berkaitan dengan air kemasan disediakan oleh carter air minum pribadi. PDAM Kota Makassar menyediakan layanan penyediaan air umum, dengan cakupan sekitar 60-70% dari jumlah penduduk di Kota Makassar. Sumur yang dibor / dipompa dimiliki oleh rumah tangga, industri, dan hotel besar, yang dengan ini melayani diri mereka sendiri.

Air kemasan (60,2%) dan pasokan air publik (36,6%) adalah sumber air minum utama bagi penduduk Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa 96,8% air yang digunakan untuk konsumsi manusia telah diobati sampai batas tertentu. Selanjutnya, 3,2% air yang digunakan untuk konsumsi manusia tidak dirawat.

Pasokan air publik (58,4%) dan sumur pengeboran/pompa (36,4%) adalah sumber air utama untuk mandi/mencuci bagi penduduk Kota Makassar. Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% air yang digunakan untuk kebersihan pribadi telah diobati sampai batas tertentu.

Tabel 5: Sumber utama air minum di kota Makassar, 2018 ²²

STATUS TEMPAT TINGGAL	Total	AIR KEMASAN	PASOKAN AIR PUBLIK	SUMUR PENGEBORAN / POMPA	Baik	MATA AIR	AIR SUNGAI	Lain
Kepemilikan sendiri	80.15	46.95	30.80	1.35	0.25	0.05	0.15	0.60
Rumah penyewaan	6.05	4.10	1.70	0.10	0.15			
Rumah sewa	2.05	1.25	0.65	0.10				0.05
Rumah resmi	4.70	3.15	1.50	0.05				
Rumah sewa gratis	6.80	4.55	1.85	0.10	0.15			0.15
Lain	0.25	0.15	0.10					
Total	100.00	60.15	36.60	1.70	0.55	0.05	0.15	0.80

²² Survei Pengeluaran Rumah Tangga 2018

Tabel 6: Sumber air utama untuk mandi/mencuci di kota Makassar, 2018.²³

STATUS TEMPAT TINGGAL	Total	AIR KEMASAN	PASOKAN AIR PUBLIK	SUMUR PENGEBORAN / POMPA	Baik
Kepemilikan sendiri	80.15	0.90	49.50	26.95	2.80
Rumah penyewaan	6.05	0.05	3.05	2.50	0.45
Rumah sewa	2.05	0.05	0.60	1.05	0.35
Rumah resmi	4.70		2.30	2.30	0.10
Rumah sewa gratis	6.80	0.10	2.85	3.50	0.35
Lain	0.25		0.10	0.10	0.05
Total	100.00	1.10	58.40	36.40	4.10

Tabel 7: Jumlah pelanggan dan air terdistribusi di kota Makassar, 2019.²⁴

Area	JUMLAH PELANGGAN	AIR TERDISTRIBUSI (M ³)	NILAI (RP)
Kota Makassar	174,593	46,046,803	295,941,588

Tabel 5 hingga Tabel 7 menunjukkan karakteristik utama berikut untuk Makassar:

- Per konsumsi pelanggan (mengacu pada koneksi pelanggan) air dari pasokan air umum pada tahun 2019:
 - Sekitar 264 m³ per pelanggan per tahun
 - Sekitar 722 liter per pelanggan per hari
- Sekitar 145 liter per kapita per hari (lpcd), dengan asumsi setiap layanan koneksi pelanggan 5 orang (catatan: Diakui bahwa 145 lpcd relatif tinggi, karena metode untuk menghitung termasuk juga permintaan air komersial)
- Biaya air dari pasokan air umum tahun 2019:
 - Sekitar 1.695 Rp per pelanggan per tahun
 - Sekitar 6,427 Rp per m³ (Sekitar US\$ 0,00046 per m³).

²³ Survei Pengeluaran Rumah Tangga 2018

²⁴ Kota Makassar dalam Angka 2020, Perusahaan Air Lokal Pemkot Makassar, 2019

Air permukaan

Sumber daya air permukaan tidak memadai selama musim kemarau, terutama disebabkan oleh efek musiman yang besar di Sungai Maros yang memberi makan melalui Bendungan Lekopancing ke Dalam Pabrik Pengolahan Air Panaikang. Ketersediaan air permukaan yang rendah membatasi perluasan layanan penyediaan air umum oleh PDAM Kota Makassar di Kota Makassar.

Sungai Jeneberang

Sungai Jeneberang adalah sumber daya air utama untuk Makassar. Asupan air sungai untuk pasokan air masyarakat dimulai di bendungan Bili-Bili dan berlanjut di sepanjang Sungai Jeneberang hingga debit sungai masuk ke Selat Makassar hingga selatan Kota Makassar. Bendungan Bili-Bili terletak 35 kilometer di hulu Sungai Jeneberang. Bendungan ini memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan menyediakan hidroelektrik, pengendalian banjir, rekreasi dan air untuk berbagai penggunaan. Bendungan Bili-Bili mengurangi efek musiman di hilir Sungai Jeneberang, sehingga memberikan keamanan pasokan air di musim kemarau.

Sungai Maros

Sungai Maros adalah sumber daya air kedua untuk Makassar. Sungai Maros berasal dari pegunungan di timur laut Mamminasata. Sungai melintasi Kecamatan Maros dan debit di Selat Makassar hingga jauh di utara Kota Makassar. Sungai Bantimurung adalah anak sungai utama ke Sungai Maros. Sungai Maros memiliki panjang 82 kilometer dan memiliki area tangkapan yang luas. Namun demikian, Sungai Maros menunjukkan efek musiman yang besar dengan berkurangnya aliran di musim kemarau. PDAM Kota Makassar mengabstraksi air permukaan dari Sungai Maros di Bendungan Lekopancing yang terletak sekitar 30 kilometer daratan dari Kota Makassar.

4.2.2 Standar pasokan air

Standar Air Minum yang berlaku berhak (dalam bahasa Indonesia): "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Dengan Rahmat Yang Maha Esa Kesehatan Menteri Republik Indonesia" (atau: Peraturan Menteri Kesehatan, catatan 492/Menteri Kesehatan/Per/IV/2010) tanggal 19 April 2010.

Tingkat kekerasan yang terlihat dan warna air yang terlihat memprovokasi persepsi bahwa air bukanlah air minum. Ini mungkin pendorong dominan untuk konsumsi air kemasan oleh warga Kota Makassar yang mampu membeli ini.

4.2.3 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Tantangan utama

Tantangan utamanya adalah:

- Mengekstraksi air permukaan tambahan dari lingkungan, mengobati air permukaan ini ke air berkualitas tinggi dengan biaya, memompakan air berharga ini ke dalam jaringan distribusi air yang membutuhkan energi, dan kemudian mengalami 40-50% Air Non-Pendapatan tidak berkelanjutan.
- Kapasitas produksi dan distribusi air baru harus digunakan untuk area dengan kebocoran serendah mungkin. Jaringan distribusi air yang tidak bocor harus menentukan urutan investasi.
- Kapasitas pasokan air masyarakat di Kota Makassar secara substansial berkurang dengan volume Air Non-Pendapatan (NRW) yang tinggi, yang terdiri²⁵:
 - Kebocoran pipa transmisi dan distribusi dan koneksi layanan, karena pipa penuaan
 - Sambungan ilegal

²⁵ CSIRO (2012)

- Kesalahan dalam akurasi meteran air dan pembacaan meter di lapangan
 - Penggunaan air untuk kebutuhan sosial (yang tidak ditagih)
- Pasokan air intermiten – menurut SCE (2019) jaringan distribusi air ditekankan selama 22 jam per hari dan sekitar 50% pelanggan memiliki tekanan yang memadai
- Pasokan air yang dirawat dan aman secara mikrobiologis untuk konsumsi manusia kepada warga Kota Makassar yang tidak terhubung dengan pasokan air masyarakat dan yang tidak mampu membayar air kemasan.
- Penurunan volume Air Non Pendapatan yang signifikan di Kota Makassar, dimana NRW saat ini diperkirakan 40-50% dari air yang dipasok ke jaringan distribusi air.
- Peningkatan simultan dan terkoordinasi dari:
 - Pengelolaan sumber daya air, baik sumber daya air tanah maupun air permukaan
 - Infrastruktur air teknis
 - Kontrol kehilangan air dan pengurangan NRW
 - Organisasi PDAM Kota Makassar, baik dari segi struktur organisasi maupun pengetahuan dan kapasitas staf profesional.

Tantangan saat ini terkait ketersediaan dan kualitas pasokan air baku di Mamminasata akan terus berlanjut di masa depan kecuali tindakan terkoordinasi diambil. Selanjutnya, Kota Makassar akan memiliki kerawanan pasokan air dalam beberapa dekade ke depan, kecuali pertimbangan diberikan kepada alternatif selain meningkatkan pabrik pengolahan air saja

Intervensi sektor broadscale potensial

Intervensi sektor skala luas harus mencakup:

- Implementasi fasilitas penggunaan kembali air cadangan di setiap pabrik pengolahan air berkapasitas besar, untuk memulai dengan WTP Somba Opu dan Panaikang saat ini, untuk dimasukkan dalam desain WTP Somba Opu II baru yang direncanakan dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam desain WTP KIMA baru yang direncanakan (tergantung pada teknologi perawatan yang dipilih)
- Mengubah kebijakan utilitas mengenai Unbilled Authorized Consumption (UAC). UAC adalah komponen dari NRW. Ini termasuk 'air gratis' (unbilled per kebijakan utilitas), pembilasan jaringan dan air pemadam kebakaran dan kadang-kadang juga air irigasi untuk taman umum dan ruang, dll. Pengalaman belajar bahwa volume 'air gratis' mungkin berjumlah besar. Karena air ini hadir dengan biaya untuk PDAM Kota Makassar, meminimalisir volume ini langsung menghasilkan pendapatan yang dapat diinvestasikan.

Rekomendasi untuk pelaksanaan skenario pembangunan

Rekomendasinya adalah:

- Pengurangan NRW yang signifikan di Kota Makassar akan membutuhkan waktu sekitar 25 tahun dan pendekatan manajemen proyek. PDAM Kota Makassar dapat mempertimbangkan dukungan dari perusahaan pengurangan NRW profesional selama sekitar 10 tahun yaitu melalui Kontrak Layanan Berbasis Kinerja
- Mengembangkan infrastruktur air teknis baru untuk wilayah Kota Makassar dimana intervensi untuk pengurangan NRW dilaksanakan atau dijadwalkan dalam waktu dekat.

4.3 SANITASI

4.3.1 Kebijakan, hukum, dan regulasi

Target

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian PUPR telah menetapkan target (di bawah RPJMN 2020-2024) untuk meningkatkan akses air minum (100%) dan akses ke sanitasi (90%) dan untuk meringankan 10.000 hektar kawasan kumuh. Ini artinya, pada tahun 2024 Indonesia direncanakan memiliki cakupan 100% untuk pasokan air, 10.000 hektar kurang kumuh, dan 90% akses sanitasi. Target tersebut disematkan pada Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikembangkan berdasarkan RPJMN 2020-2024.

4.3.2 Situasi pengiriman layanan yang ada

Prinsip utama

Seperti banyaknya negara berkembang, ada beberapa tantangan yang perlu disikadakan di Kota Makassar dan wilayah metropolitan Mamminasata yang lebih luas. Banyak di antaranya saling terkait, seperti akses layanan dasar, kendala keuangan dan pemerataan sosial, perencanaan kota dan keadaan lingkungan dan fasilitas umum. Selain itu, konteks kelembagaan, ekonomi dan sosial di Kota Makassar dan kawasan Mamminasata kompleks, seperti halnya negara berkembang mana pun. Sementara peraturan dan standar tersedia secara berlimpah, penegakan atau implementasinya sering dirusak oleh kendala kelembagaan dan ekonomi.

Sanitasi (layanan air limbah) harus dipertimbangkan sebagai bagian dari siklus air secara keseluruhan dalam pengelolaan pasokan air perkotaan, air limbah dan air badai (drainase). Dalam kasus Kota Makassar dan wilayah Mamminasata, unsur-unsur ini juga perlu diintegrasikan dengan pengelolaan sampah yang solid. Tujuannya, untuk Rencana Kota Makassar Layak Huni, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan secara kolektif untuk pengembangan solusi terpadu sebagai bagian dari perumusan skenario pembangunan dan penentuan prioritas strategi perbaikan.

Pengemudi untuk mengembangkan penilaian situasi khusus untuk sanitasi adalah:

- Layanan sanitasi saat ini tidak memadai dan tidak terintegrasikan, karena peraturan yang tidak memadai dan tidak diberlakukan dengan baik, terkendala oleh sumber daya dan kapasitas ekonomi
- Sejumlah besar investasi yang akan diperlukan dalam jangka waktu yang lama hingga beberapa dekade untuk memastikan sanitasi yang efektif di daerah metropolitan di mana pertumbuhan populasi dan pembangunan perkotaan luar biasa keberlanjutan jangka panjang pertumbuhan perkotaan.

Sanitasi yang ada dan terencana

Situasi fasilitas pengolahan air limbah di Kota Makassar per 2015 per Kecamatan disajikan dalam Tabel 8. Sumber meja ini adalah Bappeda Kota Makassar 2015. Proyeksi situasi masa depan fasilitas pengolahan air limbah di Kota Makassar per Kecamatan disajikan dalam Tabel 9.

Dipahami bahwa, sejak publikasi data ini, ADB Neighbourhood Upgrade and Shelter Program (NUSP) telah mengirimkan pabrik pengolahan air limbah komunal (WWTP komunal) dalam:

- Tamarunang, Mariso Kecamatan pada tahun 2017
- Panayaran, Kecamatan Mariso tahun 2018.

Konfirmasi dan deskripsif urther dari WWTP Komunal tambahan ini akan diberikan dalam analisis fase berikutnya. Analisis lebih lanjut ini akan mencakup fasilitas tambahan yang dijadwalkan untuk pelaksanaan di Kota Makassar dalam beberapa tahun ke depan.

Tabel 8: Fasilitas pengolahan air limbah di Kota Makassar per 2015.²⁶

Kecamatan	Total HH	Jumlah Toilet Umum	Pengguna HH Toilet Umum	Nomor IPAL Komunal	Pengguna HH Komunal IPAL	Jumlah Tangki Septik Komunal	Pengguna HH Septic Tank Komunal
Biringkanaya	35,684	0	0	2	196	0	0
Bontoala	14,140	28	126	0	0	0	0
Makassar	15,949	31	172	0	0	31	172
Mamajang	16,294	3	15	1	45	0	0
Manggala	24,658	23	699	2	393	0	0
Mariso	13,401	5	55	1	288	0	0
Panukkukang	26,929	21	115	0	0	2	6
Rappocini	28,444	0	0	0	0	0	0
Tallo	35,618	0	0	0	0	0	0
Tamalanrea	22,498	8	20	0	0	0	0
Tamalate	32,904	6	118	1	100	6	118
Ujung Pandang	7,177	45	360	3	433	37	290
Ujung Tanah	11,331	2	135	0	0	0	0
Wajo	11,347	14	74	0	0	0	0

²⁶ Bappeda Kota Makassar

Tabel 9: Fasilitas pengolahan air limbah terjadwal di Kota Makassar²⁷

Kecamatan	Total HH	Tank Septik HHs	Toilet Umum HHs	HHSIPAL Komunal	HH dengan Sanitasi	HH tanpa Sanitasi
Biringkanaya	54,315	54,113		41	54,154	161
Bontoala	15,395	15,232		114	15,346	49
Makassar	23,840	23,610		155	23,765	75
Mamajang	16,768	16,100		639	16,739	29
Manggala	39,140	38,553		319	38,872	268
Mariso	16,604	16,013	36	445	16,494	110
Panukkukang	38,567	37,933		444	38,377	190
Rappocini	40,324	39,599		723	40,322	2
Sangkarang	3,844	3,566			3,566	278
Tallo	38,751	37,069		1,662	38,731	20
Tamalanrea	27,589	27,366		161	27,527	62
Tamalate	49,509	48,527		897	49,424	85
Ujung Pandang	7,318	7,207		91	7,298	20
Ujung Tanah	9,801	9,607	62		9,669	132
Wajo	9,348	9,312			9,312	36

Sebagai hasil dari jadwal ini, sebagian besar rumah tangga (98%) akan memiliki septic tank di masa depan, meskipun tidak semua septic tank yang ada dibangun sesuai dengan standar teknis (diperkirakan sekitar 10%).

Septic tank rumah tangga di tempat merupakan landasan dari sistem sanitasi saat ini di Kota Makassar, yang kini mencakup sekitar 80-85% dari populasi. Hanya sejumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan saluran pembuangan terpisah yang masuk ke pabrik pengolahan air limbah Nipa-Nipa. Rencananya subproyek MSMIP Makassar termasuk WWTP Losari baru akan mengubah hal ini.

Septic tank di tempat secara umum tidak putus asa, dengan kurang dari 1 persen dari perkiraan 383.800 septic tank yang dibenci setiap tahun.

Sistem air limbah komunal, yang diusulkan sebagai bagian dari sistem sanitasi tiga tingkat, rusak atau tidak berfungsi optimal pada tahun 2017. Situasi saat ini tidak diketahui.

Kota Makassar telah menjadwalkan untuk menerapkan banyak fasilitas sanitasi tambahan di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan data dan kajian yang tersedia hingga saat ini, perkiraan penduduk di Kota Makassar yang dicakup oleh segala jenis sistem sanitasi saat ini sekitar 80-85%. Tangki septic di tempat

²⁷ DPU Kota Makassar, 2020

(rumah tangga) adalah jenis sistem sanitasi yang dominan. Sering desludging adalah persyaratan untuk berfungsinya septic tank. Layanan desludging tersedia di Kota Makassar, namun saat ini jumlah septic tank yang dibenci terlalu rendah untuk menjamin berfungsinya hal ini. Sistem sanitasi komunal saat ini tampaknya juga tidak memiliki pemeliharaan yang diperlukan, yang telah menyebabkan persentase tinggi dari ini menjadi investasi yang boros.

Hal ini mendasari perlunya operasi dan pemeliharaan yang memadai sebagai komponen kunci investasi masa depan dalam sistem sanitasi, untuk memastikan fungsi yang efisien dalam jangka waktu yang lebih lama. Juga, operasi dan pemeliharaan yang memadai diperlukan untuk sistem sanitasi terpusat yang lebih kompleks.

Backlog yang diwariskan

Kota Makassar, sebagai sebagian besar kota di Indonesia, menghadapi pasokan sistem sanitasi terpusat konvensional yang dapat dioperasikan dan dipelihara secara profesional. Pertumbuhan populasi dan pembangunan perkotaan meningkatkan kebutuhan akan investasi jalur cepat dalam layanan sanitasi publik, yang berarti masalah saat ini kemungkinan akan memburuk kecuali pendekatan terpadu dan berkelanjutan diadopsi.

Perlu pengelolaan air yang lebih efisien dan efektif

Ada interdependensi yang kuat antara pasokan air, sanitasi, air badai, pengelolaan sampah padat dan pembangunan perkotaan di Kota Makassar dan daerah Mamminasata. Volume air limbah yang dihasilkan dalam sebuah kota biasanya diperkirakan akan naik tajam seiring dengan peningkatan layanan pasokan air.

Meskipun rincian desain WWTP Losari yang direncanakan (komponen subproyek MSMIP Makassar) belum diungkapkan, perhitungan indikatif kapasitas 16 Mld untuk 14.000 sambungan dan 5 orang per koneksi akan menghasilkan volume mendekati 230 liter air limbah per orang per hari. Tingkat pembangkit air limbah ini menunjukkan permintaan air minum yang sama tingginya, yang dianggap sebagai tingkat penggunaan air yang tidak berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi terpadu untuk air dan sanitasi, langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan air, meningkatkan efisiensi air akan menjadi elemen kunci untuk meningkatkan kelayakan dan melindungi sumber daya air untuk masa depan.

Proyek MSMIP

Subproyek MSMIP Makassar menandai langkah signifikan menuju sanitasi yang efektif di Kota Makassar. Subproyek ini menerapkan sistem sanitasi tiga tingkat:

- Sistem air limbah on-site (terpusat) di daerah dengan kepadatan tinggi di kota
- Sistem sanitasi berbasis masyarakat dengan koneksi untuk masyarakat miskin perkotaan
- Kapasitas desludging untuk melayani rumah tangga dengan septic tank di tempat.

Subproyek Makassar hadir dengan biaya investasi sebesar US\$ 63,72 juta. Saat menerapkan biaya investasi sebesar US\$ 280 per orang yang dilayani untuk sekitar 470.000 orang yang tinggal di enam Kecamatan kepadatan tinggi Kota Makassar, anggaran investasi yang dibutuhkan adalah US\$ 132 juta. Harap dicatat bahwa sebagian dari 470.000 orang ini ditanggung oleh subproyek MSMIP saat ini. Untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari investasi selama periode yang lebih lama, perlu bahwa operasi dan pemeliharaan sistem komunal dan tangki septik rumah tangga (frekuensi desludging) akan dipastikan.

Perubahan transformatif sistemik

Solusi inovatif yang dikombinasikan dengan perubahan perilaku dalam proses perubahan transformatif menjadi kunci untuk mengembangkan sanitasi yang efektif bagi seluruh anggota masyarakat di Kota Makassar. Perubahan perilaku penting terkait dengan operasi dan pemeliharaan sistem sanitasi yang diperlukan, termasuk tangki septik di tempat, sistem sanitasi komunal atau sistem sanitasi terpusat di luar situs. Pemeliharaan meliputi:

- Tangki septik rumah tangga yang sering desludging
- Pemeliharaan berkelanjutan sistem berbasis masyarakat setelah investasi modal awal
- Rezim manajemen yang memadai untuk sistem sanitasi terpusat di luar situs.

Selain perubahan perilaku, inovasi seperti penggunaan kembali air abu-abu harus dipertimbangkan. Greywater dapat dicegat / direklamasi, dirawat dan digunakan kembali untuk penggunaan yang tidak dapat dipotong seperti pembilasan toilet, pencucian cucian, irigasi, pembersihan dan sebagainya. Surplus air abu-abu yang dirawat juga dapat digunakan untuk pengisian ulang air tanah (berpotensi menggunakan adsorpsi yang direkomendasikan sebelumnya dengan baik, Biopori, di setiap rumah).

Untuk memungkinkan transformasi perilaku dan sistemik, sistem sanitasi akan menggabungkan:

- Tangki septik rumah tangga di tempat di daerah dengan kepadatan rendah atau di area dengan kepadatan tinggi di mana koneksi hemat biaya tidak dapat dibuat
- Sistem sanitasi terpusat di luar lokasi di daerah dengan kepadatan tinggi. ²⁸ Sistem ini harus mencakup sumber daya batang air limbah, pipa air limbah, koneksi rumah tangga dan komersial, stasiun pompa dan pabrik pengolahan air limbah dengan fasilitas penerimaan septage termasuk peralatan pemisahan padat cairan. Subproyek MSMIP Makassar termasuk WWTP Losari dengan fasilitas pemisahan padat cair septase baru menandai langkah signifikan menuju sanitasi yang efektif di Kota Makassar
- Sistem air abu-abu komunal untuk merebut kembali, mengobati, mendaur ulang, dan menggunakan kembali air abu-abu untuk penggunaan air yang tidak dapat diolah, melalui koneksi layanan kedua khusus. Sistem air abu-abu komunal ini harus menggantikan sistem sanitasi komunal (yang sebagian besar tidak dirawat dengan benar). Pemeliharaan sistem air abu-abu komunal dapat lebih hemat biaya dan lebih sedikit memakan waktu daripada pemeliharaan sistem sanitasi komunal karena air abu-abu memiliki potensi fouling yang lebih rendah.

²⁸ Sangat penting untuk merancang sistem ini untuk air hitam Hanya dan dioperasikan dengan aliran air limbah serendah yang cukup dapat dicapai. Tuntut menghindari kebutuhan untuk memasang pasokan air berkapasitas besar. Kapasitas pasokan air di Kota Makassar mungkin membatasi operasi Masa depan sistem sanitasi terpusat.

4.3.3 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Opini mengenai tantangan utama

Tantangan utamanya adalah:

- Penghapusan jalur cepat dari backlog yang diwariskan pada sistem sanitasi terpusat berkapasitas besar konvensional yang dapat dioperasikan dan dikelola secara profesional
- Selanjutnya mengembangkan sistem sanitasi tiga tingkat untuk bangunan Kota Makassar tentang:
 - Tangki septik yang dipasang dengan benar yang sesuai dengan standar teknis saat ini dan yang dirawat dengan baik
 - Sistem sanitasi off-site berkapasitas besar konvensional di daerah dengan kepadatan tinggi
 - Sistem berbasis komunitas dan pemeliharaan masyarakat baik untuk sanitasi (jika masyarakat dapat memastikan operasi dan pemeliharaan selama jangka panjang) atau reklamasi air abu-abu, jika pemeliharaan harus berbiaya rendah dan lebih sedikit memakan waktu.

Intervensi sektor broadscale potensial

Intervensi sektor skala luas harus mencakup:

- Mulailah mempertimbangkan reklamasi air abu-abu dalam skala komunal dan menggunakan kembali air yang direklamasi untuk penggunaan non-potable (tekanan rendah) di tempat seperti pembilasan toilet dan irigasi ruang publik. Sistem air abu-abu komunal ini harus menggantikan sistem sanitasi komunal. Pemeliharaan sistem air abu-abu bisa lebih hemat biaya dan lebih sedikit memakan waktu karena air abu-abu memiliki potensi fouling yang lebih rendah
- Mulailah mempertimbangkan reklamasi effluent yang dirawat di WWTP Losari baru dan menggunakan kembali air yang direklamasi untuk penggunaan di seluruh area seperti pemadam kebakaran (tekanan tinggi) dan irigasi ruang publik yang besar (tekanan rendah)
- Mengembangkan dan menyediakan kursus pelatihan tentang septic tank rumah tangga dan sistem berbasis komunitas. Menawarkan pelatihan semacam itu adalah cara menurunkan rintangan bagi masyarakat luas untuk menjaga sistem air limbah.

Rekomendasi untuk pelaksanaan skenario pembangunan

Rekomendasi kami adalah:

- Analisis lebih lanjut dan integrasi data diperlukan ke dalam peningkatan sanitasi sejak 2015 dan deskripsi peningkatan yang direncanakan dalam waktu dekat, termasuk rencana untuk fasilitas pengolahan air limbah terpusat dan komunal.
- Mengembangkan apa yang disebut kantor manajemen program untuk mendukung dan mengawasi berbagai proyek yang akan berlangsung tiga hingga lima tahun mendatang, masing-masing berkontribusi pada peningkatan situasi sanitasi yang ada di Kota Makassar (yaitu subproyek MSMIP Makassar, Kota Makassar sebagai kota percontohan untuk LSIP dan RISE)
- Memprioritaskan pelaksanaan proyek-proyek di atas dikombinasikan dengan pengembangan proyek dan program untuk periode 2025-2030
- Mengembangkan dan memulai kampanye kesadaran publik untuk:
 - Merangsang rumah tangga untuk memiliki septic tank mereka secara proaktif dibenci
 - Merangsang rumah tangga untuk mengganti septic tank yang ada jika mereka tidak dibangun sesuai dengan standar teknis.

4.4 PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

4.4.1 Kebijakan, hukum, dan regulasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menguraikan aspek administrasi dan pengelolaan pengumpulan sampah dari tingkat rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial dan industri, serta untuk fasilitas umum dan sosial.

Peraturan Nomor 56 Tahun 2015 Kota Makassar tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Sampah/Kebersihan meliputi tarif retribusi jasa sampah komersial, tarif jasa pengangkutan sampah rumah tangga dari pintu ke pintu, tarif retribusi jasa pengangkutan sampah rumah tangga dengan pembuangan langsung ke dalam kontainer, dan tarif untuk biaya jasa pengangkutan sampah PKL.

Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga menetapkan kebijakan dan strategi lebih lanjut untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah sejenis, dan juga target progresif volume sampah (dalam ton/tahun) dan target pengurangan sampah dalam persentase (%) serta dalam ton/tahun di tingkat Kota.

4.4.2 Situasi pengiriman layanan yang ada

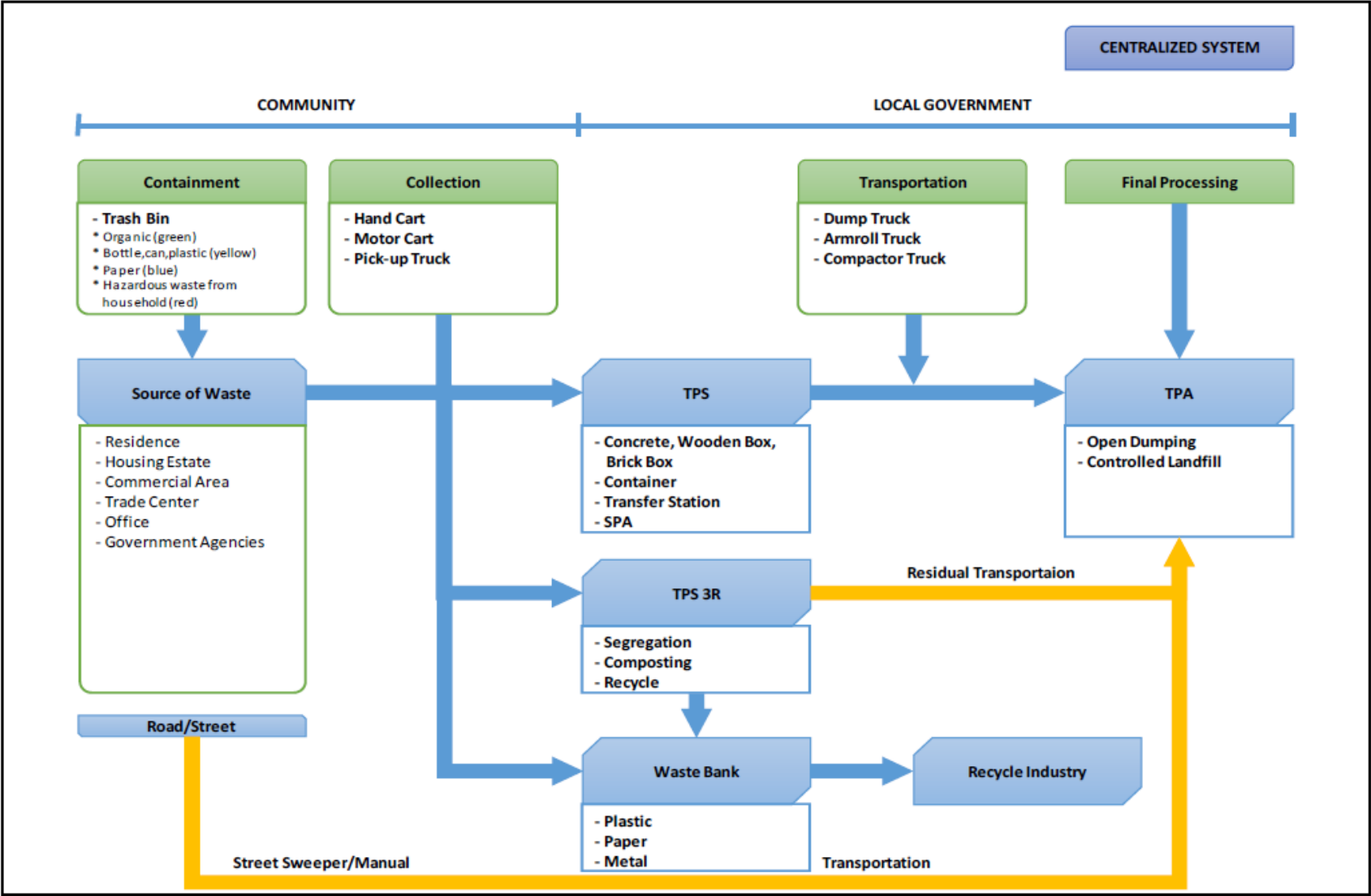
Rumah tangga diwajibkan membawa sampahnya ke titik-titik pengumpulan yang telah ditentukan, di mana sampah dikumpulkan oleh layanan pengumpulan sampah. Saat ini ada tiga belas Kecamatan yang berfungsi sebagai area pelayanan untuk pengelolaan sampah padat, semuanya kecuali Kecamatan Tamalate dan Kepulauan Sangkarang. Ada beberapa ratus tempat sampah/sampah bersama dan umum, beberapa tempat penyimpanan sementara (TPS) dan sekitar 900 bank sampah yang tersebar di seluruh Kota Makassar.

Menurut *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)* ²⁹, Kota Makassar menghasilkan sekitar 700 ton sampah per hari pada tahun 2016, terdiri dari 82% sampah organik dan 18% sampah anorganik. Pada tahun 2017, rata-rata volume pembangkit sampah adalah 6.500 m³/d dengan 95% diangkut ke TPA.

Bagan alur sistem pengelolaan sampah padat kota yang ada di Kota Makassar disajikan dalam Gambar 19. Sumber bagan alur ini adalah laporan "Dukungan Kapasitas Teknis Kota untuk Persiapan Investasi Pengelolaan Sampah Padat untuk *Indonesia, Perlindungan Lingkungan & Sosial – Laporan Akhir Makassar*" oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Kota.

Gambar 19: Bagan aliran limbah padat kota Makassar (2017)



4.4.3 Pengaturan kelembagaan

Pengelolaan sampah di Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah dikelola oleh Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar. Namun, akhir-akhir ini, pengumpulan sampah rumah tangga telah dialihkan ke masing-masing Kecamatan dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengumpulan Pungutan Dinas Sampah/Kebersihan kepada Pengurus Kecamatan di Kota Makassar oleh WaliKota.

Di zona 1, di mana kepadatan tinggi (lebih dari 100 orang/ha) kota Makassar berencana menyediakan metode pengumpulan 100% (dari rumah tangga ke pusat pembuangan sementara ke pusat pembuangan akhir) sedangkan untuk zona 4, di mana kepadatannya sekitar 25-100 orang/ha, metode ini juga pengumpulan dikombinasikan dengan konsep TPS 3R. Dalam waktu sepuluh tahun, kota ini berencana untuk memiliki area cakupan 100% untuk pengumpulan limbah padat di mana 80% dari upaya tersebut adalah untuk pembuangan limbah, sementara 20% adalah untuk mengurangi limbah.

4.4.4 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Tantangan utama

Solusi dan investasi yang diajukan SCE³⁰ pada tahun 2019 dalam proyek SISHA dapat diimplementasikan secara luas dan spesifik di seluruh kota. Untuk kepentingan Kota Makassar dan elemen lain dari sistem air dan sanitasi (misalnya kapasitas drainase air badai dan untuk meminimalisir banjir), campuran solusi rekayasa dan intervensi sosial (pelatihan, kampanye kesadaran dan semacamnya) untuk pengelolaan limbah padat akan memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kewajiban di Makassar.

Tujuan keseluruhan untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah padat kota harus memiliki semua limbah padat kota yang dikumpulkan dan diangkut ke sistem pengelolaan limbah padat kota dan, terutama, untuk menghilangkan pembuangan limbah di kanal, sungai dan di darat. Dalam hal ini, perlu untuk memperluas jumlah operasional semua komponen sistem: tempat sampah, armada pengumpulan, TPS, TPS-3R dan bank sampah. Armada koleksi harus cocok untuk wilayah dengan kepadatan tinggi dan kumuh kota Makassar.

SCE³¹ melaporkan masalah berikut dengan pengelolaan sampah di daerah kumuh:

- Armada koleksi terlalu terbatas untuk mencapai cakupan layanan 100%
- Keterjangkauan biaya pengumpulan sampah
- Persaingan antara bank sampah dan kolektor swasta lainnya.

Pendekatan 3R harus diterapkan dan difasilitasi sejauh mungkin, di seluruh kota. Dengan memilah sampah di sumbernya, limbah padat dapat diberikan kepada industri daur ulang sebagai sumber daya. Hal ini harus mengurangi volume sampah padat kota yang akan dibuang di TPA.

Perbaikan kelembagaan di seluruh kota, reformasi regulasi dan penegakan untuk menghilangkan pembuangan sampah / sampah lokal diperlukan. Limbah padat kota harus dipandang sebagai sumber daya. Sistem pengelolaan sampah padat Kota Makassar mencakup semua komponen yang diperlukan dari sistem pengelolaan sampah yang efektif. Namun, perilaku dan tindakan masyarakat merupakan elemen kunci dari kegagalan saat ini dalam proses pengelolaan

³⁰ TA-8556 REG: Studi Pra-Kelayakan tentang Peningkatan Kumuh dalam Proyek Kawasan Permukiman Manusia Strategis (47285-001), 2019

³¹ TA-8556 REG: Studi Pra-Kelayakan tentang Peningkatan Kumuh dalam Proyek Kawasan Permukiman Manusia Strategis (47285-001), 2019

sampah. Misalnya: SCE³² mengidentifikasi sampah / sampah sering dibuang di luar wadah sampah yang ditunjuk dan di pinggir jalan, dan ke kanal. Lebih lanjut Kebanyakan orang masih memandang sampah sebagai sampah yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Dengan demikian, pelatihan dan (kesadaran masyarakat) dinilai sangat penting.

Intervensi sektor broadscale potensial

Intervensi sektor skala luas harus mencakup:

- Pelatihan yang berkaitan dengan pengoperasian TPS-3R harus diberikan. Perlu bahwa staf yang bertanggung jawab memang memiliki keterampilan untuk mengoperasikan mesin TPS-3R.
- Menghargai perilaku yang lebih baik dan menghukum pembuangan limbah ilegal di lingkungan.

Rekomendasi untuk pelaksanaan skenario pembangunan

Rekomendasi kami adalah:

- Sayaninvestigate strategi untuk meminimalkan limbah padat ke TPA melalui pendekatan 3R, termasuk opsi untuk publik versus swasta
- Mengembangkan dan memulai kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari perilaku membuang sampah sembarangan publik saat ini. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan rekomendasi SCE (2019)
- Memperluas jumlah operasional semua komponen sistem pengelolaan limbah padat kota. Pengadaan tempat sampah, gerobak dan sebagainya. Mengatur ulang TPS, TPS-3R dan bank sampah menjadi (lebih) terbuka dan kompetitif pada harga sampah.

4.5 AIR BADAI DAN DRAINASE

4.5.1 Kebijakan, hukum, dan regulasi

Dasar hukum pengelolaan drainase di Makassar meliputi:

- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Kota Makassar; Dan
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2005–2025.

4.5.2 Situasi pengiriman layanan yang ada

Makassar terletak di medan rendah antara delta Sungai Jeneberang dan Tallo. Oleh karena itu, banjir adalah kejadian umum selama musim hujan (November-April). Banjir biasanya terjadi di daerah dengan tanah penyerapan rendah; sepanjang muara sungai (misalnya di sepanjang tepi Sungai Tallo); di dalam Kecamatan Biringkanaya, Tallo dan Tamalanrea; dan di muara Sungai Jeneberang dan Pampang. ...³³ di Makassar dikaitkan dengan hal-hal berikut: peningkatan cakupan area bawaan dan berkurangnya area tangkapan; deforestasi yang terjadi di daerah hulu; dan sistem drainase yang kurang optimal. ...³⁴

Kota Makassar memiliki tiga kanal drainase primer – *Panampu, Sinrijala dan Jongaya* – yang mengalir ke sungai Tallo. Ketiga kanal drainase ini dirancang untuk mengatasi banjir desain kembali selama 20 tahun. Saluran drainase sekunder dan tersier dirancang untuk banjir desain pengembalian 2 hingga 5 tahun.

Sistem drainase air badai Makassar berbasis gravitasi, terdiri dari saluran terbuka yang mengangkut air abu-abu yang tidak diobati dan air badai ke kanal dan saluran air. Sistem ini

³² TA-8556 REG: Studi Pra-Kelayakan tentang Peningkatan Kumuh dalam Proyek Kawasan Permukiman Manusia Strategis (47285-001), 2019

³³ CSIRO, Konteks dan tantangan dalam layanan air perkotaan dan air limbah untuk Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 2012

³⁴ LAPAN, Point of Action: Mendukung Makassar Smart City/Urban Development, Agustus 2020

awalnya dirancang untuk mengakomodasi praktik operasi dan pemeliharaan yang dipimpin komunitas sederhana, namun, literatur dan bukti anekdot yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pemeliharaan semacam itu tidak terjadi sesering yang diperlukan. Drainase air badai yang berfungsi dengan baik hanya mencakup sekitar 54% dari wilayah kota, yang terletak terutama di Kecamatan barat. ³⁵

Kapasitas sistem drainase air badai berkurang dengan sedimentasi dan praktik pembuangan limbah padat. Meluasnya praktik pembuangan limbah padat sembarangan di Makassar berdampak negatif pada amenitas masyarakat, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Di daerah dengan pengumpulan sampah yang tidak mencukupi, sampah dibakar atau dibuang secara ilegal di samping jalan dan saluran air dan sering berakhir di saluran drainase air badai. Ini tidak hanya mengurangi kapasitas drainase dan dapat menyebabkan penyumbatan, tetapi juga berdampak pada pengoperasian dan integritas seluruh sistem, dan selanjutnya memberikan peluang untuk berkembang biak nyamuk karena air yang tergenang. Akibatnya, luapan saluran air dan banjir selama peristiwa curah hujan intensitas tinggi adalah hal yang biasa.

Tantangan utama sehubungan dengan drainase di Makassar tetap kurangnya visi / strategi keseluruhan untuk integrasi seluruh jaringan. Ini menciptakan banyak efek riak, dari perencanaan dan desain piecemeal, hingga infrastruktur yang tidak terawat dan dioperasikan secara sub-optimal, yang semuanya memperburuk tingkat banjir di Makassar.

4.5.3 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Tantangan utama

Makassar menghadapi tantangan drainase air badai di seluruh kota dan lokal seperti yang diakui dan dilaporkan, di antara dokumen-dokumen lainnya, Masterplan 2010-2030 untuk Makassar (2006), CSIRO SUD Research Project (2012), dan Proyek SISHA SCE baru-baru ini (2019).

Tantangan menyeluruh utama mengenai drainase di Kota Makassar adalah kurangnya visi/strategi keseluruhan untuk integrasi saluran drainase air badai primer, sekunder dan tersier dan parit dalam sistem drainase air badai di seluruh kota. Akibatnya, pertumbuhan penduduk dan konsentrasi progresif masyarakat Kota Makassar senantius melampaui kapasitas pelaksanaan untuk kanal dan selokan baru. Pemeliharaan saluran, kanal, dan saluran air yang ada tidak memadai mengurangi kapasitas sistem drainase yang ada (sudah tegang).

Pekerjaan yang dilakukan pada Masterplan 2010-2030 untuk Makassar dan rencana yang lebih baru dikembangkan oleh KOTAKU dan SCE memberikan dasar yang sangat baik untuk memahami dan mengidentifikasi area /tindakan intervensi utama (dan prioritas). Tinjauan menyeluruh tentang rencana ini harus menghasilkan solusi yang cocok untuk tujuan untuk tantangan terkait drainase air badai saat ini di Makassar.

Intervensi sektor broadscale potensial

Intervensi sektor skala luas harus mencakup:

1. Pengerukan dan pendalaman saluran drainase air badai dan pengangkatan sampah dan sampah dari kanal dan saluran air untuk sementara dapat meningkatkan aliran. Langkah-langkah seperti itu, sementara jangka pendek, memang diperlukan kegiatan pemeliharaan yang tidak boleh ditunda.
2. Sebagai tantangan utama mengenai pengelolaan limbah yang solid tampaknya adalah perilaku publik, ditambah dengan kurangnya kesadaran mengenai dampak praktik pembuangan yang tidak pandang bulu saat ini terhadap lingkungan, infrastruktur dan

³⁵ Sce Jilid 6 – Lampiran Tambahan: Laporan Kota Makassar, Oktober 2019

kesehatan masyarakat, campuran intervensi sosial dan solusi yang digerakkan oleh teknologi / rekayasa untuk pengelolaan limbah padat tampaknya jelas dan perlu.

3. Visi / strategi keseluruhan untuk integrasi saluran drainase air badai primer, sekunder dan tersier dan parit dalam sistem drainase air badai di seluruh kota harus dikembangkan.
4. Kota Makassar harus mengidentifikasi dan mengimplementasikan intervensi sebaik mungkin dan layak secara ekonomi dari berbagai rencana yang berkembang dengan baik yang telah tersedia selama beberapa dekade terakhir.

Rekomendasi untuk pelaksanaan skenario pembangunan

Rekomendasi kami adalah:

- Memulai kegiatan pemeliharaan yang diperlukan untuk meningkatkan aliran bebas air badai sebelum musim hujan berikutnya;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perilaku membuang sampah sembarangan publik saat ini;
- Mengembangkan visi / strategi keseluruhan untuk integrasi sistem drainase air badai di seluruh kota.

4.6 LISTRIK / ENERGI

4.6.1 Tekanan saat ini

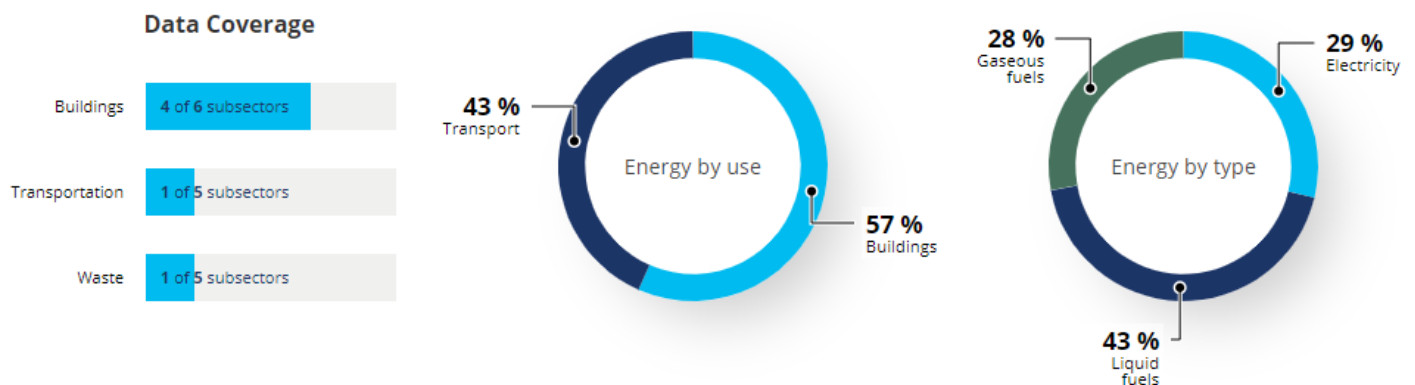
Mayoritas energi Indonesia dipasok oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) milik pemerintah korporasi. Sumber energi terutama konvensional (berbasis fosil), 95% dan 5% energi terbarukan (RE). Kontribusi dari sumber energi konvensional untuk listrik adalah 87,48 % sedangkan kontribusi dari RE adalah 12,52% .

Diharapkan pada tahun 2033 konsumsi energi listrik di Makassar akan masuk ke fase kejenuhan. Makassar perlu mengurangi ketergantungan pada sumber konvensional dan beralih ke sumber energi terbarukan.

Sekitar 42% energi digunakan untuk transportasi, yang merupakan kontribusi utama untuk polusi udara. Pasokan angkutan umum tidak sesuai dengan permintaan. 57% energi digunakan untuk bangunan. Untuk mengurangi konsumsi energi oleh sektor residensial akan penting untuk mengembangkan kebijakan efisiensi energi (tingkat energi).

Dari sektor energi, sepertiga emisi berasal dari sektor residensial (bentuk emisi langsung cair gas minyak bumi/LPG untuk memasak) dan emisi tidak langsung (grid konsumsi listrik). Sektor transportasi berkontribusi sebesar 26% (bahan bakar fosil terbakar). Sektor industri berkontribusi sebesar 16%. Sektor komersial berkontribusi dengan 15%.

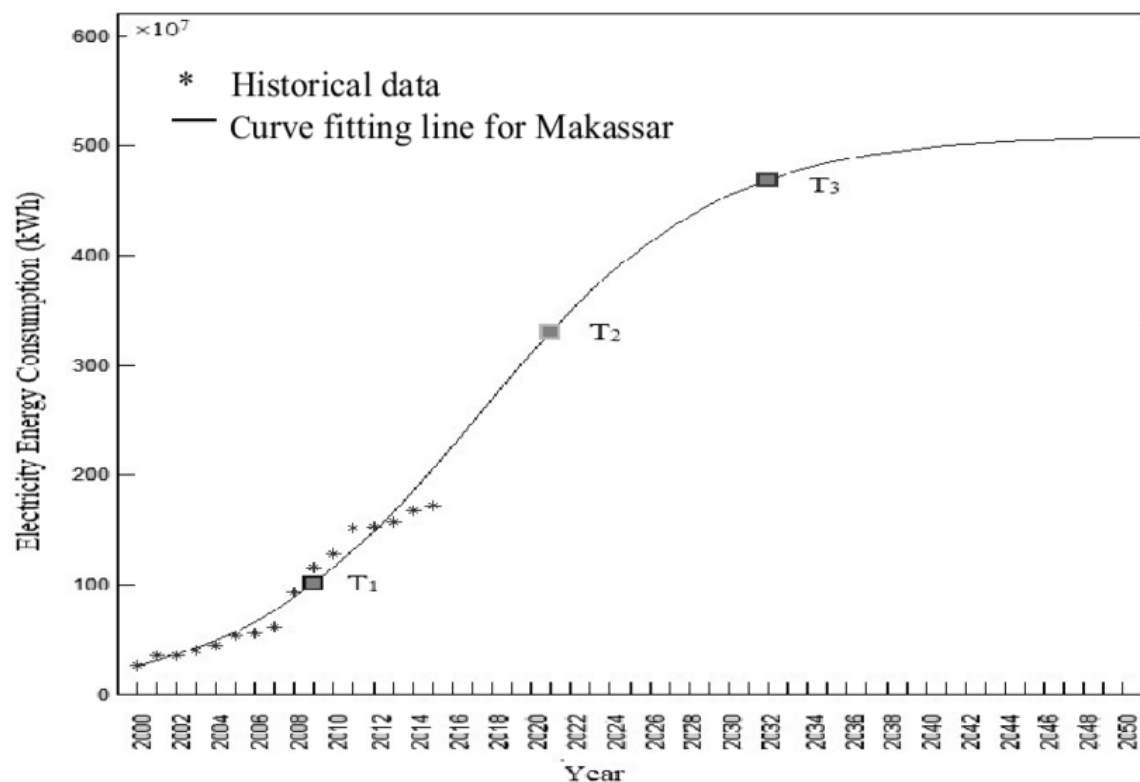
Gambar 20: Data energi Makassar untuk 2017



4.6.2 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Konsumsi listrik di Makassar meningkat dari 263 juta kWh pada tahun 2000, menjadi 1.719 juta kWh pada tahun 2015. Mengetahui permintaan energi (listrik) di masa depan penting untuk mencapai pengembangan jaringan listrik dan manajemen yang ada secara optimal.

Gambar 21: LCM khas untuk konsumsi energi listrik di Makassar³⁶



³⁶ Akil et al., 2019

Akil *dkk*, 2019 menyelidiki masa kejenuhan konsumsi listrik di Makassar menggunakan pendekatan kurva logistik. Gambar 21 menunjukkan tiga fase (T) pertumbuhan konsumsi energi listrik:

1. Pertumbuhan lambat / datar pada tahun 2009 (T1)
2. Pertumbuhan pesat pada tahun 2021 (T2)
3. Pertumbuhan saturasi pada tahun 2032 (T3).

Hasil prediksi menunjukkan konsumsi energi listrik di Makassar akan masuk ke dalam kondisi saturasi dari tahun 2033 dengan perkiraan volume konsumsi 4.748 juta kWh. Informasi yang disajikan dapat berkontribusi dalam mengembangkan jaringan listrik yang lebih efektif di Makassar untuk menjaga layanan listrik yang optimal kepada konsumen di masa depan.

4.7 MOBILITAS DAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

4.7.1 Kebijakan, hukum, dan regulasi

Program yang ada untuk meningkatkan mobilitas di Makassar meliputi:

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2015-2034, yang meliputi:
 - Regulasi mengenai sistem jaringan kereta api perkotaan
 - Jaringan transportasi air darat terintegrasi
 - Sistem transportasi antarmodal yang terintegrasi dan hierarkis
 - Sistem terintegrasi untuk pejalan kaki, penyandang disabilitas dan sepeda (jaringan jalan arteri dan kolektor)
 - Sistem overpass pada node penting kota
- Pemerintah kota Makassar bersama Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ) saat ini sedang berupaya mengoperasikan kembali BRT.
- Badan Sistem Informasi Kota Makassar (Dinas KomInfo) memiliki proyek serupa yang sedang berjalan bernama *Smart City Plan* yang mencakup berbagai solusi teknologi digital dan cerdas untuk transportasi Makassar, antara lain:
 - Penambahan Sistem Kontrol Lalu Lintas Area (ATCS)
 - Penambahan CCTV
 - Peningkatan sistem manajemen transportasi umum
 - Sistem informasi rute dan jadwal elektronik transportasi umum
 - Sistem pembayaran transportasi umum menggunakan kartu tarif tunggal
 - Aplikasi Intelligent Transportation System (ITS)
 - Sistem keselamatan dan kontrol kendaraan
 - Solusi parkir pintar.

Karakteristik utama dari peraturan transportasi umum saat ini meliputi sebagai berikut:

- Lisensi microbus dikeluarkan oleh badan transportasi kota dan berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. Pendaftaran ulang tahunan diperlukan selama masa berlaku.
- Lisensi microbus dapat diberikan dengan janji temu langsung atau ditenderkan secara terbatas atau terbuka.
- Tarif mikrobus diatur oleh pemerintah, yaitu melalui Peraturan Wali Kota.
- Karena munculnya taksi berbasis aplikasi di Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan tarif untuk moda ini. Peraturan ini menetapkan tarif minimum dan maksimum termasuk biaya minimum yang dibebankan berdasarkan zona.

Gambar 22 menggambarkan kisaran moda transportasi umum yang ada di Makassar.

Angkutan umum dalam penelitian ini mencakup semua layanan transportasi yang tersedia secara publik, diatur oleh otoritas/pemerintah dan memiliki perwakilan hukum. Alternatif yang berjalan tanpa lisensi atau memiliki organisasi dianggap sebagai transportasi informal.

Gambar 22: Ikhtisar Angkutan Umum Kota Makassar



- 9-10 people max.
- Operated privately
- No schedule or headway
- No dedicated stop
Passengers can board
- Flat fare/ride



- 70 people max.
- Operated by state-owned enterprise
- Planned schedule or headway
- Dedicated stop for boarding and alighting
- Flat fare/ride



- No operational license
- Service is requested from informal service rank such as around market
- Door-to-door service
- No clear fare system



- Run privately
Permit and vehicle are owned privately
- Service is requested through online application
- Door-to-door service
- Fare is calculated at the time of booking



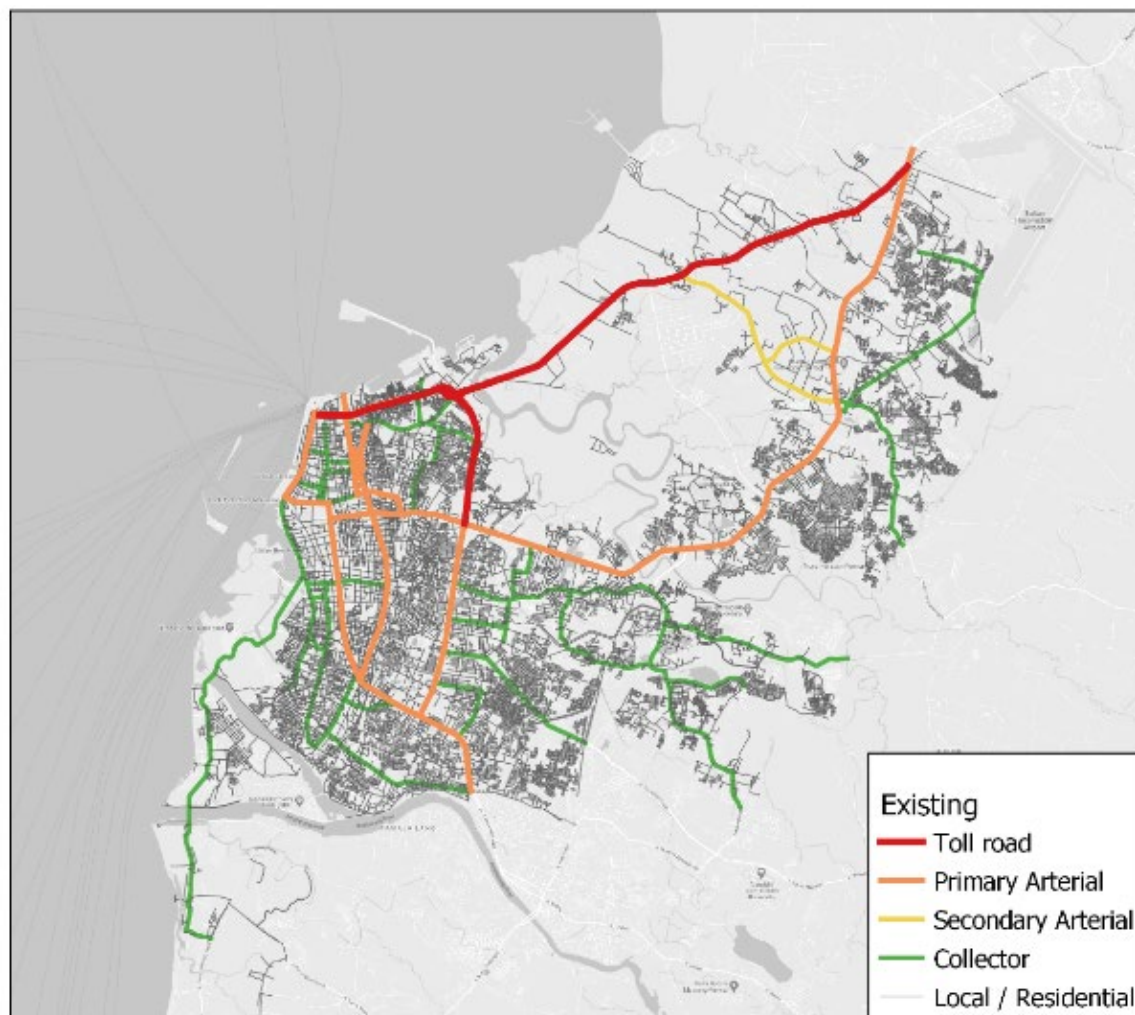
- Permit and vehicle are owned by company
- Service is requested through phone, taxi rank or roadside hail
- Special permit is needed to board passengers at the airport
- Door-to-door service
- Fare is by meter

4.7.2 Ation situ pengiriman layananyang ada

Infrastruktur jalan yang ada

Secara umum, sistem jaringan jalan di Kota Makassar memiliki pola linier yang menghubungkan wilayah tengah Kota Makassar di bagian barat kota Makassar dengan bagian lain kota di bagian selatan dan timur kota. Di daerah selatan dan timur kota, yang umumnya merupakan daerah perumahan, pola jalan menggunakan sistem grid.

Gambar 23: Peta Jaringan Jalan Kota Makassar Berdasarkan Fungsi Jalan



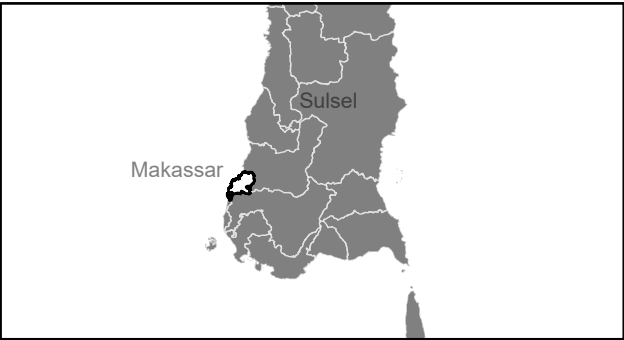
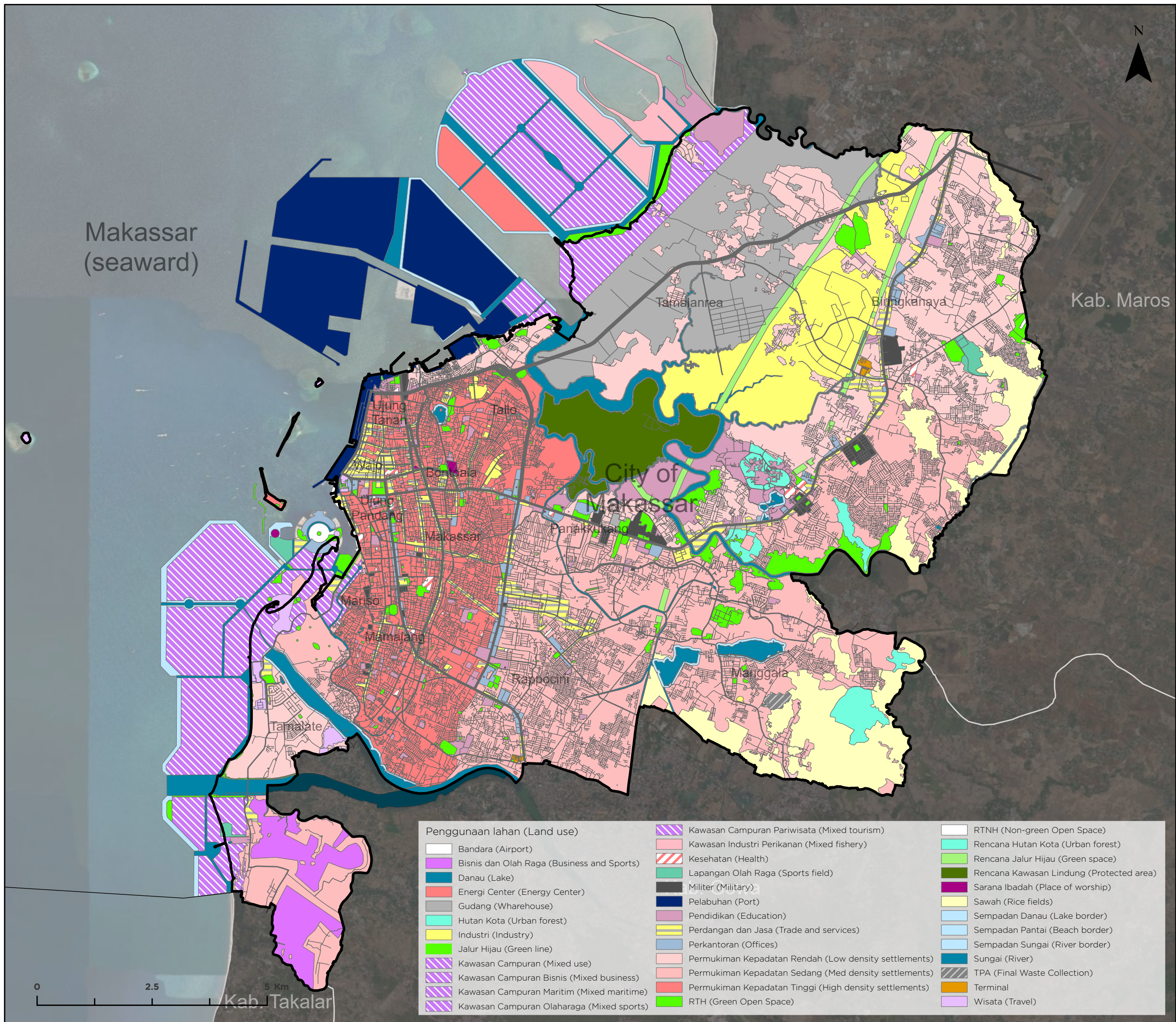
Sarana transportasi umum yang beroperasi di Kota Makassar saat ini terdiri dari microbus (pete-pete), Bus Rapid Transit (BRT), transportasi berbasis aplikasi online (grab, gojek dan maxim) serta transportasi informal.

Menurut kantor statistik provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar terdapat 1.337.738 kendaraan pada 2015 dan 1.574.385 kendaraan pada 2018, meningkat lebih dari 5% secara tahunan. Dari total jumlah kendaraan di Kota Makassar, lebih dari 70% adalah sepeda motor. Tingginya pertumbuhan khususnya pada kepemilikan sepeda motor dipengaruhi oleh peningkatan tingkat pendapatan masyarakat serta kemudahan dalam mendapatkan kredit kendaraan bermotor dengan uang muka yang rendah. Jumlah kendaraan berdasarkan jenis di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 10: Jumlah Kendaraan oleh Pemerintah Kota/Kota untuk Sulawesi Selatan 2018 ³⁷

Kota / Kota	2018				
	Jenis Kendaraan				
	Mobil	Bus	Truk	Sepeda motor	Total
Bantaeng	1,777	103	1,449	27,386	30,715
Barru	3,360	9	1,876	42,788	48,033
Tulang	7,849	3,687	7,464	167,270	186,270
Bulukumba	8,132	341	5,671	101,803	115,947
Enrekang	2,112	44	1,866	41,933	45,955
Gowa	20,118	202	9,996	240,772	271,088
Jeneponto	3,606	211	3,181	42,534	49,532
Kepulauan Selayar	831	73	385	17,883	19,172
Luwu	4,901	41	2,659	105,403	113,004
Luwu Timur	6,146	269	4,802	99,011	110,228
Luwu Utara	2,641	17	2,372	76,878	81,908
Maros	7,422	53	3,588	68,933	79,996
Pangkajene Dan Kepulauan	8,462	70	4,742	92,253	105,527
Pinrang	10,440	33	6,001	170,133	186,607
Sidenreng Rappang	8,104	172	5,140	94,743	108,159
Sinjai	2,501	141	1,632	51,457	55,731
Soppeng	3,724	1,294	4,288	59,684	68,990
Takalar	4,773	71	3,095	88,463	96,402
Tana Toraja	3,202	86	2,852	68,463	74,603
Toraja Utara	0	0	0	0	0
Wajo	10,625	74	6,759	133,472	150,930
Kota Makassar	233,135	17,411	79,623	1,244,216	1,574,385
Kota Parepare	15,149	55	9,674	99,895	124,773
Kota Palopo	6,100	109	2,911	90,124	99,244
Sulawesi Selatan	375,110	24,566	172,026	3,225,497	3,797,199

³⁷ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/7300/api_pub/150/da_10/1



- Key**
- City of Makassar
 - Makassar - seaward
 - Kabupaten (regency)
 - Kecamatan (sub-districts)
- Kelas jalan (Road class)
- Jalan Tol (Highway)
 - Jalan Arteri Primer (Primary arterial road)
 - Jalan Arteri Sekunder (Secondary arterial road)
 - Rencana Jalan Kolektor Primer (Primary collector road)
 - Jalan Kolektor Sekunder (Secondary collector road)
 - Jalan lokal Primer (Primary local road)
 - Jalan Lokal Sekunder (Secondary local road)

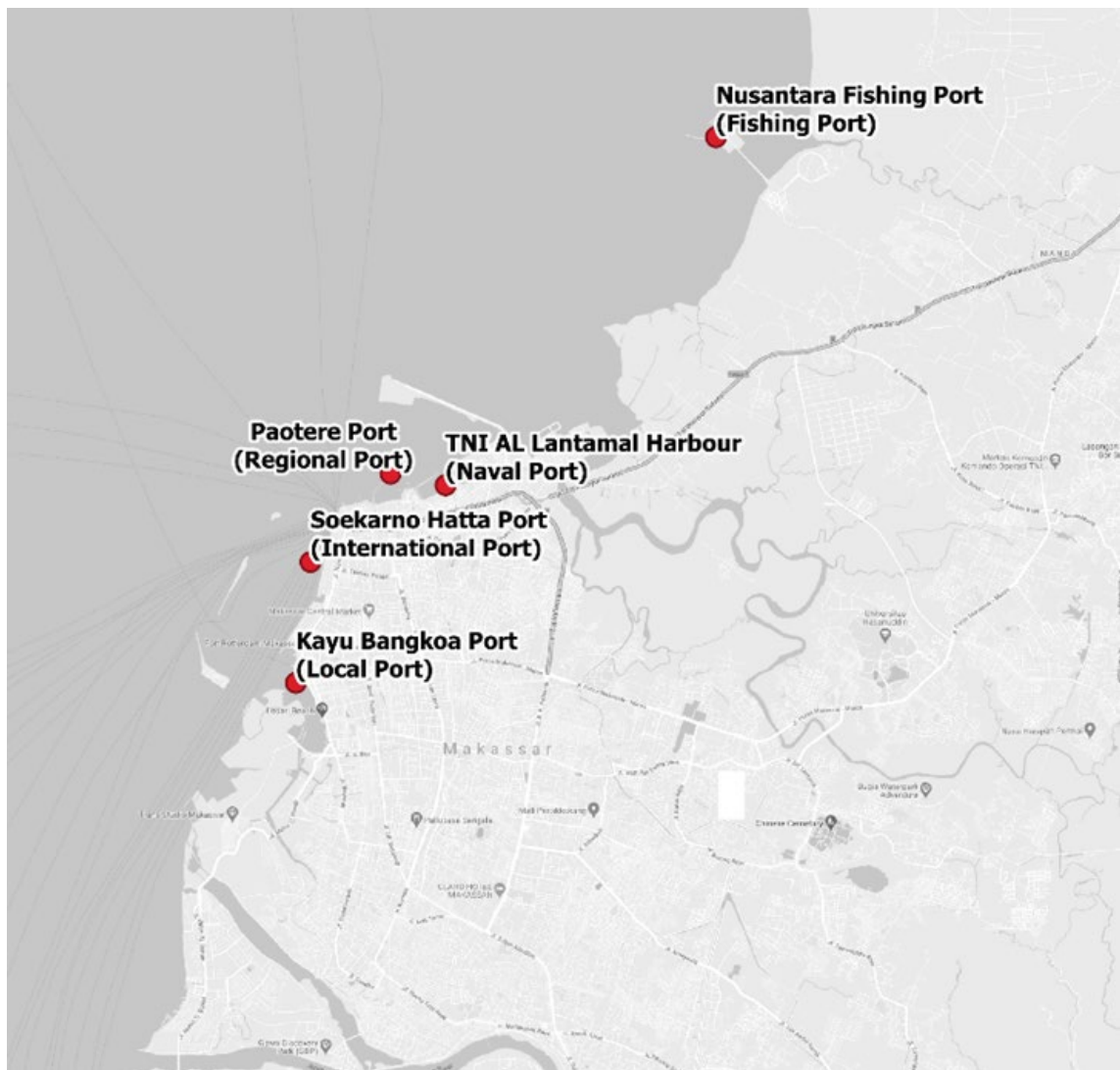
Date: 22/01/2021
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment

Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection: UTM

Figure 24: Makassar Land Use, Overlaid with Road Network by Road Class

Ada banyak lalu lintas antara pulau-pulau Makassar dan daratan setiap hari yang dilayani oleh Pelabuhan Kayu Bangkoa dan Pelabuhan Paotere (Gambar 25). Daya tarik kepulauan Makassar sebagai destinasi wisata di atas asal perjalanan telah menempatkan beban ekstra menempatkan cara air dan pelabuhan. Sistem transportasi antara pulau-pulau dan daratan sejauh ini hanya dikelola secara pribadi dengan infrastruktur dan layanan yang buruk. Karena banyak gerakan ini dilakukan menggunakan perahu tradisional dan kecil, kecil kemungkinan gerakan direkam dengan benar dan termasuk dalam catatan resmi seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12.

Gambar 25: Pelabuhan Kota Makassar



Tabel 11: Jumlah Kunjungan Kapal dengan Jenis Pengiriman, 2015-2018.³⁸

TIDAK	DESKRIPSI	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Internasional	133	193	191	195
2	Nasional	3,820	3,707	3,712	3.463
3	Khusus	382	458	541	538
4	Lokal	1,044	1,084	946	879
5	Lain	108	8	0	0
Total		5.487	5,450	5,390	5,075

Tabel 12: Jumlah penumpang naik dan turun di pelabuhan Makassar, 2015-2018.³⁹

TAHUN	ASRAMA	TURUN
2015	595,806	427,806
2016	482,177	373,519
2017	317,664	302,319
2018	312,019	287,487

4.7.3 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Populasi kota Makassar pada siang dan malam hari berbeda. Siang harinya, jaringan transportasi kota Makassar juga terbebani oleh pergerakan orang dan kendaraan dari daerah sekitar kota Makassar, Mamminasata.

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Makassar tidak sejalan dengan pertumbuhan sistem transportasi dan jaringannya. Kemacetan lalu lintas adalah salah satu masalah transportasi dan mobilitas terbesar di kota. Pengembangan jaringan transportasi di seluruh kota belum cukup untuk mendukung tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan kondisi lalu lintas padat dan berkurangnya mobilitas di Makassar, yang merugikan berdampak pada kewajiban.

Penting bahwa jaringan transportasi mendukung aksesibilitas untuk semua penduduk dan bisnis. Untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk mengubah perilaku operator.

Ketersediaan lahan menjadi kendala pelaksanaan rencana yang ada dan masa lalu. Jalan kanan jalan tidak memadai untuk membangun jalur khusus BRT membuat BRT lebih banyak bus dengan halte yang ditunjuk dan bukan transit cepat. Melindungi koridor transportasi yang cukup luas untuk memenuhi pertumbuhan di masa depan adalah elemen kunci perencanaan untuk pengembangan di masa depan.

Masterplan atau strategi jangka pendek dan jangka panjang yang terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk meringankan masalah mobilitas kota Makassar. Transportasi yang adil dan efisien untuk semua warga negara, bisnis, dan pengunjung adalah elemen kunci dari kota yang layak huni dan berkelanjutan.

³⁸ Sumber: Kota Makassar dalam angka 2019

³⁹ Sumber: Kota Makassar dalam angka 2019

Elemen kunci dari infrastruktur transportasi dan perilaku yang ada yang mempengaruhi mobilitas perkotaan bersama dengan intervensi potensial dijelaskan di bawah ini.

Faktor		Intervensi potensial
Pertumbuhan kepemilikan kendaraan yang tinggi karena kondisi perekonomian yang lebih baik dan kemudahan yang lebih besar dalam memperoleh pinjaman dibandingkan masa lalu		- Peningkatan infrastruktur jalan untuk meningkatkan 'tingkat layanan' - kualitas jalan atau trotoar, jumlah jalur dan evaluasi batas kecepatan - Kendaraan harus lulus uji awal dan berkala yang mencakup persyaratan teknis dan operasional
Kendaraan bermotor roda dua mendominasi hingga lebih dari 70% dari total kendaraan di Makassar		- Regulasi, reklasifikasi fungsi jalan - Perpajakan progresif atas kepemilikan kendaraan pribadi
Infrastruktur pejalan kaki dan non-bermotor yang terbatas		- Mendorong investasi infrastruktur yang lebih besar untuk mendukung transportasi non-bermotor, termasuk menutup jalan tertentu ke kendaraan (hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu) dan lebih banyak jalur pejalan kaki dan siklus yang terpisah - Fasilitas yang memberikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran perjalanan
Terdapat kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas baik pada infrastruktur jalan maupun sistem angkutan umumnya		- Regulasi infrastruktur baru untuk memberikan akses yang lebih merata - Integrasi akses yang merata ke dalam desain fasilitas umum baru, pengembangan komersial / perumahan dan infrastruktur transportasi.
Fasilitas parkir off-street yang terbatas		- Solusi parkir di luar jalan seperti gedung parkir atau area parkir - Aplikasi skala kecil inovasi parkir dan penggunaan meter parkir elektronik
Microbus (pete-pete) mendominasi sistem transportasi umum "massal" di Makassar meskipun memiliki tingkat layanan yang buruk		
BRT Mamminasata saat ini hanya mengoperasikan satu koridor dari tujuh koridor yang diimplementasikan dan membutuhkan jalur terpisah		Sistem informasi yang baik diperlukan, termasuk informasi rute, informasi tarif, informasi jadwal atau memberikan layanan yang lebih tinggi dengan menggabungkan dan memanfaatkan integrasi sistem dan menyediakan layanan perencanaan perjalanan
Taksi berbasis aplikasi online banyak digunakan, tetapi selain regulasi tarif oleh pemerintah pusat, tidak ada evaluasi atau regulasi mendalam yang ada		
Lalu lintas yang signifikan antara pulau-pulau Makassar dan daratan utama, melayani komuter dan wisatawan, dengan integrasi dan fasilitas yang tidak memadai		Perumusan strategi yang dipesan lebih dahulu untuk memberikan transportasi berbasis air yang efisien dan efektif yang mencakup penjadwalan, integrasi, dan fasilitas pendukung

4.8 PENETRASI DIGITAL

4.8.1 Pengaturan kebijakan, hukum, dan kelembagaan

Dasar hukum untuk smart city di Indonesia adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 oleh pemerintah daerah pada Bab XXI berjudul inovasi daerah dari Pasal 386 hingga Pasal 390. ⁴⁰

Berbagai landasan hukum telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait pelaksanaan program Makassar Smart City (Jilid 12: Smart Infrastructure memberikan gambaran mengenai regulasi tersebut). ⁴¹ Mengacu pada Bagian 2 laporan ini untuk deskripsi program Makassar Smart City saat ini.

Sebagai kantor utama dalam program Smart City, Bappeda dan KomInfo bertujuan untuk mengintegrasikan data dari semua sektor ke dalam dasbor war room. Beberapa data departemen dibagikan dengan dasbor war room, termasuk data kependudukan dari kantor pencatatan sipil, data DHIS-2 dari dinas kesehatan, data distribusi obat real-time, jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia, jumlah antrean di klinik dari rumah sakit kota, data dari Kantor Wilayah Ketenagakerjaan, data perdagangan, dan data dari Dinas Lingkungan Hidup. Di masa depan, semua sektor akan didorong untuk berbagi data mereka dengan dasbor war room.

KomInfo baru-baru ini mengembangkan peta jalan ambisius untuk inisiatif kota pintar berikutnya dalam program kota pintar. Peta jalan ini berfokus pada teknologi cerdas dan digital dan mencerminkan visi penerapan teknologi baru untuk meningkatkan sektor perawatan kesehatan, keamanan, dan mobilitas di luar 2020. ⁴²

4.8.2 Akses Internet

Internet telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan banyak pemerintah memiliki contoh platform digital yang digunakan seperti platform media sosial, e-mail, SMS, portal pemerintah online dll, untuk berbagi informasi penting yang tepat waktu dan akurat tentang pandemi COVID-19 baru-baru ini.

Persentase pengguna ponsel pintar secara nasional telah meningkat secara substansial dari 60% pada tahun 2019 menjadi 94% pada tahun 2020. Konektivitas internet telah meningkat secara substansial selama periode yang sama, dengan pangsa semua pengguna internet mengakses melalui ponsel pintar yang tercatat sebesar 96% pada tahun 2020. Pertumbuhan luar biasa dalam penetrasi ponsel pintar ini selama setahun terakhir sebagian besar dikaitkan dengan peningkatan cakupan seluler (3G dan 4G), keterjangkauan, kesiapan konsumen dan peningkatan pengembangan konten dan layanan dalam bahasa lokal. ⁴³⁴⁴

⁴⁰ Masterplan Makassar Smart City Baku III, Ringkasan Eksekutif Masterplan Smart City Daerah, DisKomInfo Makassar

⁴¹ Masterplan Makassar Smart City Baku III, Ringkasan Eksekutif Masterplan Smart City Daerah, DisKomInfo Makassar

⁴² KomInfo Kota Makassar, Rencanakan Kota Makassar Smart City di luar 2020 (2020)

⁴³ Kami sosial dan Hootsuite, Digital 2019 Indonesia (2019)

⁴⁴ Kami sosial dan Hootsuite, Digital 2020 Indonesia (2020)

Gambar 26: Penetrasi Digital di Indonesia dari 2019 hingga 2020.⁴⁵

	2019	2020
 The average speed of mobile internet connections in Indonesia is recorded at:	10.53 MBPS	13.83 MBPS
 Internet users in Indonesia is recorded at:	56% (150 million)	64% (175.4 million)
 Mobile phone (any type) users is recorded at:	91% (age 16 to 64)	96% (age 16 to 64)
 Smart phone users in Indonesia is recorded at:	60% (150 million)	94% (175.4 million)
 The share of all internet users accessing via smartphones in Indonesia is recorded at:		96%

4.8.3 Infrastruktur

Sekitar 80% pelanggan di area layanan telah dijangkau oleh jaringan serat optik. Termasuk daerah dengan klasifikasi kepulauan, bahkan di Kota Makassar, hampir 100% wilayah tersebut dapat dijangkau oleh jaringan serat optik.

Sulawesi merupakan salah satu daerah yang telah meningkatkan konektivitas hingga misalnya layanan 4G dengan kini memiliki pengguna ponsel pintar yang terhubung dengan 4G 9 dari 10 kali. ⁴⁶ Makassar merupakan salah satu kota di Indonesia yang bersiap-siap untuk Broadband Wireless Access (BWA) mewujudkan target kecepatan di atas 100 MBPS dan era 5G.

Di daerah terpencil, seperti Pulau Langkai, yang berjarak dua jam dengan kapal dari Makassar, infrastruktur dasar termasuk teknologi informasi, sinyal telepon, listrik, perawatan kesehatan, dan instalasi air tidak cukup tersedia. Orang-orang yang tinggal di pulau itu menempatkan penguat sinyal di ponsel mereka untuk mengakses informasi dari televisi, radio, dan ponsel. ⁴⁷

⁴⁵ Kami adalah social and Hootsuite, Digital 2019 Indonesia (2019); Kami adalah social dan Hootsuite, Digital 2020 Indonesia (2020))

⁴⁶ <https://www.opensignal.com/2020/11/26/palapa-ring-has-successfully-improved-mobile-connectivity-in-remote-indonesian-islands> [Diakses 18-12-2020]

⁴⁷ USAID dan JSI, Membangun Kota Sehat – Penilaian Penggunaan dan Akses Data Makassar (2019)

Untuk infrastruktur jaringan seluler di Makassar, saat ini terdapat 5 operator utama, yaitu Telkomsel, Smartfren, Indosat Ooredoo, XL Axiata dan 3 Tri. Cakupan area terbesar dimiliki oleh operator Telkomsel dan Smartfren, hampir memiliki cakupan 100%, sedangkan Indosat, XL dan 3 memiliki cakupan 90%. Saat ini, teknologi yang telah didukung adalah 4G dan 4G+.

Untuk mendukung tuntutan kapasitas jaringan di Makassar di masa depan, kapasitas jaringan perlu:

- Mendukung implementasi 5G (kecepatan akses saat ini hanya 5-60 Mbps)
- Diaktifkan oleh pusat data kapasitas besar (kapasitas 1000 Tb) untuk mendukung sistem otomasi layanan pemerintah
- Pertimbangkan komunikasi hijau untuk menggunakan sumber daya energi terbarukan seperti surya, angin, penyimpanan baterai di base station dan relay.

4.8.4 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Tantangan utama yang dihadapi Makassar dalam memberikan akses yang lebih besar terhadap teknologi pintar dan solusi digital bagi warganya antara lain:

- Masalah terbesar program smart city adalah program perangkat lunak atau aplikasi tidak terintegrasi dalam satu departemen dengan departemen lain. Setiap departemen mengembangkan aplikasi dan hasi sendiri, sehingga sulit untuk mengumpulkan data secara keseluruhan
- Tantangan lain adalah sulit untuk mengintegrasikan perangkat lunak masing-masing departemen terkait karena belum diatur dalam peraturan
- Pemkot Makassar ingin kembangkan teknologi yang dapat mengintegrasikan seluruh kantor pemerintahan di Makassar dengan program hemat biaya dan baik
- Selanjutnya, pemerintah ingin membuat "data satu pintu" dalam satu aplikasi pintar
- Akses ke TIK terbatas di antara penduduk yang tinggal di daerah kumuh dan dari keluarga berpenghasilan rendah. Ponsel biasanya digunakan untuk komunikasi pribadi dan jarang digunakan untuk menemukan informasi dan layanan publik.

5. HUMAN CAPITAL: KESEJAHTERAAN DAN MATA PENCAHARIAN



5.1 KESEHATAN DAN LAYANAN

Dari segi kesehatan, Makassar berupaya berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan melalui fasilitas home care. Namun, layanan ini pada tahap awal dengan kendala sumber daya dan tenaga kesehatan yang memadai.

Dinas Kesehatan Kota Makassar mengkoordinasikan operasional pelayanan 29 Rumah Sakit Umum dan Khusus, 21 Rumah Sakit Bersalin, 44 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 30 Puskesmas Pembantu, dan 51 Pusat Medis/Klinik yang tersebar di 15 Kecamatan di Kota Makassar. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengkoordinasikan kegiatan di pusat medis/klinik yang dibangun dan dijalankan oleh lembaga masyarakat/swasta. Fungsi utama kantor kesehatan meliputi:⁴⁸

- Perumusan Kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
- Mengembangkan, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi program dan kegiatan kesehatan.

Hingga 2019, terdapat 29 rumah sakit, 21 rumah sakit bersalin, 51 poliklinik, 44 puskesmas di Makassar. ...⁴⁹ Sementara Angka Kematian Bayi di Makassar telah turun dari 10,9% (2010) menjadi 2,60% (2015), Tingkat Kematian Ibu telah meningkat dari 11,60% (2010) menjadi 20,33% (2015). ...⁵⁰ Indonesia telah menetapkan target spesifikasi untuk mencapai cakupan kesehatan universal pada tahun 2019. Namun, tingkat kematian ibu masih tinggi dan tetap menjadi masalah penting untuk ditangani.

IPM Makassar yang tinggi berarti polisi pembangunan sosial memiliki hasil yang menggembirakan. Elemen pertama yang mendukung peningkatan IPM adalah kualitas kesehatan penduduk (umur panjang dan sehat). Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Makassar terangkum dalam Tabel 13.

Tabel 13: Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Makassar, 2020.⁵¹

RUMAH SAKIT UMUM	29 UNIT
Rumah Sakit Bersalin	21 unit
Sen Kesehatanre	74 unit
Poliklinik	51 unit
Dokter	203 orang
Dokter gigi	67 orang
Perawat	379 orang
Bidan	209 orang

⁴⁸ Dinas Kesehatan Makassar, 2020

⁴⁹ Pemkot Makassar pada angka 2020 – Biro Pusat Statistik, Indonesia

<https://makassarkota.bps.go.id/publication/2020/04/27/bc3a47054c386bac66a38333/kota-makassar-dalam-angka-2020.html>.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Kantor BPS, 2020

Sistem kesehatan Indonesia memiliki campuran penyedia publik dan swasta, serta pembiayaan publik dan swasta. Kementerian Kesehatan mengelola beberapa rumah sakit tersier dan spesialis, penyediaan arah strategis, menetapkan standar, regulasi, dan memastikan ketersediaan keuangan dan sumber daya manusia. Pemerintah provinsi dan kabupaten mengelola sistem publik sejalan dengan pemerintah yang terdesentralisasi, mereka mengelola rumah sakit tingkat, memberikan pengawasan teknis dan pemantauan layanan kesehatan kabupaten, dan mengkoordinasikan masalah kesehatan lintas kabupaten di dalam provinsi.

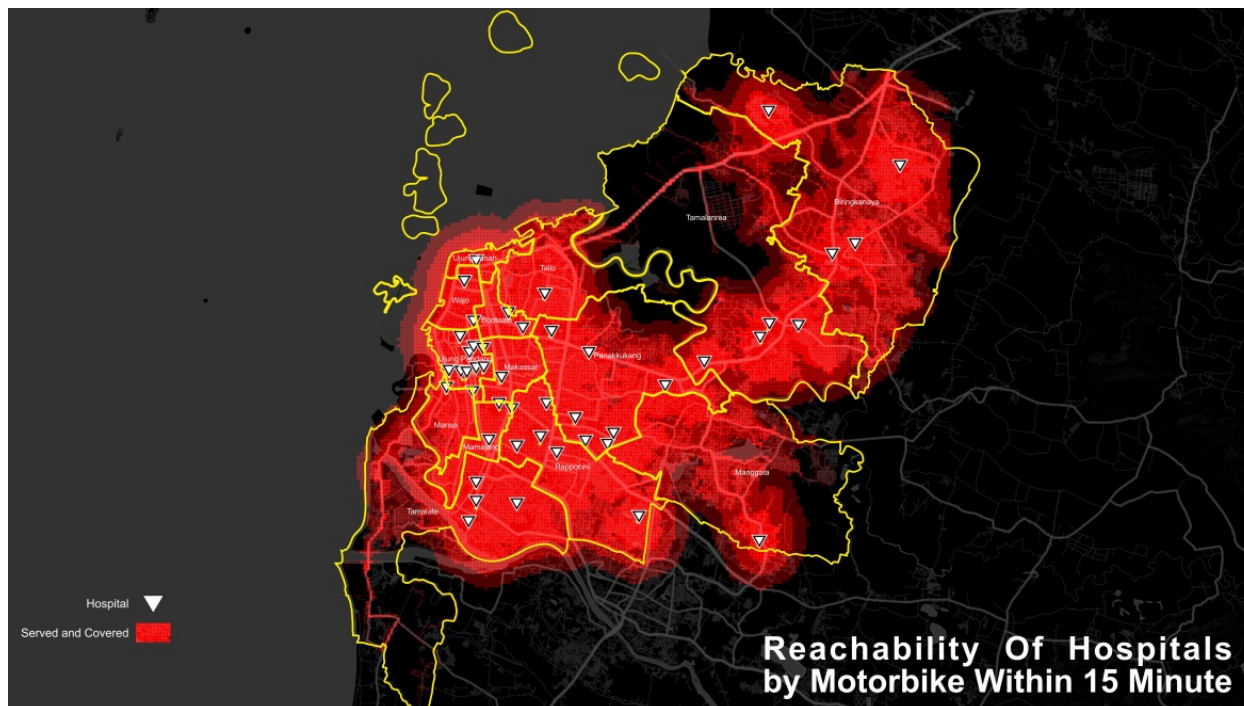
Rumah sakit kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat serta fasilitas terkait dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Ada berbagai penyedia swasta, termasuk jaringan rumah sakit dan klinik yang dikelola oleh organisasi nirlaba dan amal, penyedia nirlaba, dan dokter individu dan badan yang terlibat dalam praktik ganda (yaitu memiliki klinik swasta serta peran fasilitas umum).

Ada 46 unit Puskesmas di Kota Makassar. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Makassar memiliki layanan rawat inap, sedangkan 34 puskesmas lainnya memiliki layanan rawat inap. Pelayanan kesehatan dasar bagi warga Kota Makassar di Puskesmas dan jaringannya (pusat kesehatan sub-kesehatan dan pusat kesehatan keliling) dibebaskan dari biayapelayanan meliputi:

- Layanan rawat inap untuk persalinan dan pelayanan rawat inap umum
- Pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan
- Layanan laboratorium tertentu
- Tindakan medis dasar (tindakan medis umum dan perawatan gigi oral dasar)
- Layanan dasar kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana
- Akte
- Surat Sakit
- Sertifikat kematian

Untuk mengakses layanan gratis tersebut, warga Kota Makassar perlu menunjukkan KTP atau kartu keluarga dan kartu BPJS.

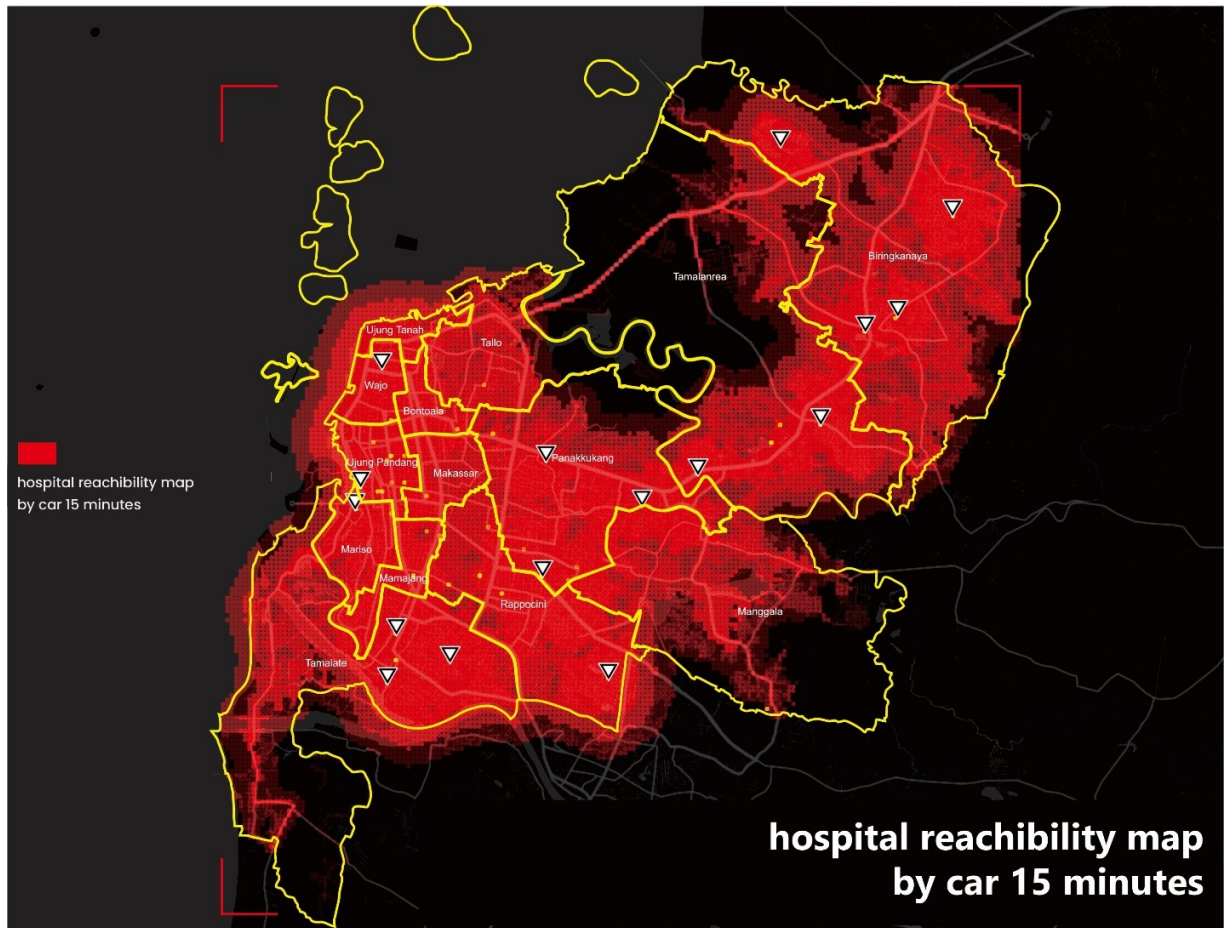
Gambar 27: Akses 15 menit ke rumah sakit dengan sepeda motor di Kota Makassar



Gambar 27 menunjukkan aksesibilitas fasilitas rumah sakit menggunakan sepeda motor dalam waktu 15 menit. Hal ini menunjukkan bahwa Mariso, Mamajang, Rappocini, Ujung Pandang, Makassar, Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah Kecamatan dapat mencapai rumah sakit terdekat mereka menggunakan sepeda motor dalam waktu 15 menit. Sementara itu, beberapa warga yang tinggal di Kecamatan Tamalate, Manggala, Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya tidak dapat mencapai rumah sakit terdekatnya dalam waktu 15 menit dengan sepeda motor.

Gambar 29 menunjukkan keterjangkauan rumah sakit dengan mobil dalam waktu 15 menit, dengan beberapa Kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi memiliki akses paling sedikit ke rumah sakit: Tamalanrea, Manggala, dan Tamalate. Ini juga merupakan wilayah kota yang diperkirakan memiliki populasi tertinggi per Kecamatan pada tahun 2014, menyoroti perlunya akses yang lebih baik ke kedua layanan kesehatan untuk populasi yang paling terpinggirkan.

Gambar 28 Keterjangkauan rumah sakit dengan mobil dalam waktu 15 menit



5.2 PASOKAN PANGAN

5.2.1 Situasi pengiriman layanan yang ada

Elemen ketiga dalam IPM adalah standar hidup yang layak, berkaitan dengan kondisi ekonomi penduduk, diukur menggunakan pengeluaran rata-rata per kapita. Menurut data terakhir, pola belanja warga Makassar sedang tren ke atas, ditandai dengan proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk kebutuhan non pangan sebesar 56,66%, dibandingkan dengan 43,34% untuk kebutuhan pangan (Tabel 14). Perbandingan ini biasa digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yaitu pengeluaran non pangan yang lebih tinggi dari pengeluaran pangan. Di antara orang miskin, pengeluaran untuk makanan jauh lebih tinggi dalam hal konsumsi keluarga, sekitar 70%. Dalam pengeluaran "Non-Pangan", persentase terbesar adalah untuk perumahan, berbagai barang dan jasa, komoditas tahan lama, dan kebutuhan sosial. Rata-rata pengeluaran Rp 1.513.095 per kapita per bulan berada di atas garis kemiskinan di Makassar sebesar Rp 418.831 per kapita per bulan.

Tabel 14: Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Bulanan Warga Makassar, 2020.⁵²

JENIS PENGELUARAN	RATA-RATA PENGELUARAN BULANAN PER KAPITA	PERSENTASE TOTAL
A. Makanan	Rp 655.712	(43.34 %)
B. Non-Makanan	Rp 857,383	(56.66 %)
Total	Rp. 1.513.095	(100.00%)

5.3 PENDIDIKAN UMUM

5.3.1 Situasi pengiriman layanan yang ada

Dinas Pendidikan Kota Makassar mengkoordinasikan pengelolaan sekolah di sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian sekolah yang dibangun oleh lembaga masyarakat berupa sekolah swasta. Beberapa fungsi utama kantor Pendidikan Kota adalah:⁵³

- Perumusan dan implementasi kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Mengembangkan, mengelola, memantau, dan mengawasi program dan kegiatan pendidikan.

IPM mencakup akses pengetahuan, dengan pendidikan menjadi indikator utama daripadanya. Partisipasi sekolah di Makassar telah meningkat selama bertahun-tahun, dengan tingkat partisipasi bersih dan kotor yang dirangkum dalam Tabel 15.⁵⁴ mendekati 100%, tetapi ini turun di tingkat sekolah menengah.

⁵² Kantor BPS Makassar 2020

⁵³ Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2020

⁵⁴ Tingkat partisipasi kotor mengacu pada jumlah siswa yang berpartisipasi dalam tingkat pendidikan tertentu, terlepas dari usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia sekolah resmi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang sama (dibandingkan dengan net yang mengacu pada rasio anak-anak yang berpartisipasi dalam rentang usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan yang diberikan).

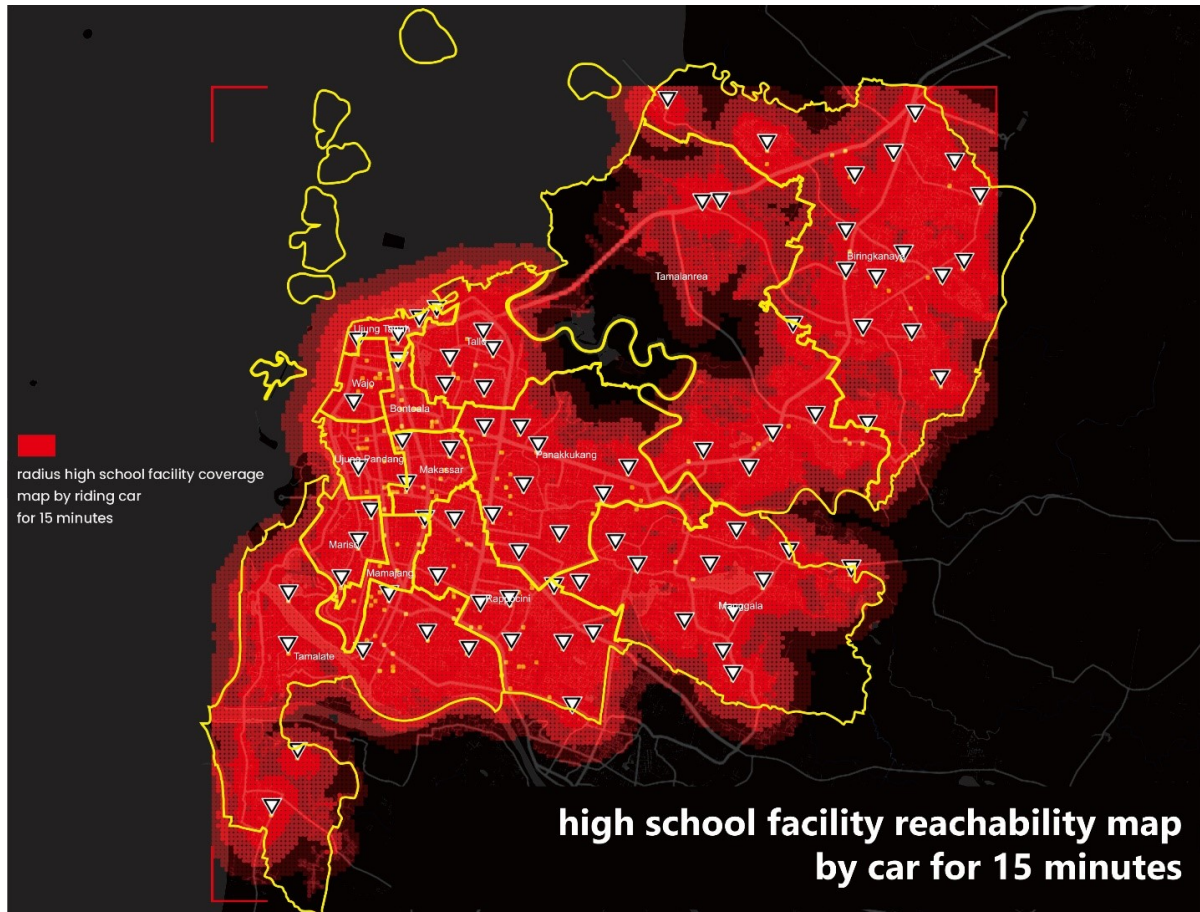
Tabel 15: Tingkat Partisipasi Bersih dan Kotor berdasarkan Tingkat Pendidikan di Makassar Municipality, 2018 dan 2019

TINGKAT PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI BERSIH		TINGKAT PARTISIPASI KOTOR	
Sd	95,19	95,42	98,92	103,67
Smp	77,71	79,29	92,25	91,93
SMA	60,65	59,41	71,91	90,11

Ada kausalitas dua arah antara kemiskinan dan akses terbatas ke pendidikan - dengan pendidikan meningkatkan sumber daya manusia dan dengan demikian peluang ekonomi dan daya saing. Dalam hal pendidikan, anak-anak dari kelompok miskin dan terpinggirkan mengalami tantangan dalam melanjutkan pendidikan di luar sekolah dasar karena kendala keterjangkauan dan aksesibilitas. Anak-anak dari rumah tangga miskin cenderung hanya mengikuti pendidikan hingga sekolah dasar, dengan keharusan untuk bekerja karena kemiskinan yang melarang kemampuan untuk mengejar pendidikan lebih lanjut.

Karena rendahnya tingkat pendidikan, peluang kerja lokal yang tersedia adalah di sektor informal, seperti buruh tani, pekerjaan konstruksi, mengemudi taksi, dan di industri perikanan. Pendapatan di sektor-sektor ini cenderung rendah dan terkait dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Oleh karena itu siklus pencapaian pendidikan yang rendah dan terlibat dalam pekerjaan (sering informal) dengan upah rendah berlanjut dari generasi ke generasi.

Gambar 29 Keterjangkauan SMA dengan mobil dalam waktu 15 menit



5.3.2 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan generasi penerus dan menentukan kualitas hidup dan prospek ekonomi bagi warga Kota Makassar. Permintaan pendidikan tersebut dapat diturunkan melalui penyediaan sarana pendidikan sesuai dengan jumlah masyarakat, mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA sehingga penyediaan pendidikan dapat merata kepada semua golongan dan setiap kesenjangan pasokan sarana pendidikan dapat diidentifikasi untuk setiap Kecamatan.

Tabel 16: Proyeksi permintaan fasilitas pendidikan untuk kota Makassar 2021-2040 ⁵⁵

TAHUN PROYEKSI	POPULASI	FASILITAS PENDIDIKAN TUNTUT KOTA MAKASSAR			
		Tk	Sd	Smp	SMA
2021	61482	-612	-436	-53	-184
2025	63285	-76	-122	-16	-16
2030	65539	-76	-60	-15	-21
2035	67793	-80	-48	-20	-20
2040	70047	-78	-64	-22	-21
Total		-846	-670	-111	-242

Dari hasil analisis kebutuhan sarana pendidikan di Kota Makassar tahun 2021-2040, ditemukan bahwa seluruh fasilitas harus menambah jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) sebesar 846 unit, fasilitas SD 670 unit, fasilitas SMP 111 unit dan fasilitas SMA 242 unit.

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Makassar (2020) dan analisis proyeksi

5.4 PERUSAHAAN DAN MATA PENCAHARIAN

PDB Makassar disumbang oleh enam sektor utama, yaitu sektor perdagangan grosir dan eceran 21%, industri pengolahan (manufaktur) 18,5%, konstruksi 18,2%, informasi dan komunikasi 9,3%, jasa pendidikan 9,1%, dan jasa keuangan 6,5%.⁵⁶

Makassar masih memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang rendah (terutama di kalangan wanita) dan tingkat pengangguran yang tinggi, penyebabnya termasuk kurangnya industri padat karya dan ketersediaan yang buruk dari berbagai program pelatihan keterampilan.

Seperti di banyak kota di ASEAN, pasar informal dan PKL dianggap sebagai "tulang punggung perekonomian", dan Makassar tidak berbeda. PKL menyumbang angkatan labour terbesar di Makassar. Mereka juga berkontribusi besar terhadap pendapatan lokal Makassar, yang dianggap sekitar 35% pada tahun 2016. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi bertanggung jawab terhadap vendor melalui pemberian penyuluhan tentang keindahan kota, kebersihan dan ketertiban lalu lintas. Departemen Koperasi bersama dengan Departemen Perdagangan mencatat untuk memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan bagaimana mendapatkan akses ke bank kepada vendor. Kegiatan juga telah mencakup penjangkauan pada lisensi perdagangan dan kewajiban vendor. Tantangan utama seputar PKL di Makassar termasuk kurangnya ruang khusus untuk kegiatan ini terjadi dengan aman, dampak vendor terhadap lalu lintas (mengakibatkan kemacetan), keamanan bagi vendor dalam kegiatan perdagangan mereka (baik keamanan pribadi - terutama untuk wanita, dan keamanan masa jabatan / akses di ruang pasar), dan kebutuhan akan dukungan Kota yang berkelanjutan dan upscaling sehubungan dengan manajemen keuangan dan layanan perbankan.⁵⁷ Tema utama, oleh karena itu dalam mengembangkan Makassar sebagai smart city adalah dalam mendukung baik Pemerintah CiTY maupun vendor mengembangkan sektor ini untuk lebih memenuhi kebutuhan kota yang sedang berkembang.

Untuk mempertahankan basis ekonomi yang beragam, dukungan harus disediakan untuk ekonomi formal dan informal. Keterampilan, terutama penduduk kumuh, sering tidak memenuhi persyaratan atau tuntutan sektor ketenagakerjaan formal. Pelaksanaan Balai Latihan Keterampilan Kerja di sektor-sektor yang teridentifikasi untuk pertumbuhan/pengembangan, khususnya bagi pekerja muda dari keluarga miskin dan kelompok marjinal lainnya merupakan strategi penanggulangan kemiskinan yang penting bagi kota. Ini juga harus mencakup program untuk anak asuh yang mengejar pendidikan di luar fase dasar dan dasar.

⁵⁶ <https://makassar.tribunnews.com/2020/11/16/arrah-perekonomi-makassar-dalam-pusaran-pilwali-2020>

⁵⁷ Bebasa, R. et al. 2016. Mekanisme dalam Perumusan Kebijakan Manajemen di Sektor Informal di Makassar Mediterania Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 7. (3).

5.5 PERLINDUNGAN SOSIAL

5.5.1 Kemiskinan di Makassar

Ada banyak cara berbeda untuk mengukur kemiskinan. Untuk kebijakan pembangunan kota Makassar, beberapa indikator kemiskinan di Indonesia biasanya digunakan. Hal ini dikarenakan banyak kementerian atau kantor pemerintah pusat yang memiliki isu kemiskinan sendiri atau program pemberdayaan masyarakat, yang membutuhkan indikator tertentu. Pada tingkat Nasional, statistik kemiskinan resmi diterbitkan oleh Pusat Statistik (BPS), berdasarkan Standar Garis Kemiskinan: Mengukur pengeluaran per kapita bulanan untuk sejumlah kebutuhan sehari-hari masyarakat pangan dan non pangan.

Kementerian Sosial, mengukur kemiskinan rumah tangga berdasarkan kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka untuk bertahan hidup. Daftar rumah tangga miskin umumnya diverifikasi dan dipasok oleh tingkat lembaga pemerintah terendah. Kantor BKKBN mengukur standar kehidupan keluarga berdasarkan ekonomi yang memadai untuk kehidupan sehari-hari dan adaptivitas inklusi sosial. Langkah tersebut mengklasifikasikan keluarga ke dalam tiga kategori: Pra kesejahteraan, Kesejahteraan I, dan Kesejahteraan II. Pra dan Kesejahteraan I tergolong keluarga miskin dan menjadi sasaran utama program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Kementerian PUPR mengukur kemiskinan berbasis masyarakat, dengan menggunakan rasio yang tepat dari kebutuhan masyarakat atau rumah tangga untuk infrastruktur dan utilitas. Mengukur ciri-ciri umum kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini setiap tahun diukur oleh BPS dan Bappenas di tingkat kabupaten/kota (dan yang telah dirujuk secara luas sepanjang Laporan ini).

Tabel 17 merangkum jumlah penduduk miskin di Makassar dan persentase penduduk antara 2015 dan 2019 (Statistik Pemkot Makassar berdasarkan Standar Garis Kemiskinan BPS). Sesuai data tersebut, total penduduk miskin di Makassar sebanyak 65,120 jiwa pada 2019.

Tabel 17: Jumlah Penduduk Miskin di Makassar tahun 2015 – 2019.⁵⁸

TAHUN	NOMOR	% POPULASI
2015	63.241	4.38
2016	66.780	4.56
2017	68.187	4.59
2018	66.222	4.41
2019 ⁵⁹	65.120	4.28

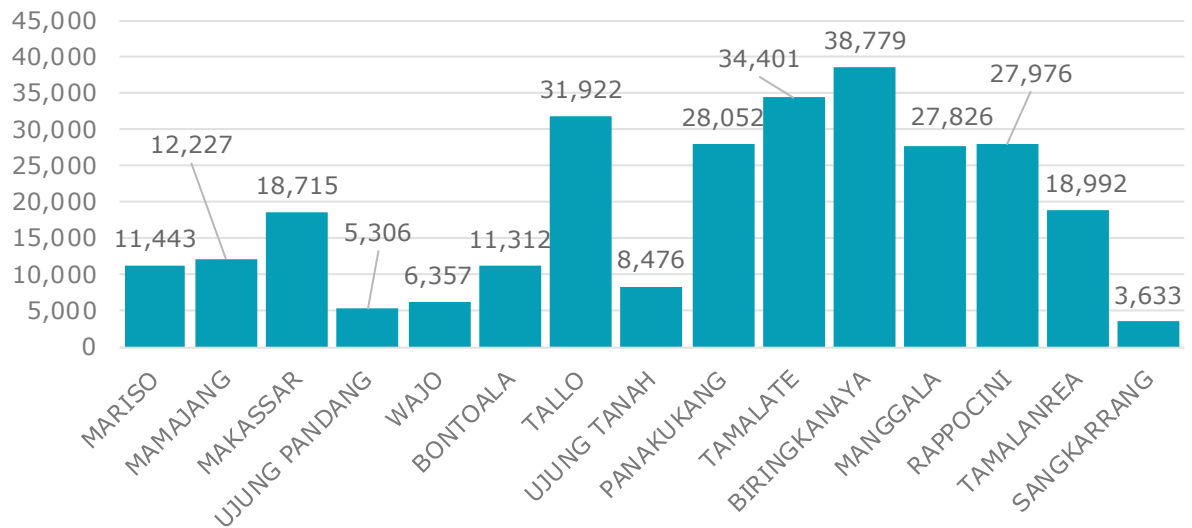
Namun, Dinas Sosial Kota Makassar mengkategorikan rumah tangga miskin berdasarkan kelayakan rumah tangga terhadap skema bantuan pemerintah (misalnya bantuan langsung tunai, Bantuan Iuran BPJS). Pada 2020, Dinas Sosial Kota Makassar melaporkan 82.331 rumah tangga. Berdasarkan rata-rata jumlah 4 anggota per rumah tangga, jumlah penduduk miskin akan menjadi 329.324. Karena dua metode yang berbeda dalam mengukur kemiskinan, jumlah penduduk miskin mutlak sesuai Dinas Sosial Kota Makassar lima kali lebih tinggi dari yang dilakukan Pemkot Makassar.

⁵⁸ Pemkot Makassar dalam Angka, 2020

⁵⁹ [Sulawesi Selatan Berbagi penduduk miskin, 1970-2020 - knoema.com](https://www.knoema.com/Sulawesi-Selatan-Berbagi-penduduk-miskin-1970-2020)

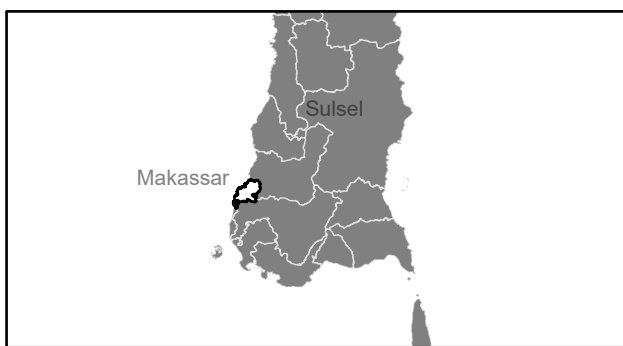
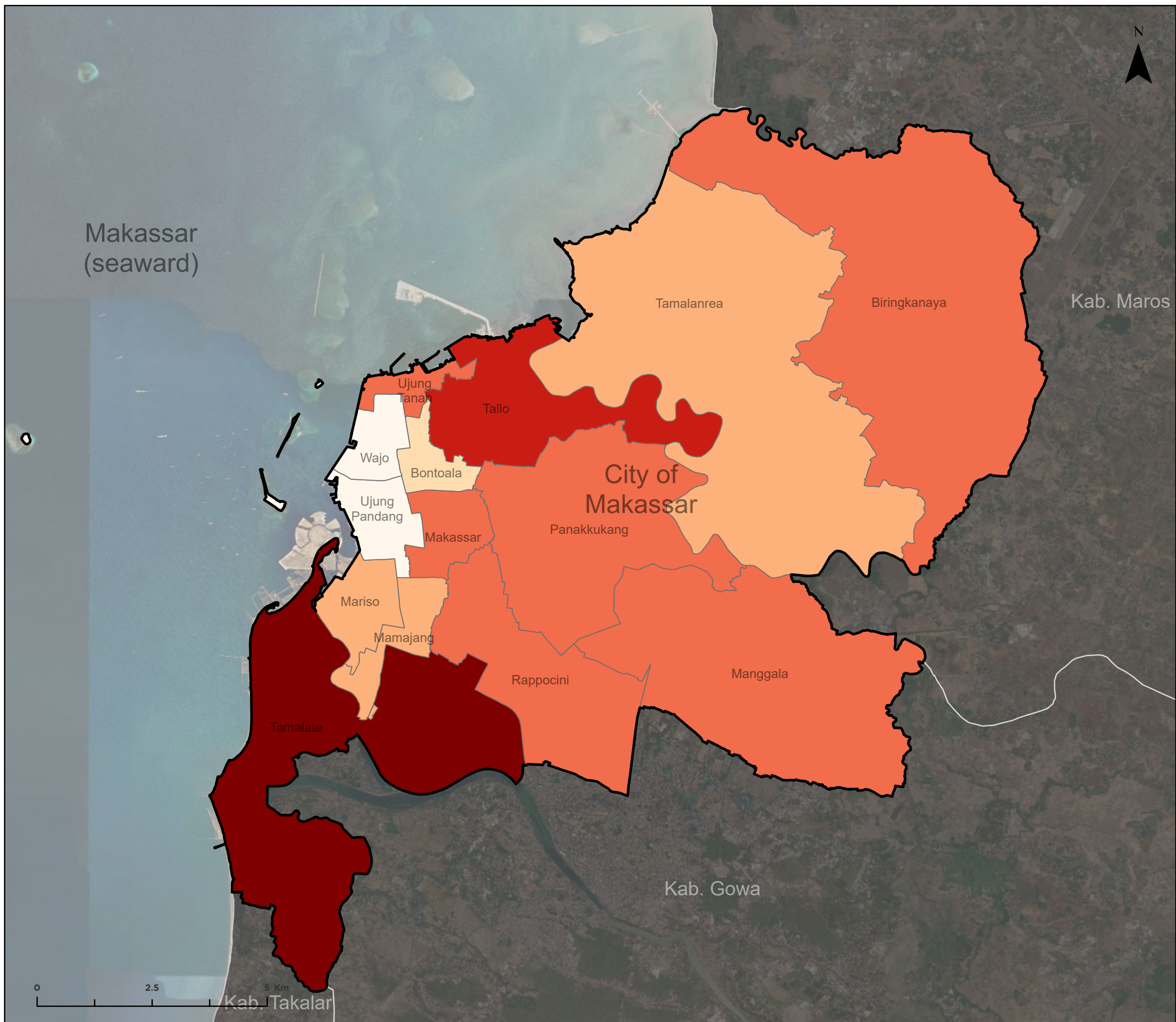
Rumah tangga miskin terletak di semua Kecamatan di Makassar (Gambar 31). Ada 6 Kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin tertinggi: Biringkanaya, Tamalate, Tallo, Panakkukang, Rappocini dan Manggala.

Gambar 30: Jumlah rumah tangga miskin di Kota Makassar berdasarkan Kecamatan⁶⁰



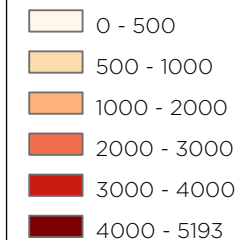
Gambar 32 memetakan jumlah rumah tangga miskin untuk setiap Kecamatan di Makassar untuk tahun 2019.

⁶⁰ PK, 2019



Key

Number of poor households (2019)



Date: 17/12/2020
 By: JC
 Report: Makassar Urban Situation Assessment

Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
 Projection System:

Figure 31 Number of poor households (2019)

5.5.2 Situasi pengiriman layanan yang ada

Program bantuan sosial diinisiasi untuk pendidikan (proyek bantuan sekolah), ketahanan penghasilan bagi keluarga dengan anak (transfer tunai bersyarat, program beasiswa) dan penyediaan pangan (Raskin, program pengiriman beras subsidised). Memperluas program ini untuk mencakup semua kelompok rentan adalah tantangan⁶¹.

Dinas Sosial Kota Makassar membantu Wali Kota dalam memenuhi tujuan rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan pengamanan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Sosial bermitra dengan beberapa asosiasi organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, yang bekerja dengan perawatan lansia, anak-anak terlantar, keluarga yang rentan secara ekonomi, dll. Beberapa peran dinas Sosial Kota Makassar antara lain memberikan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, menyediakan layanan sosial bagi lansia yang mengungsi dan membina perempuan dalam situasi rawan sosial ekonomi.

Memperluas kemampuan dan kapasitas untuk mengimplementasikan program bantuan sosial dan proses Musrenbang, serta meningkatkan akses ke program-program ini untuk mencakup semua kelompok rentan harus menjadi prioritas utama untuk maju. Ini termasuk merampingkan proses persetujuan sehingga program sosial dapat diimplementasikan secara efisien kepada mereka yang membutuhkan.

⁶¹ Kaasch, Alexandra; Sumarto, Mulyadi; Wilmsen, Brooke Working Paper Pengembangan kebijakan sosial Indonesia dalam konteks tata kelola sosial global. Kertas Kerja UNRISD, No. 2018-6

6. MODAL ALAM: DARAT, AIR, DAN UDARA

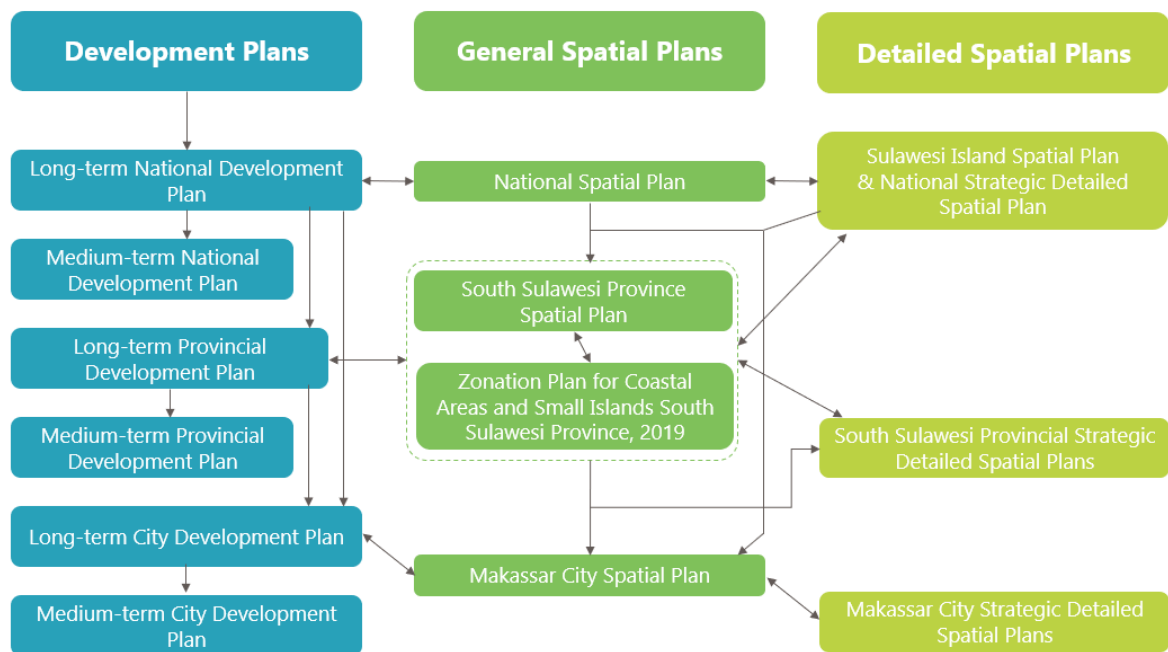


6.1 PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN

6.1.1 Kerangka kebijakan

Perencanaan di dalam Kota Makassar diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara teori, hal ini memungkinkan sistem perencanaan pembangunan terintegrasi dengan sistem penataan ruang wilayah, baik di tingkat nasional maupun provinsi maupun daerah dan/atau kota. Gambar 33 menunjukkan hierarki perencanaan untuk Kota Makassar.

Gambar 32: Hierarki Rencana Kota Makassar.⁶²



Dalam praktiknya, koordinasi dan implementasi rencana ini seringkali lambat, terfragmentasi dan kompleks. Pengembangan dilakukan oleh sektor swasta dalam pendekatan yang didorong pasar, sering mengabaikan dampak dan persyaratan sosial dan lingkungan.

Investasi infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan rencana pembangunan untuk Kota Makassar tidak terintegrasi dalam satu kerangka kerja dengan tujuan dan program yang sama. Perlu adanya koordinasi infrastruktur antara sektor dan instansi pemerintah untuk memanfaatkan

⁶² Diadaptasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Ruang Provinsi, Daerah dan Kota & Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja

investasi untuk mendapatkan berbagai manfaat, mengoptimalkan efisiensi biaya (long-term savings) dan meminimalkan gangguan selama konstruksi

Kota ini telah merinci rencana ekspansi dan pengembangan untuk layanan publik, pembangunan perkotaan dan pengiriman infrastruktur. Namun, rencana-rencana ini semakin tidak cocok karena pertumbuhan populasi yang tinggi, dampak perubahan iklim dan ketersediaan solusi teknologi terbaru. Dengan demikian, Makassar akan mendapat manfaat dari kerangka kerja terpadu di seluruh kota yang memberikan dasar untuk memprioritaskan berbagai intervensi. Kerangka kerja dan program perkotaan holistik akan memanfaatkan investasi dan program lintas sektoral, untuk menanggapi tantangan pertumbuhan perkotaan, sementara pada saat yang sama menciptakan peluang untuk mengintegrasikan solusi teknologi dan mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.

Ketika populasi kota tumbuh selama 20 tahun ke depan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan bergantung pada kemampuan untuk menyediakan peluang kerja formal yang terhubung dengan baik ke perumahan yang aman dan sehat - apakah perumahan itu berada di dalam kota atau di daerah sekitarnya. Kawasan kumuh di seluruh Makassar menghadirkan berbagai tantangan kesehatan, sosial dan lingkungan karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan penduduk.

Perencanaan penggunaan lahan memiliki peran penting dalam mengatasi meningkatnya permintaan akan hunian yang terjangkau, tetapi juga penyediaan tempat kerja yang aman dan sehat serta lingkungan jalanan.

PKL dapat menghasilkan konflik bagi pengguna jalan setapak dan pengguna jalan (antara pedagang kaki lima dan pejalan kaki, pesepeda, pengendara kendaraan bermotor dan sepeda motor serta pengguna angkutan umum). Perencanaan untuk Kota Layak Huni harus mengatasi peran jalan setapak dan ruang publik dalam mendukung PKL serta keselamatan pengguna jalan dan jalan setapak lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang dialami di Makassar belakangan ini telah berkontribusi pada pengembangan kawasan kumuh dan pertumbuhan ekonomi informal. Pada periode antara Agustus 2019 dan Agustus 2020, jumlah pekerja informal di provinsi Sulawesi Selatan meningkat 3,68% menjadi hampir 2,6 juta jiwa (64% dari populasi). Kemungkinan peningkatan ini mungkin sebagian karena dampak COVID-19, menyebabkan pengurangan kesempatan kerja formal. Meskipun demikian, peningkatan pekerja informal perlu dipertimbangkan dalam rencana pembangunan di masa depan. (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020)

Tantangan besar bagi pembangunan perkotaan di Makassar adalah mengatasi kompleksitas urbanisasi, terutama ketimpangan pendapatan antara kota dan wilayah dan pertumbuhan permukiman informal dan daerah kumuh yang sedang berlangsung.

Karena jumlah orang yang bolak-balik dari daerah sekitarnya atau pinggiran perumahan Makassar meningkat dari waktu ke waktu, begitu juga dengan kemacetan jalan dan polusi udara yang sesuai dari penggunaan kendaraan bermotor. Menyelaraskan pertumbuhan perumahan baru dengan penyediaan infrastruktur transportasi umum baru, fokus baru pada Transit-Oriented Development (TOD) dan mengeksplorasi peluang untuk menemukan perumahan baru yang dekat dengan peluang kerja baru adalah beberapa mekanisme yang mungkin untuk mengatasi tantangan ini.

6.1.2 Ning Rencana Spasial

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan dasar bagi undang-undang dasar dan arahan terkait kegiatan penataan ruang, prinsip penataan ruang, kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan penataan ruang, produk spasial dan hierarki, serta keterbatasan, skala dan ruang lingkup penataan ruang di perkotaan.

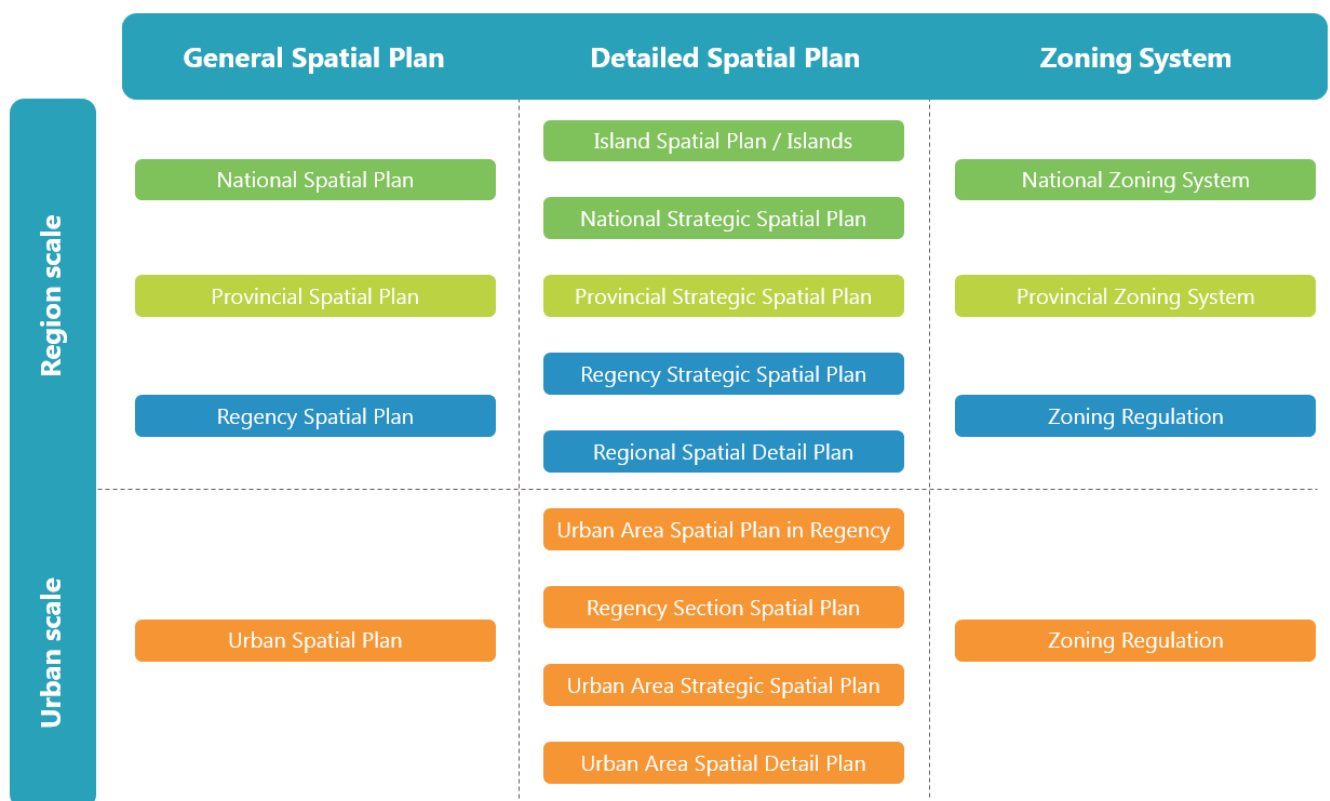
Penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang umum dan rencana tata ruang yang detail. Rencana tata ruang umum terdiri dari:

- Rencana Tata Ruang Nasional;
- Rencana Tata Ruang Provinsi; Dan
- Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Tata Ruang Strategis Kawasan Perkotaan dan Daerah/Perkotaan

Sementara rencana spasial terperinci terdiri dari:

- Rencana tata ruang/pulau kepulauan dan rencana tata ruang strategis nasional;
- Rencana detail spasial regional / perkotaan.

Gambar 33: Hubungan Rencana Tata Ruang Umum dan Rencana Tata Ruang Terperinci



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota nomor 04 tahun 2015, Rencana Tata Ruang Kota (MCSP) Kota Makassar 2015-2035 akan resmi digunakan untuk mengarahkan dan mengawal pembangunan perkotaan. Namun, untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan dinamika aspirasi pembangunan dan perubahan kebijakan, rencana dan program pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Makassar sendiri dan kegiatan usaha, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, MCSP perlu ditinjau setidaknya setiap lima tahun setelah dibuat. Faktor-

faktor berikut telah menyebabkan perlunya peninjauan yang komprehensif dari Rencana Tata Ruang Kota Makassar:

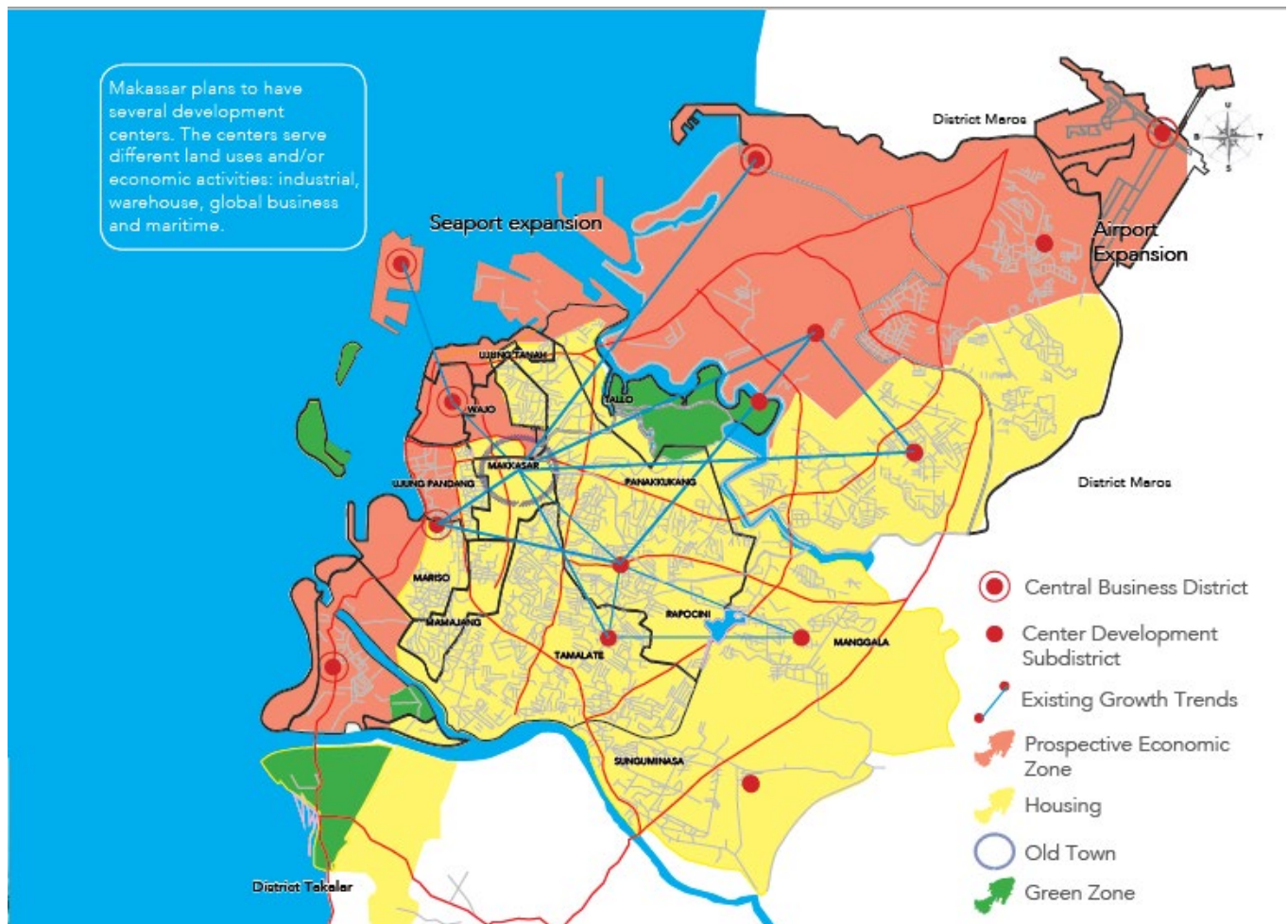
- **Faktor Eksternal:**

- Ada perubahan dan/atau perbaikan regulasi dan/atau rujukan sistem tata ruang.
- Ada perubahan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan/atau kota yang memanfaatkan ruang dalam skala besar.
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan mengubah peradaban warga perkotaan yang mengubah kebutuhan dan pemanfaatan ruang daerah.

- **Faktor internal:**

- Kurang tepatnya antisipasi dan adaptasi Rencana Tata Ruang Kota (CSP) terhadap dinamika pembangunan sehingga kurang efektif sebagai instrumen memberikan peluang, mengarahkan dan mengendalikan izin lokasi pembangunan, sehingga tidak dapat mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi, sosial budaya lokal, nasional dan global.
- Kurangnya kualitas CSP dapat disebabkan oleh ketepatan fakta dan ketajaman analisis yang antisipatif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemanfaatan ruang wilayah kota, karena kurang inovatif dalam mengikuti pengembangan Kriteria Prosedur Norma Standar dalam kaitannya dengan tata ruang kota.
- Keterbatasan sumber daya manusia, instrumen (penggunaan IT) dan biaya dalam sistem mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang berbasis CSP.

Gambar 34: Profil pengembangan Makassar⁶³



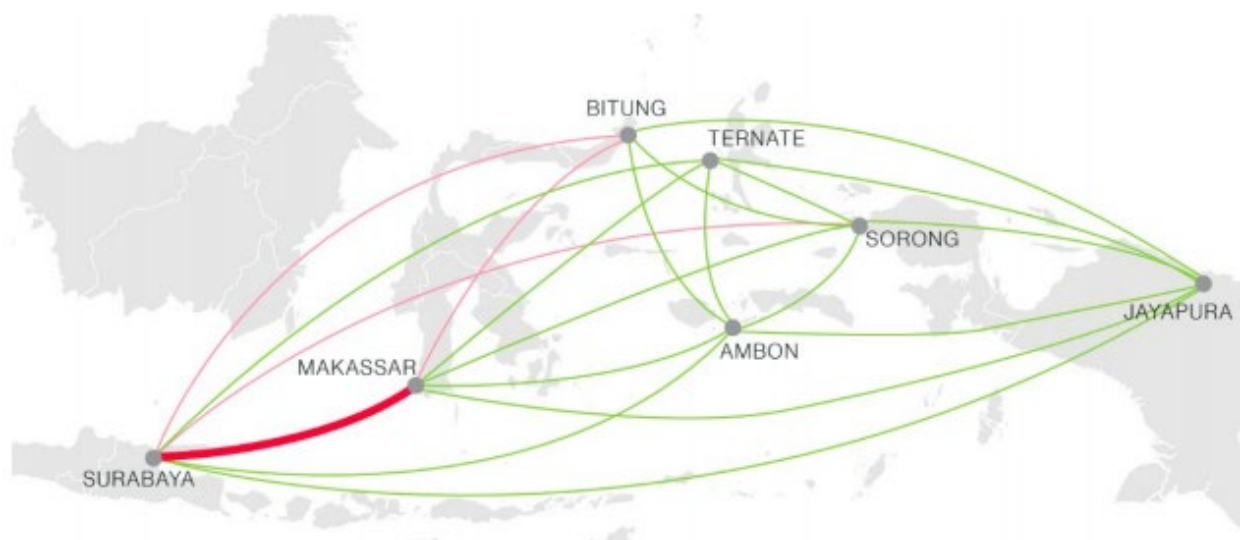
⁶³ Gunawan dkk., 2015

6.1.3 Memanfaatkan peluang dari perkembangan perkotaan utama saat Makassar muncul dari COVID-19

Pemerintah Indonesia berinvestasi dalam infrastruktur dan pembangunan yang signifikan di Makassar termasuk Pelabuhan Makassar yang baru, jalur kereta api baru yang menghubungkan kota pelabuhan Makassar dan Parepare yang pada akhirnya akan membentuk bagian dari jalur kereta api trans-Sulawesi antara ujung utara dan selatan Sulawesi, dan perkembangan besar lainnya termasuk reklamasi lahan dan kawasan pariwisata. Bandara Hasanuddin juga akan mendapat manfaat dari jarak yang dekat dengan jalur KERETA Makassar-Parepare dan akan menjalani rencana pengembangan empat tahap hingga 2044 untuk memperluas kapasitasnya menjadi 40 juta penumpang tahunan.

Setelah dibuka, Pelabuhan Makassar yang baru akan menjadi terminal kontainer besar untuk Makassar dan berfungsi sebagai hub konektivitas utama untuk distribusi barang ke Indonesia Timur, memanfaatkan peluang ekspor dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sulawesi Selatan memiliki pasar ekspor yang kuat dalam biji-bijian berminyak, tanaman medis, garam, belerang, kapur, ikan dan udang. Kota Makassar dapat memanfaatkan investasi ini di Pelabuhan baru melalui perbaikan strategi ekspor termasuk strategi untuk menjaga stabilitas harga, peningkatan efisiensi dan keandalan jaringan logistik dan distribusi, memanfaatkan teknologi smart city untuk meningkatkan efisiensi operasi pelabuhan dan distribusi dan perencanaan kawasan lahan industri untuk bisnis yang berusaha mendapatkan keuntungan dari jarak dekat dengan Pelabuhan baru, jalur kereta api dan bandara internasional yang diperluas. (The Australia-Indonesia Centre, 2020)

Gambar 35: Hub konektivitas utama untuk distribusi barang ke Indonesia Timur⁶⁴



⁶⁴ Pusat Australia-Indonesia, 2020

6.2 PENGELOLAAN AIR DAN SUMBER DAYA ALAM

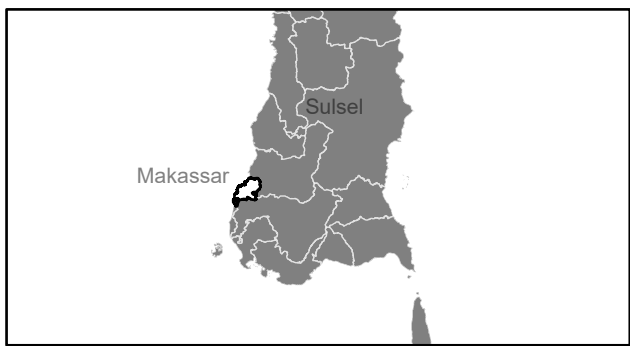
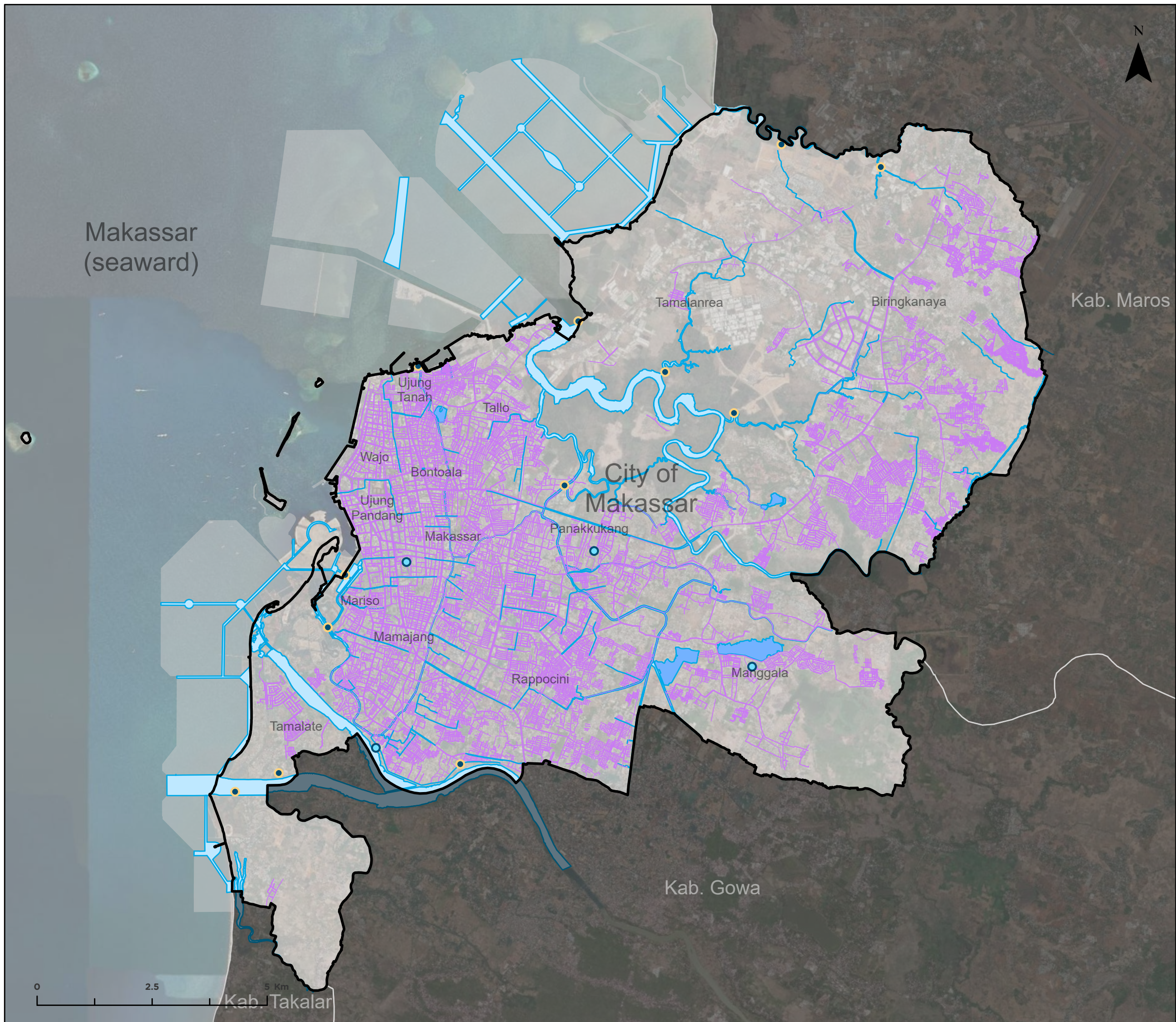
6.2.1 Kerangka kelembagaan

Di Indonesia, lingkungan yang layak dan sehat dianggap sebagai hak asasi manusia dasar dan hak yang dilindungi secara konstitusional dari setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan terkait harus menjaga dan mengelola lingkungan dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan dan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk mendukung gaya hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Kewenangan utama yang bertanggung jawab atas kebijakan dan penegakan lingkungan hidup adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MOEF). UU tersebut memberikan otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) dan dinas lingkungan hidup setempat.

Undang-Undang Lingkungan hidup mengadopsi prinsip "polusi membayar", di mana setiap individu atau perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab atas tindakan yang relevan yang dilakukan. Oleh karena itu, secara umum, setiap orang yang bertanggung jawab atas bisnis atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan, harus membayar kompensasi atau mengambil tindakan perbaikan tertentu (seperti memasang atau meningkatkan unit pengolahan limbah, memulihkan fungsi lingkungan asli atau menghilangkan penyebab pencemaran atau kerusakan lingkungan).

Gambar 37 peta infrastruktur biru di Makassar, termasuk pabrik pengolahan air, pabrik pengolahan air limbah, infrastruktur drainase, jaringan pipa, sungai dan danau.



- Key**
- Instalasi pengolahan air (Water treatment plant)
 - Pabrik pengolahan air limbah (Waste water treatment plant)
 - Drainase (Drainage)
 - Jaringan pipa (Pipe network)
 - Sungai (River)
 - Danau (Lake)

Date: 17/12/2020
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment
Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection System:

Figure 36 Blue Infrastructure

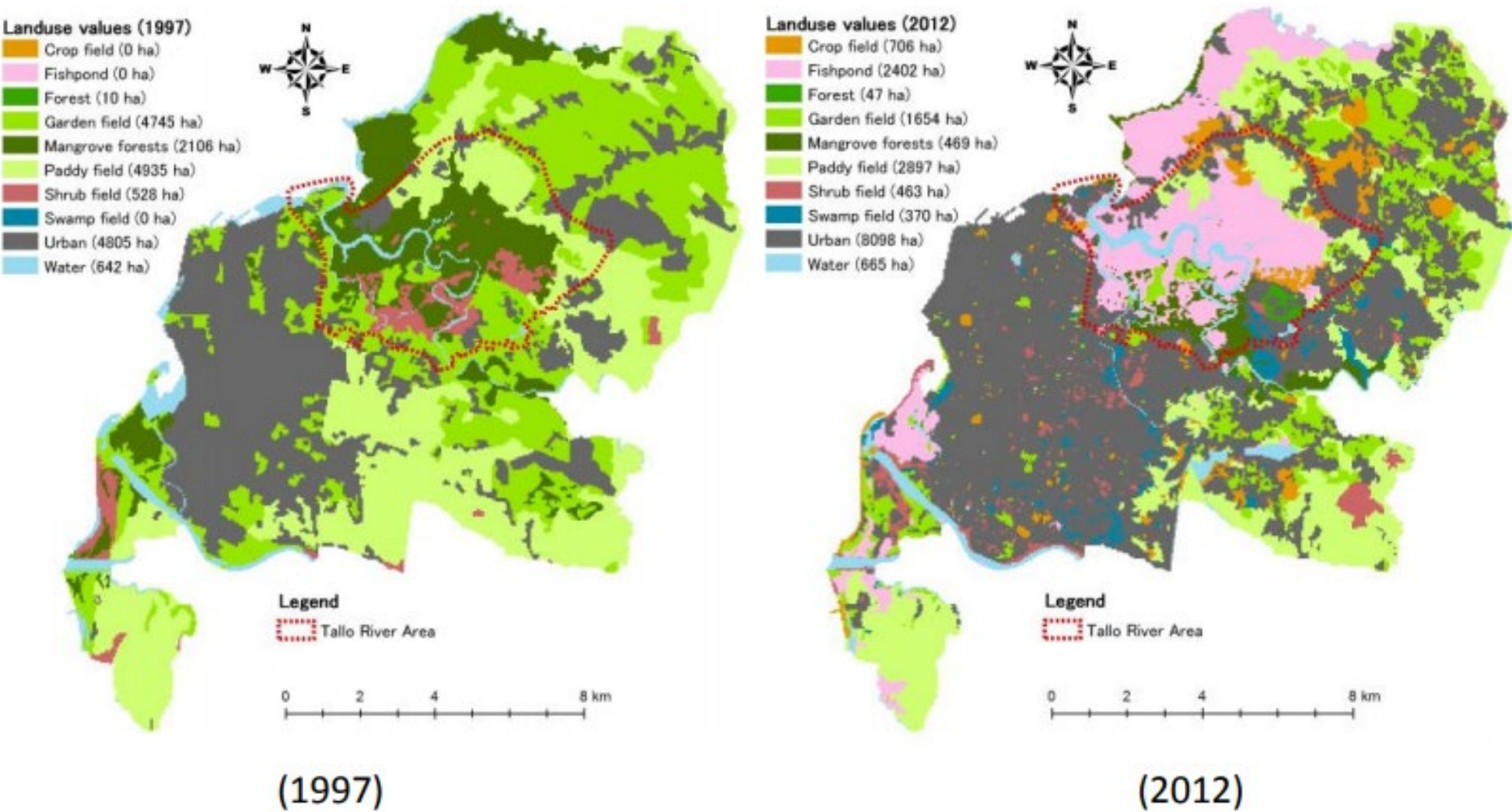
6.2.2 Tekanan saat ini

Makassar menghadapi isu lingkungan, seperti perubahan cepat penggunaan lahan (termasuk reklamasi lahan) dan perubahan iklim. Pada tahun 2011, Kota Makassar menerima Sertifikat Pengakuan Clean Air for Big Cities ASEAN di program Penghargaan Environmentally Sustainable Cities (ESC) ASEAN. Penghargaan ini diberikan kepada kota-kota ASEAN yang tetap bersih, hijau, dan layak huni terlepas dari pertumbuhannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri.

Namun demikian, karena meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk, indikator lingkungan untuk tren Makassar menurun. Suhu meningkat dan curah hujan meningkat, karena intensitas curah hujan telah meningkat, dengan musim hujan lebih pendek daripada di masa lalu. Kualitas air dan udara juga sedang terdegradasi sebagai akibat dari perkembangan yang tidak berkelanjutan dan pertumbuhan populasi.

Kota pesisir Makassar telah mengalami urbanisasi yang cepat dan telah berubah menjadi kota metropolitan dalam 15 tahun terakhir (Gambar 38). Urbanisasi terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kota menuju pinggiran kota dan/atau kegiatan reklamasi lahan (misalnya Centre Point Indonesia).

Gambar 37: Pengembangan pemanfaatan lahan di wilayah Makassar⁶⁵



⁶⁵ Indrayani et.al., 2015

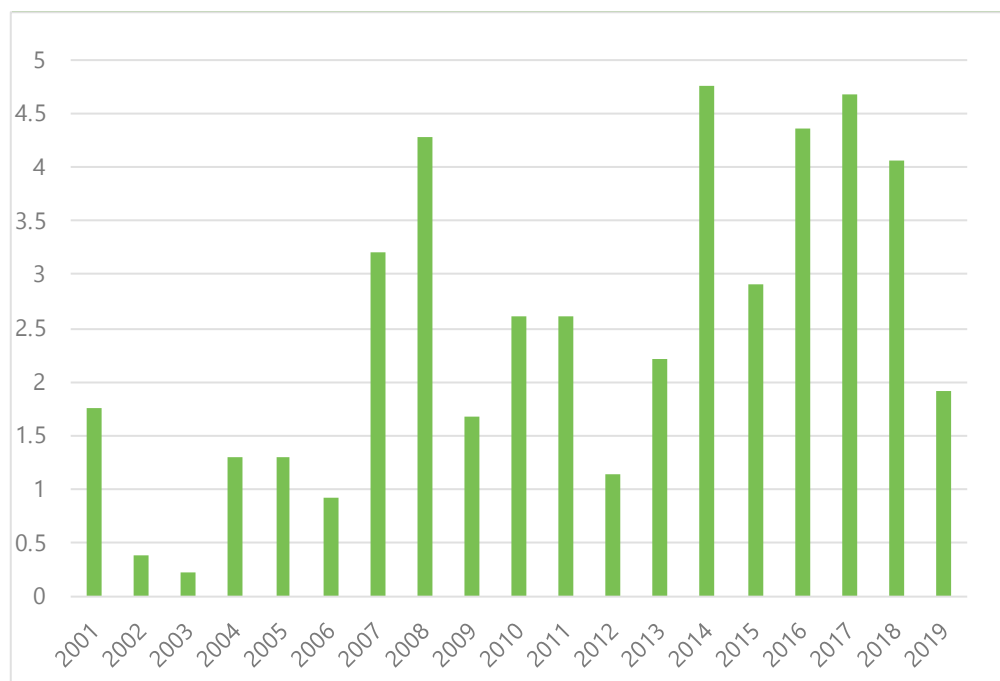
Makassar saat ini dan tekanan masa depan dalam kaitannya dengan lingkungan adalah:

- Berlanjutnya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan sebagai akibat dari perluasan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim.
- Perubahan penggunaan lahan, Makassar membangun tren kawasan untuk meningkatkan sementara ruang terbuka dan tren ekosistem alam berkurang. Antara tahun 1990 dan 2000, sebanyak 24% dari total lahan pertanian dan 16% dari luas lahan budidaya padi diubah menjadi kegunaan lain, yaitu, perumahan dan komersial (Djalante et al., 2017). Urbanisasi yang cepat, yang tidak cocok dengan mengendalikan penggunaan ruang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, memiliki kontribusi positif terhadap penurunan kualitas lingkungan (misalnya polusi udara) (Al Jarah, dkk, 2019).

Karena lokasinya, Makassar rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti topan atau banjir, yang telah mendorong pihak berwenang untuk mempromosikan strategi adaptasi perubahan iklim. Sekitar 57% dari produk domestik bruto (PDB) kota ini berasal dari manufaktur, konstruksi, dan perdagangan (Biro Statistik, 2020). Industri-industri ini sebagian besar terletak di sepanjang pantai dan berisiko banjir karena kenaikan permukaan laut.

Pada tahun 2000, 6,3% kota Makassar adalah penutup pohon. Dari 2001 hingga 2012, Makassar memperoleh luas wilayah tutupan pohon seluas 4 ha. Sejak 2001 hingga 2019, Makassar kehilangan 46 ha tutupan pohon (Gambar 39), setara dengan penurunan tutupan pohon sebesar 4,1% sejak 2000, dan emisi CO₂ 10,4kt. Dari tahun 2016, tidak ada satu pun tutupan pohon Makassar yang memiliki hutan utuh.

Gambar 38: Tutupan pohon hilang di Makassar (ha).⁶⁶



Makassar memiliki tiga ekosistem utama yang menyediakan layanan lingkungan yang berperan penting dalam meminimalkan sensitivitas terhadap dampak perubahan iklim bagi masyarakat miskin dan rentan miskin (lihat Tabel 18).

⁶⁶ Diadaptasi dari Global Forest Watch, 2020

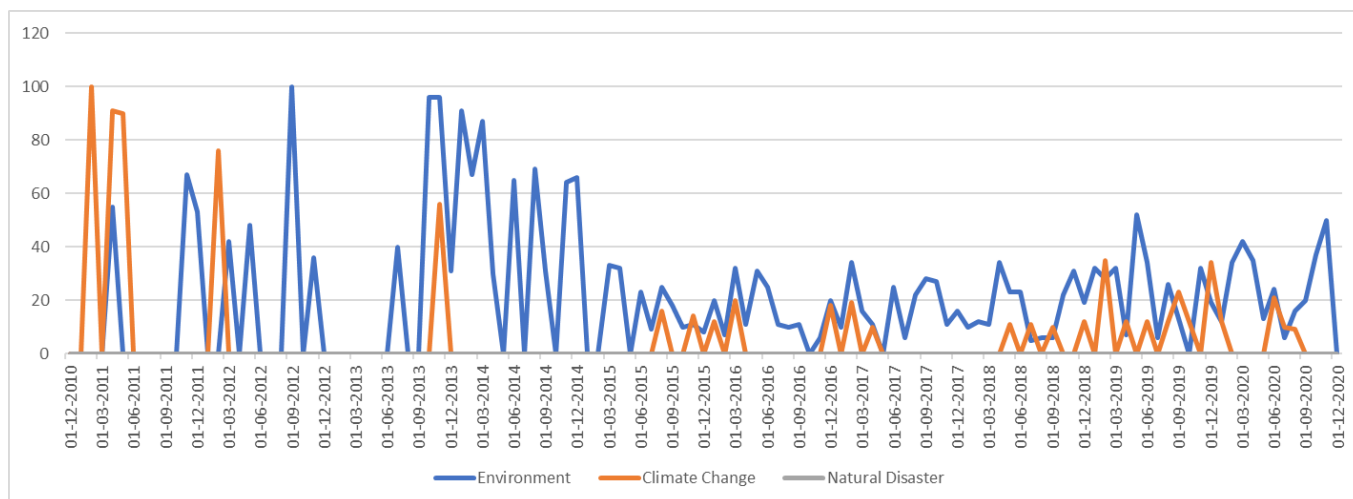
Tabel 18: Layanan ecosystem Makassar.⁶⁷

EKOSISTEM	LAYANAN EKOSISTEM
DAS Jeneberang	Penyediaan air baku Produksi kayu Produksi pangan Pengendalian banjir
Sungai Tallo dan lahan basah	Wastafel polutan Keanekaragaman hayati muara (perikanan) Sistem pemurnian air Ketentuan air baku
Pulau dan zona pesisir	Hutan mangrove menawarkan perlindungan dari gelombang tinggi dari lonjakan badai, meminimalkan abrasi pantai, mengurangi angin kencang, memberikan lingkungan untuk keanekaragaman hayati. Terumbu karang mempromosikan stok ikan untuk tangkapan dangkal

6.2.3 Tren masa depan

Degradasi lingkungan berkontribusi pada perubahan iklim. Langkah-langkah mitigasi untuk adaptasi perubahan iklim akan meningkatkan lingkungan dan sebaliknya. Setiap tindakan untuk meningkatkan lingkungan akan membantu mengurangi efek perubahan iklim.

Gambar 40 menunjukkan minat pencarian terhadap lingkungan, perubahan iklim dan bencana alam relatif terhadap titik tertinggi pada grafik untuk Sulawesi Selatan dari 2010 hingga 2020. Nilai 100 adalah popularitas puncak untuk istilah tersebut. Nilai 50 berarti bahwa istilah ini setengah populer. Skor 0 berarti tidak ada cukup data untuk istilah ini.

Gambar 39: Bunga dari waktu ke waktu Sulawesi Selatan.⁶⁸

⁶⁷ PBB-Habitat, 2014

⁶⁸ Google Trends, 2020

Kesadaran penduduk mengenai perubahan iklim dan lingkungan telah menurun dari waktu ke waktu, sementara tidak cukup data yang ada untuk bencana alam. Namun, ketika melihat kesadaran oleh bencana alam, puncak terbukti setelah bencana besar, seperti setelah tsunami pada September 2018. Gambar 40 menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran atas topik-topik tersebut.

6.2.4 Penilaian kebutuhan cepat

Dalam rangka melestarikan kawasan ekologis yang penting, pertimbangan penting bagi perencanaan Makassar ke depan adalah menetapkan batas pembangunan dan menyeimbangkan kawasan yang dibangun dengan ruang terbuka dan hutan mangrove. Fokus khusus harus pada pengembangan keseluruhan dan khususnya di dalam pantai. Ketika pembangunan terjadi prinsip pembangunan berkelanjutan harus diutamakan misalnya kegiatan reklamasi terbatas, pengelolaan pesisir terpadu, memastikan kelangsungan normalisasi sungai dari tiga sungai utama.

Ekosistem di Selat Makassar kompleks dan berlimpah; pulau-pulau terdekat dan daerah pesisir dengan hutan mangrove, mudflats dan terumbu karang memberikan kondisi optimal untuk keanekaragaman hayati laut dan mata pencaharian pesisir. Makassar terletak pada topografi yang relatif datar dengan perbukitan di sebelah timur kota yang menciptakan daerah tangkapan air alami dengan vegetasi semi padat.

Makassar berkembang pesat dan berkembang di sana sangat mempengaruhi kota dengan cara positif dan negatif. Perkembangan komersial dan perumahan baru di sepanjang lahan basah pesisir, dikombinasikan dengan rencana untuk meningkatkan ukuran kota sebesar 20 persen - dengan mengambil tanah dari pinggiran dan membuangnya di laut untuk menciptakan TPA - menjanjikan dorongan bagi perekonomian kota. Tetapi ini secara bersamaan mengancam banyak komunitas nelayan tradisional Makassar dengan memblokir akses mereka ke laut atau mengusir mereka sepenuhnya dan menyebabkan kerusakan ekologis yang mengakibatkan lebih sedikit stok ikan lebih jauh dari pantai.

Banyak negara menggunakan adaptasi berbasis ekosistem untuk menangani berbagai bahaya dan dampak iklim. Beberapa contoh termasuk:

- Reboisasi dan konservasi mangrove untuk melindungi dari badai dan membantu mengendalikan erosi.
- Teknik pertanian campuran untuk menjaga kesuburan tanah dan menghemat air.
- Sistem pertanian teras yang terbentuk lambat untuk meningkatkan kelembaban tanah dan mengurangi kehabisan.

Hasil positif dari ini dan banyak intervensi lainnya sedang didokumentasikan menggunakan beberapa langkah efektivitas termasuk pemantauan biofisik, analisis biaya-manfaat, persepsi masyarakat, dan penilaian multicriteria.

Intervensi besar untuk meningkatkan lingkungan harus berfokus pada:

1. Perencanaan tata ruang strategis dalam jaringan ekologi lanskap (misalnya pengelolaan pesisir terintegrasi, konektivitas ekosistem). Arus utama Indeks Kinerja Lingkungan hidup terhadap kebijakan lokal untuk Makassar:
 - Pemantauan konservasi dan perlindungan kawasan DAS di Tallo dan Jeneberang
 - Pengendalian penggunaan lahan di area DAS
 - Pemantauan kualitas lingkungan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Perkebunan mangrove di daerah pesisir
2. Energi bersih / energi terbarukan, sumber daya energi terdesentralisasi atau sumber daya energi terdistribusi (misalnya fotovoltaik, arus pasang surut, energi angin):
 - Kebijakan efisiensi energi (tingkat energi)
 - Meningkatkan transportasi umum
3. Meningkatkan/meningkatkan lingkungan dan pendidikan dan kesadaran perubahan iklim.

6.3 MANAJEMEN RISIKO BENCANA

6.3.1 Kerangka kebijakan

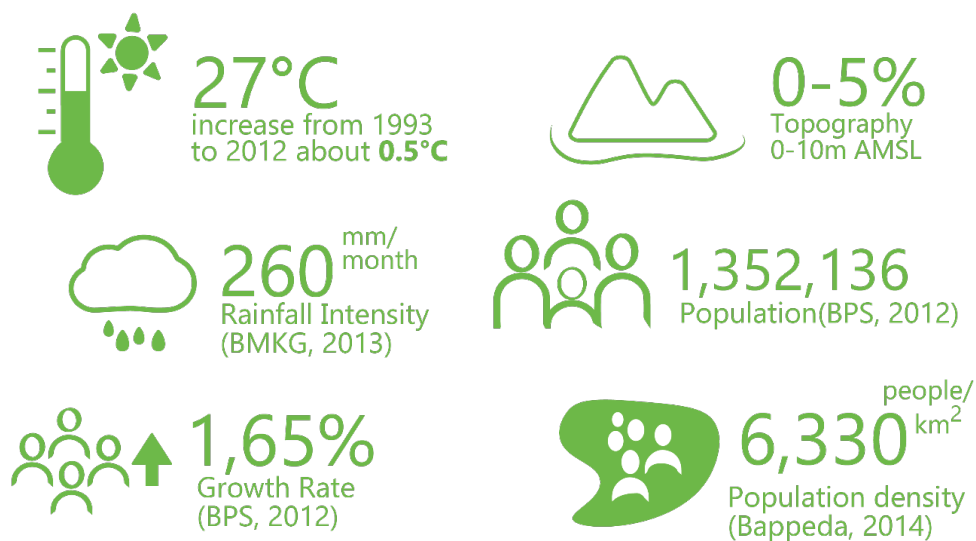
Tidak ada lembaga di tingkat kota Makassar yang mengatasi perubahan iklim sedangkan untuk bahaya alam ada "Badan Penanggulangan Bencana Daerah" (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

6.3.2 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan bencana di planet ini, mengingat tingginya paparan bahaya alam ditambah dengan tingginya kerentanan sosial ekonomi. Indonesia memiliki 429 bencana tercatat sejak 1900 yang disebabkan oleh bahaya alam, menjadi banjir dan gempa bumi yang paling sering terjadi. Bencana ini telah mempengaruhi lebih dari 29 juta orang dan telah menewaskan lebih dari 238.000 orang. Biaya kerusakan diperkirakan lebih dari 44 juta USD (UNISDR 2016).

Sulawesi Selatan dan ibu kota Makassar terpapar perubahan iklim dan bencana alam. Wilayah Selat Makassar telah memiliki frekuensi peristiwa tsunami sejarah tertinggi untuk Indonesia (Prasetya et al., 2001). Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan deskripsi singkat tentang situasi yang ada di Makassar (Gambar 41) tentang perubahan iklim dan bahaya alam. Penilaian terhadap situasi telah dilakukan berdasarkan tinjauan literatur dan wawancara, yang berisi tantangan utama, intervensi potensial, serta rekomendasi untuk eksekusi skenario pembangunan.

Gambar 40: Makassar Profil Risiko.⁶⁹



6.4 PERUBAHAN IKLIM DAN BAHAYA ALAM

6.4.1 Kerangka kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana dan kebijakan berikut untuk mengatasi perubahan iklim dan bahaya alam:

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API/Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim).

- RAN-API adalah rencana aksi nasional Indonesia tentang adaptasi perubahan iklim. Ini mengidentifikasi dua bidang utama perubahan iklim dan dampaknya pada mata pencaharian. Dua wilayah ini adalah peningkatan permukaan laut dan perubahan cuaca, iklim, dan curah hujan. Peningkatan kenaikan permukaan laut berdampak pada perikanan, ekonomi kelautan, dan pertanian. Perubahan cuaca, iklim, dan curah hujan berdampak pada kesehatan (penyakit yang ditanggung vektor dan penyakit pernapasan akibat kebakaran), ketersediaan air, dan berkontribusi pada bencana alam. Bappenas – kementerian perencanaan pembangunan nasional – menerapkan RAN-API. RAN API telah dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

⁶⁹ Gunawan dkk., 2015

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi (RAN GRK/Rencana Aksi Nasional Menurunkan Gas Emisi Rumah Kaca).

- RAN-GRK mengusulkan tindakan mitigasi di lima sektor prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah ment) serta tindakan pendukung lainnya yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional yang mendukung prinsip pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. (RAN-GRK) merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GHG sebesar 26% pada tahun 2020 dari tingkat BAU dengan usahanya sendiri dan mencapai pengurangan 41% dengan dukungan internasional.
- RAN-GRK dikembangkan untuk memberikan kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam melaksanakan tindakan yang terkait secara langsung dan tidak langsung terhadap upaya pengurangan emisi GRK selama periode 2010-2020 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Menurut the regulasi, setiap provinsi harus mengembangkan program RAD-GRK. Program Sulawesi Selatan disusun pada tahun 2010. Pelaporan wilayah dilakukan secara online ke BAPPENAS. Sayangnya, peraturan yang ada hanya mewajibkan Provinsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sedangkan datyang dibutuhkan berada di kabupaten/kota. Provinsi-provinsi tersebut mengalami kesulitan dalam pelaporan. Saat ini RAN GRK telah ditingkatkan menjadi Low Carbon Development Planning (PPRK).

Di tingkat lokal, salah satu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (BNPB)) adalah menyusun pedoman pembentukan kantor penanggulangan bencana daerah/BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Tidak ada regulasi khusus mengenai perubahan iklim dan bahaya alam di tingkat kota Makassar. Peraturan yang ada mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Instansi kota melaksanakan peraturan tersebut.

Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) telah menguraikan strategi penguatan mitigasi dan adaptasi di wilayah pesisir. Strategise termasuk yang berikut.



1. Revitalization

Well-planned, controlled, and limited reclamation activities, by complying with the regulations related to mitigation and adaptation (i.e. sedimentation and abrasion).

2. Stipulating elevation standards for coastal development

3. Development of drainage systems

4. Adopting the waterfront concept when developing coastal and riverbank areas

Integrating built-up areas with green open spaces and productive mangrove forests.

6.4.2 Pengaturan kelembagaan

Ada beberapa kantor kota Makassar yang bertanggung jawab atas berbagai faktor atau dampak perubahan iklim. Instansi tersebut terdiri dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan; Departemen Tata Ruang dan Perencanaan Bangunan; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Departemen Pekerjaan Umum; dan Badan Lingkungan Hidup.

Tidak ada lembaga yang secara khusus mengelola perubahan iklim di tingkat kota. Penanggulangan perubahan iklim dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan, serta ada kantor wilayah Pusat Perubahan Iklim (PPI) yang berlokasi di kota Makassar.

Pusat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki tugas untuk melakukan observasi, pengelolaan data, prakiraan, penelitian, kerja sama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

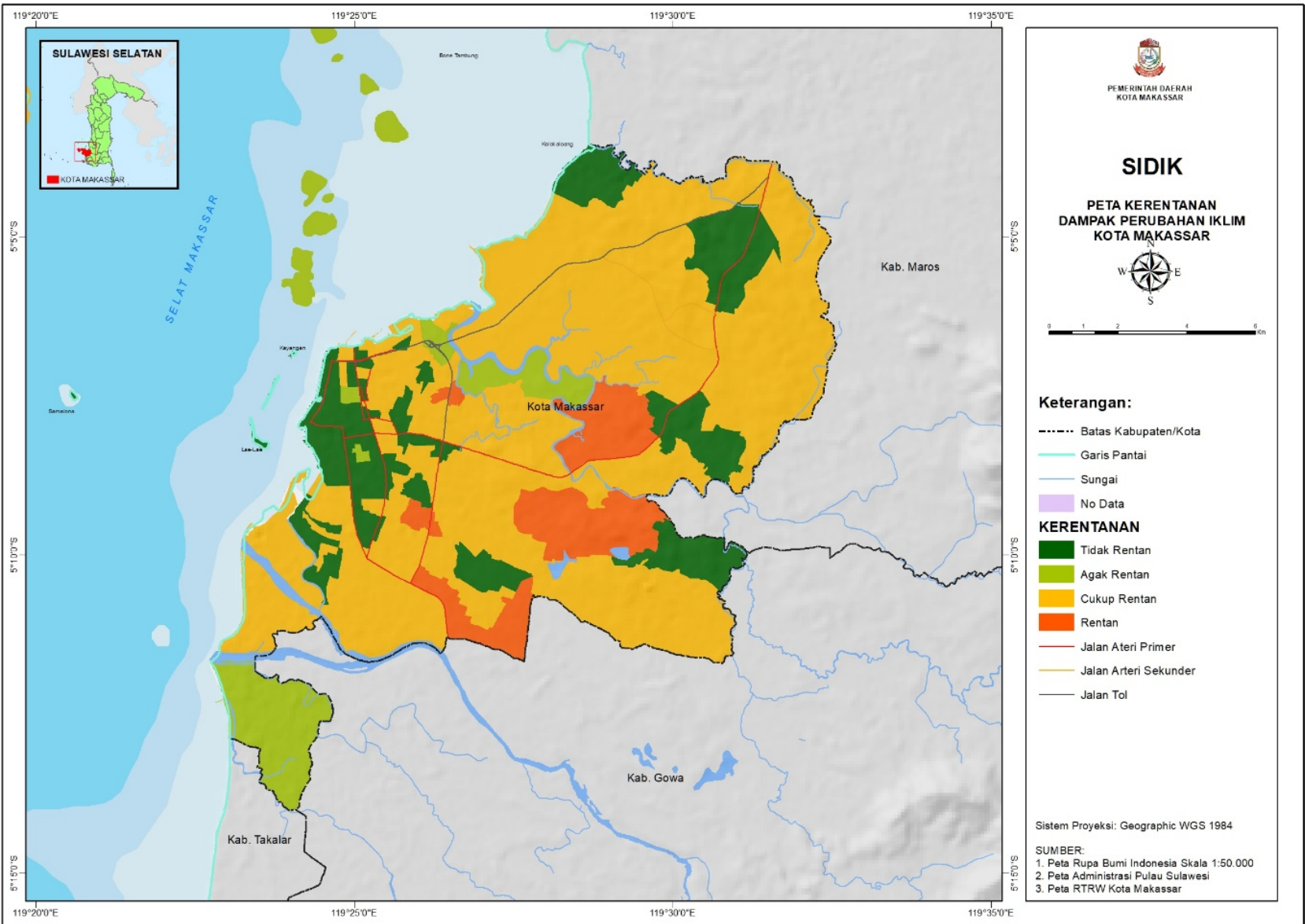
6.4.3 Risiko berdasarkan variabilitas iklim saat ini

Mengevaluasi kerentanan desa relatif terhadap desa lain dalam merespons bencana (coping range) berdasarkan posisi nilai indeks kerawanan dan kapasitas masing-masing desa. Metodologi untuk mendukung analisis ini disediakan dalam *Volume 13: Perubahan Iklim dan Bahaya Alam*. Untuk kota Makassar peta tingkat kerentanan dapat dilihat pada Gambar 42.

Classification of vulnerability

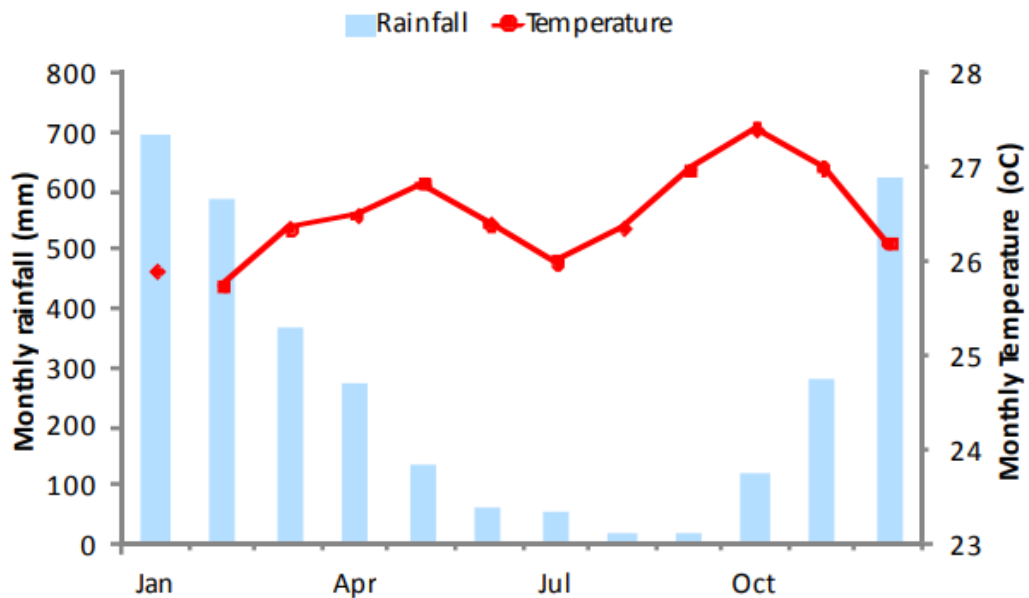
- Tidak rentan – Not vulnerable
- Agak rentan – Somewhat vulnerable
- Cukup rentan – Quite vulnerable
- Rentan – Vulnerable
- Sangat rentan – Very vulnerable.

Gambar 41: Peta Kerentanan Dampak Perubahan Iklim Kota Makassar



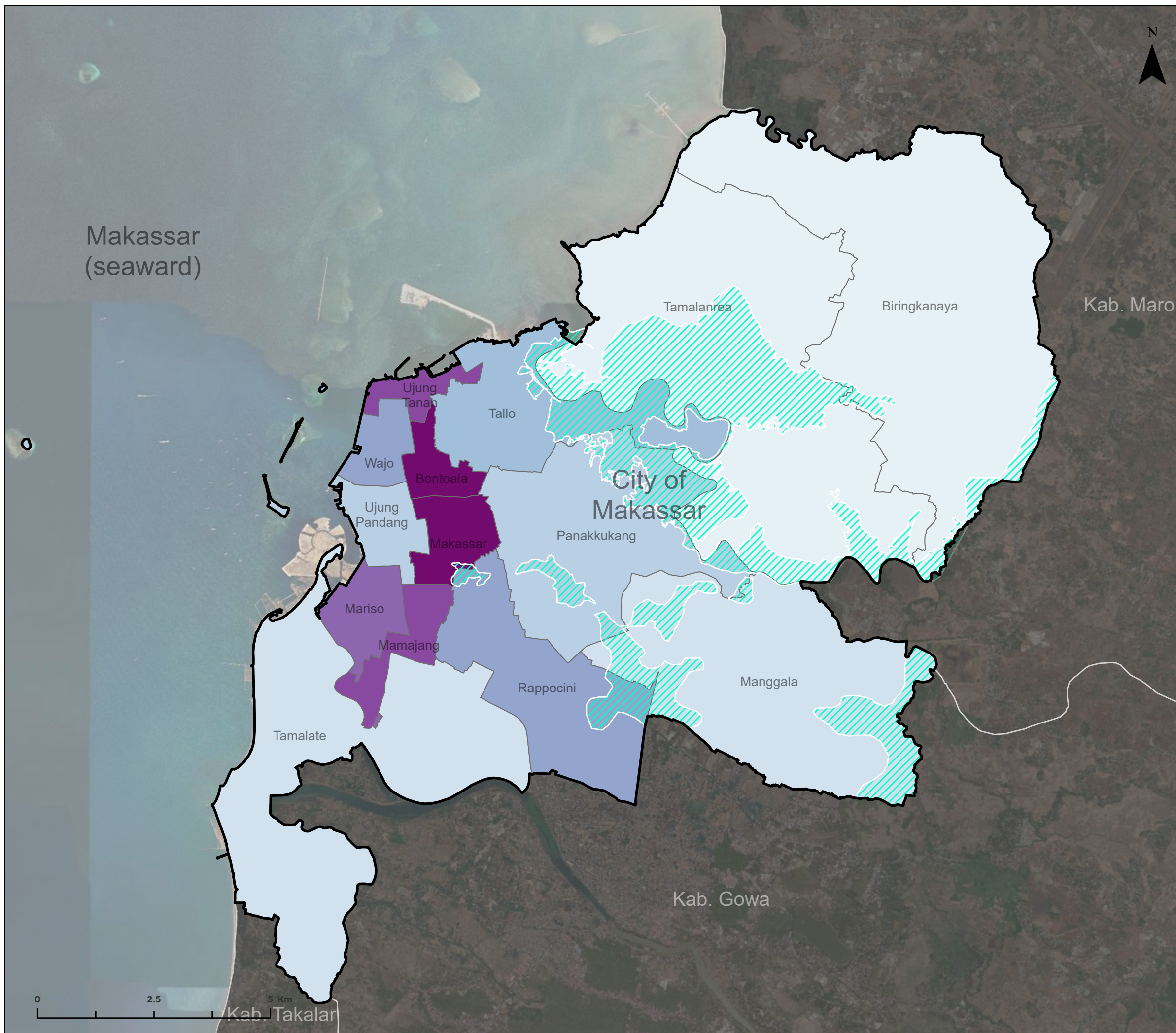
Makassar memiliki iklim tropis dengan musim basah dan kemarau yang berbeda (Gambar 42). Sejalan dengan pola pemanasan global, terus terjadi peningkatan pemanasan di Makassar sejak tahun 1980-an. Curah hujan berkala tetapi kemudian lebih variabel dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas model dan penelitian menyarankan konsentrasi intensitas curah hujan selama musim hujan. Peningkatan intensitas curah hujan ini diproyeksikan akan menyebabkan lebih banyak banjir di masa depan. Daerah DAS rawan banjir, terutama wilayah perkotaan di sekitar Sungai Jeneberang, Sungai Tallo dan Sungai Maros. Masyarakat dengan sistem drainase yang buruk atau yang tidak terhubung dengan sumber daya air sangat rentan.

Gambar 42: Rata-rata curah hujan dan suhu jangka panjang di Makassar.⁷⁰



Gambar 43 peta daerah rawan banjir di samping kepadatan penduduk. Secara umum, daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi tidak berada di daerah rawan banjir, kecuali sebagian Wilayah Tallo, Rappocini dan Makassar.

⁷⁰ CSIRO, 2014



Key

 Rawan Banjir (Flood prone area)

Kepadatan penduduk menurut kecamatan - Orang / sqkm 2019 (population density by district - people / sqkm 2019)

 3000
33000

Date: 18/12/2020
By: JC
Report: Makassar Urban Situation Assessment

Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
Projection System:

Figure 43 Population density with areas subject to flooding

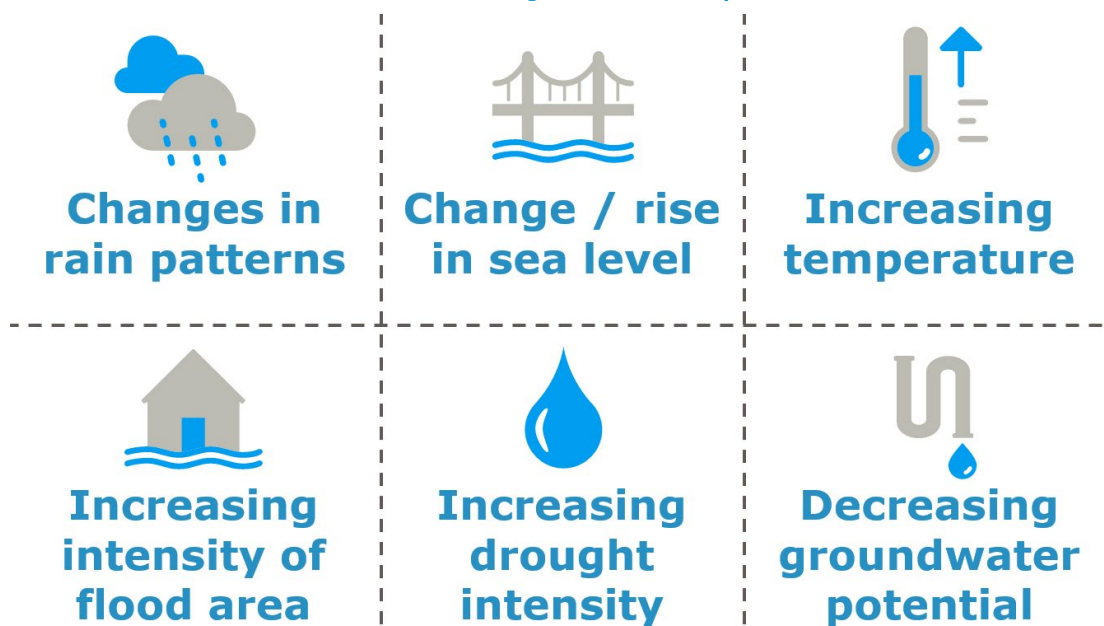
Selama periode 1993 – 2002, kenaikan permukaan laut di Makassar telah naik menjadi 7,5 cm dan berdasarkan simulasi diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 88,16, 1,14 m pada tahun 2050 dan 1,44 m pada tahun 2100 (BPPT, 2008). Dilaporkan, selama 2000 – 2002, kenaikan permukaan laut telah merusak 4000 rumah yang menghasilkan US\$ 11 juta (Dewan Intelijen Nasional, 2009). Urbanisasi di wilayah pesisir semakin menyebabkan penurunan luas ekosistem mangrove, merendahkan kemampuan alam untuk membantu melindungi daerah tersebut dari kenaikan permukaan laut. Daerah berbaring rendah di sepanjang garis pantai dengan pariwisata, perhotelan, dan masyarakat pesisir di Kecamatan Tallo, Biringkanaya, Mariso, Tamalanrea dan Wajo sangat berisiko tinggi.

Gambar 44: Meningkatnya Suhu di Makassar⁷¹



Tantangan utama Makassar terkait perubahan iklim dan bahaya alam ditunjukkan pada Gambar 46 .

Gambar 45: Tantangan utama terkait perubahan iklim



⁷¹ Stasiun Paotore Meteorologi Maritim, 2013

Makassar kunci perubahan iklim dan tantangan bahaya alam digambarkan sebagai berikut:

1. **Perubahan pola hujan:** Pengaruh iklim musim hujan dengan musim kemarau dan musim hujan domain kota Makassar. Berdasarkan penelitian CSIRO dan Universitas Hasanuddin, jumlah total curah hujan sama, namun musim hujan lebih singkat beberapa hari, sedangkan musim kemarau lebih panjang. Hal ini menjelaskan kerentanan banjir dan kekeringan yang cenderung meningkat di masa depan.
2. **Perubahan/kenaikan permukaan laut:** Permukaan laut di Makassar naik hingga 7,5 cm dalam periode 1993 – 2002. Diperkirakan kenaikan permukaan laut di Makassar bisa mencapai 1,14 m pada 2050.
3. **Peningkatan suhu:** Kota Makassar memiliki iklim yang panas. Suhu rata-rata bulanan bervariasi dari sekitar 27⁰ C hingga lebih dari 29°C. Namun, suhu harian bisa lebih tinggi dari suhu rata-rata bulanan dan bisa mencapai 33°C pada hari-hari tertentu. Berdasarkan simulasi suhu cenderung meningkat. Peningkatan tersebut dikarenakan pemanasan global, berkurangnya ruang hijau terbuka dan peningkatan area penumpukan.
4. **Meningkatkan intensitas daerah banjir:** Banjir atau genangan saat ini disebabkan oleh peningkatan intensitas curah hujan dan karakteristik fisik misalnya kerusakan DAS hulu.
5. **Peningkatan intensitas kekeringan:** Selama musim kemarau, beberapa warga Kota Makassar melaporkan kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kekeringan tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya curah hujan, tetapi juga karena disfungsi ekosistem sebagai pengatur air. Sumber pasokan air di Makassar terutama berasal dari Sungai Jeneberang. Selama musim kemarau debit menurun sementara kekeruhan meningkat, sehingga perusahaan air kota tidak bisa mengolah dan mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. **Penurunan potensi air tanah:** Perubahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan penduduk berdampak pada pasokan air permukaan dan cadangan air tanah. Pasokan air di Makassar saat ini belum mampu menutupi permintaan air. Air tanah juga berkurang karena tidak cukup isi ulang. Pada musim hujan, terjadi peningkatan limpasan karena luas bangun yang lebih luas, sedangkan pada musim kemarau debit air sungai menurun dan tidak dapat mengisi air tanah. Ekstraksi air tanah yang berlebihan di beberapa tempat di pantai telah mengalami intrusi air laut. Oleh karena itu, abstraksi air tanah telah meningkat secara ilmiah. Abstraksi ini berdampak pada permukaan air tanah dan meningkatkan salinitas air tanah. Penipisan yang cepat juga dapat berdampak pada stabilitas tanah di antara efek lainnya ke masa depan.

Risiko bahaya alam lainnya yang ada di Makassar meliputi:

- Gempa bumi: Makassar berada di zona gempa 2, yang merupakan zona gempa risiko kecil. (Sumber: Prosedur Perencanaan Ketahanan Gempa Bumi untuk Membangun, Standar Nasional Indonesia/SNI 03-1726- 2003).
- Tsunami: Karena lokasi pesisirnya dan risiko gempa bumi yang lebih tinggi di daerah lain di wilayah tersebut, khususnya risiko tsunami yang terkait dengan Selat Makassar⁷², Makassar rentan terhadap Tsunami.
- Ekosistem Terumbu Karang: Indonesia dilaporkan mengalami penurunan sumber daya laut yang cepat selama tiga dekade terakhir, dengan langkah-langkah konservasi mendesak yang diperlukan (Allen, 2008). Terumbu karang terancam oleh praktik penangkapan ikan yang merusak (misalnya memancing dengan bahan peledak), offtake untuk perdagangan dan penggunaan lokal, polusi, kerusakan pesisir dan pariwisata (UNEP-WCMC, 2015).
- Ekosistem Lamun dan Rumput Laut: Lamun dan ekosistem rumput laut telah menurun di Indonesia karena gangguan antropogenik (populasi dan pembangunan ekonomi yang terus

⁷² Selat Makassar telah memiliki frekuensi peristiwa tsunami historis tertinggi (Sumber: *Wilayah Tsunamigenik Selat Makassar, Indonesia*, G. S. PRASETYA, W. P. DE LANGE dan T. R. HEALY, Coastal Marine Group, Department of Earth Science, University of Waikato, Private Bag 3105, Hamilton, Selandia Baru (Diterima: 31 Januari 2001) untuk Indonesia

bertambah). Menurunnya ekosistem ini mempengaruhi keanekaragaman hayati, produktivitas perikanan, terumbu karang dan hutan mangrove. Ekosistem lamun terpinggirkan dalam praktik pengelolaan sumber daya pesisir di Indonesia (Nadiarti et.al., 2012).

6.4.4 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Dampak perubahan iklim dapat dimitigasi atau dikurangi dengan menerapkan upaya adaptasi iklim. Mengurangi kerentanan desa perkotaan dapat dicapai dengan intervensi yang berfokus pada faktor paparan dan sensitivitas dan mengatasi /adaptasi. Mitigasi ini harus menjadi bagian dari penataan ruang dan pengendalian banjir oleh dinas pekerjaan umum. Selain itu, lembaga sosial juga berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan dinamika kependudukan. Upaya mitigasi di bawah badan lingkungan harus fokus pada peningkatan ruang terbuka hijau dan meningkatkan indeks vegetasi. Upaya mitigasi juga harus fokus pada peningkatan kapasitas sektor lain, misalnya perusahaan listrik, badan sosial, badan pendidikan, badan kesehatan dan badan kerja publik.

Awalnya direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas tata ruang, melakukan studi terbaru untuk menentukan dampak perubahan iklim secara lebih rinci, termasuk model kenaikan permukaan laut, mengelola sumber daya air dengan lebih baik melalui kerja sama dengan kabupaten sekitarnya, khususnya dalam rehabilitasi DAS. Selain itu, analisis lebih lanjut dapat diperlukan ke dalam efek potensi bencana alam untuk perencanaan Makassar di masa depan (misalnya penilaian risiko, respons dan ketahanan, perencanaan pembangunan pesisir, sistem peringatan dini dan teknik konstruksi).

7. MODAL SOSIAL: TATA KELOLA DAN KOMUNITAS



7.1 PEMERINTAHAN

7.1.1 Peran dan hubungan institusi

Meskipun perencanaan, kebijakan, dan undang-undang sangat top-down, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam hal implementasi. Kepala kantor pemerintahan daerah masing-masing melaporkan kepada rekanan menteri di tingkat nasional dan kepada Walikota menjaga Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Sekda (Sekretaris Daerah/Sekretaris Daerah) yang bergerak dengan pengambilan keputusan dan arah kebijakan.

Sebagian besar kantor dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun program nasional khusus yang dilaksanakan di provinsi/kota/kota didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dinas setempat juga bisa menerima tugas bantuan dari pemerintah pusat (didanai dengan APBN/APBN nasional), namun hal ini juga berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan secara nasional. Anggaran Nasional/APBN tidak dapat digunakan untuk mendanai personel, hanya untuk pelaksanaan program.

Di Indonesia, pembangunan perkotaan dipandu oleh Rencana Pembangunan Nasional Mid Term (RPJMN) 5 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun. Kedua dokumen ini dikembangkan oleh BAPPENAS kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan ermid Tlokal (RPJMD) dan Rencana Pembangunan ermid Long Tlokal (RPJPD) di tingkat provinsi dan daerah. Biasanya, Bappeda, bekerja sama dengan dinas setempat terkait, membantu Gubernur terpilih atau Walikota/Bupati dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut, termasuk menyusun Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW/Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR/Rencana Detail Tata Ruang). Dokumen-dokumen ini adalah pedoman untuk pembangunan perkotaan di tingkat lokal.

7.1.2 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Analisis tata kelola yang cerdas

Tata kelola yang baik dan cerdas adalah tata kelola yang dapat memenuhi layanan dasar dengan cara yang efisien dan efektif, antara lain:

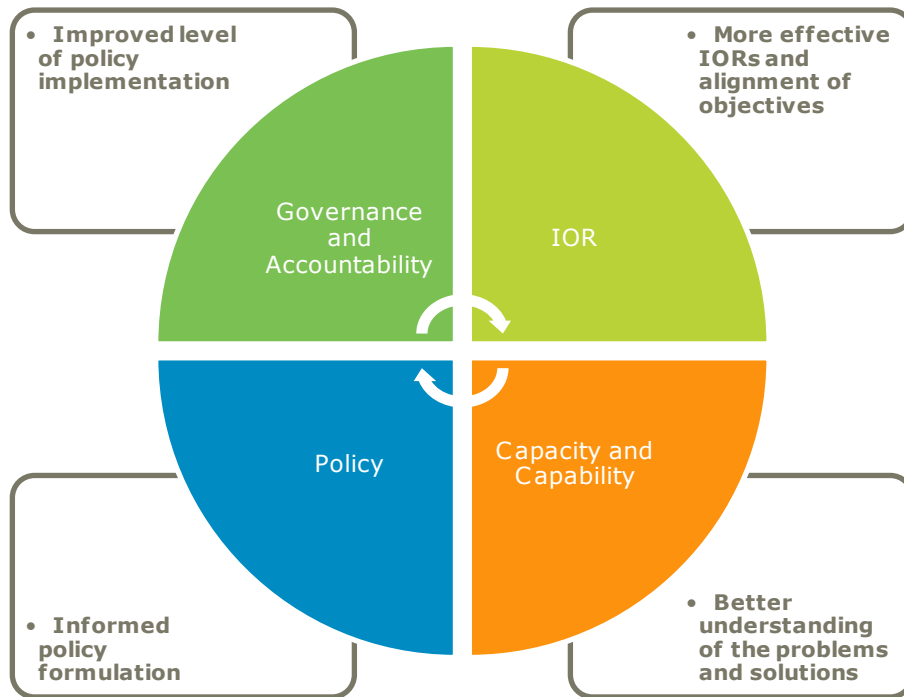
1. Memberikan kemudahan berbisnis
2. Menyediakan aplikasi yang mudah digunakan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan
3. Menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat.

Ada banyak manfaat mengadopsi tata kelola cerdas, yang dapat dilihat pada Gambar 47 .

"Agar visi kota cerdas bisa dier, itu harus singkun dari sebuah kota ramah lingkungan, dan perlu sedilah dengan tujuan yang jelas untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintah, dan berkurangnya lingkungan luar biasa melalui limbah dan polusi"

Sumber: Tan dan Taeihagh, 2020

Gambar 46 : Manfaat Tata Kelola Cerdas



Catatan: IOR - Hubungan Antar Organisasi

Prinsip Smart Governance digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan Makassar:

- Efektivitas
 - Indeks penegakan hukum/ kebijakan pendukung/hukum/peraturan
 - Kesetaraan layanan dan aksesibilitas
 - Transparansi dan akuntabilitas
- Efisiensi
 - Efisiensi/inovasi birokrasi dalam fungsi pemerintahan
 - Layanan terpadu/kolaborasi/interoperabilitas/partisipasi yang lebih luas
 - Keberlanjutan ekonomi
- Pembangunan dan keamanan infrastruktur
 - Buka platform data
 - Web/aplikasi pemerintah
 - Perlindungan data.

Makassar telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. Kebijakan yang relevan diberlakukan, meskipun masih kurang pemberlakuan, infrastruktur yang diperlukan ditetapkan tetapi tidak berfungsi sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa Makassar sudah berada di jalur yang benar namun masih perlu upaya lagi untuk mencapai status smart governance.

Tabel 19: Penilaian Tata Kelola Makassar

Sektor	PENGEMBANGAN PERKOTAAN	AIR, SANITASI, LIMBAH PADAT DAN LISTRIK	GESI	PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LAHAN	STABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Pariwisata	MOBILITAS PERKOTAAN	INFRA CERDAS STRUKTUR (TIK)	PERUBAHAN IKLIM DAN BAHAYA ALAM
PRINSIP-PRINSIP SMART GOV									
Efektivitas									
Indeks penegakan hukum/kebijakan pendukung/hukum/peraturan/perizinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kesetaraan layanan dan aksesibilitas	●	✗	✗	●	●	●	●	●	●
Keterjangkauan & keberlanjutan	●	✗	✗	●	●	●	●	●	×
Efisiensi									
Efisiensi/inovasi birokrasi dalam fungsi pemerintahan	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Layanan terpadu/kolaborasi/interoperabilitas/partisipasi yang lebih luas	●	✗	✗	✗	✗	✗	✗	●	✗
Transparansi dan akuntabilitas	✓	●	✗	●	●	●	✗	●	●
Pengembangan dan keamanan Infrastruktur TIK									
Buka platform data/ Web pemerintah	✓	●	●	●	●	●	●	●	✓
Aplikasi pemerintah	●	●	✗	●	●	✗	✗	●	●
Perlindungan data	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = ya (berfungsi)

✗ = tidak

● = tidak berfungsi penuh

Intervensi potensial

Secara umum, sejumlah daerah terbukti di mana tata kelola pemerintahan lemah dan diperlukan pengembangan kelembagaan lebih lanjut. Sering terjadi bahwa begitu proses politik telah merumuskan kebijakan (idealnya dengan masukan akar rumput) maka operator dan regulator harus dibiarkan melaksanakan kebijakan tanpa campur tangan politik. Dengan cara ini mereka menjadi lebih responsif dan membangun kapasitas.

Solusi cerdas akan diselidiki untuk meningkatkan tata kelola sedemikian rupa sehingga setiap sektor berkelanjutan secara ekonomi, mencapai kesetaraan layanan, transparan dan akuntabel dan dengan partisipasi yang lebih luas, mengidentifikasi kebijakan yang optimal.

Urbanisasi yang cepat adalah tantangan karena pembangunan perkotaan yang direncanakan tidak dapat mengimbangi permintaan. Akibatnya, penyelesaian informal terjadi, mengakibatkan kesulitan dalam membangun infrastruktur yang diperlukan dan cara yang terencana dan berurutan. Hal ini sebagian disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan kurangnya regulasi rencana tata ruang. Jenis masalah sistemik ini perlu dimodelkan agar tidak menjadi lebih buruk. Pada saat yang sama, metode yang dapat diterima secara sosial untuk meningkatkan daerah kumuh perlu disepakati.

Tabel 20: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Pembangunan dan ekonomi

DISIPLIN	TANTANGAN UTAMA	INTERVENSI POTENSIAL
Pembangunan Perkotaan	Meningkatkan pemukiman informal Proses Musrenbang (konsultasi masyarakat) yang tidak efektif?	Pertama, solusi perlu disepakati di semua tingkatan agar daerah kumuh yang ada tidak meluas. Kemudian masalah sistemik perlu dicontoh dalam konsultasi dengan otoritas dan kebijakan nasional, provinsi dan lokal, undang-undang dan peraturan yang diberlakukan dengan sistem pemerintahan praktis. Dalam rangka memperkuat tata kelola seperangkat insentif dan sanksi cerdas akan diperlukan dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap rencana pembangunan perkotaan.
Stabilitas Keuangan dan Pembangunan Ekonomi	Perlu meningkatkan pendapatan kota	Pendaftaran rumah tangga dan aktivitas ekonomi yang benar melalui SMART ICT akan membantu mengurangi defisit tersebut. Regulasi ekonomi yang mengendalikan perpaduan yang seimbang antara publik, KPBU dan swasta. Tata kelola yang baik diperlukan untuk melindungi layanan sosial dasar namun mempromosikan inovasi
Pariwisata	Perlu meningkatkan layanan informasi bagi wisatawan serta fasilitas umum tempat wisata	Aplikasi untuk wisatawan (misalnya peta interaktif) Pariwisata berkelanjutan mengandalkan standar lingkungan yang baik.

Tabel 21: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Infrastruktur

DISIPLIN	TANTANGAN UTAMA	INTERVENSI POTENSIAL
Air, Sanitasi, Limbah Padat Dan Listrik	Air - Sumber daya air langka - Intrusi air asin ke dalam akuifer dan sungai - Kerugian fisik dan komersial - Masterplan	Air - Regulasi dan tata kelola penggunaan air sumur untuk menghentikan pengurangan tingkat akuifer dan mencegah intrusi garam - Kontrol sumur melalui lisensi - Meningkatkan regulasi ekonomi - Tata kelola yang lebih kuat untuk mengurangi air non-pendapatan
	Sanitasi - Tata kelola pemerintahan yang lemah - Di bawah investasi - Dampak lingkungan	Sanitasi - Peraturan untuk 'Koridor Konstruksi' sehingga layanan berjangkauan semuanya dapat dibangun pada saat yang sama untuk mengurangi gangguan dan biaya - Meningkatkan tata kelola septic tank - Meningkatkan regulasi ekonomi - Memperkuat tata kelola sektor sehingga persetujuan pelepasan dikeluarkan dan diberlakukan - Meningkatkan pendaftaran debit industri - Air, sanitasi, dan listrik adalah semua infrastruktur berbasis jaringan, tetapi yang paling mengganggu untuk diterapkan adalah jaringan air limbah - Idealnya, solusi tanpa penggalian dapat digunakan dalam banyak kasus
	Limbah Padat - Kelangkaan tanah - lokasi pembuangan limbah kurang kapasitas - Tidak ada yang dapat mengolah limbah padat (tidak dapat berpartisipasi dalam program nasional: pabrik W2E)	Limbah Padat Regulasi pergerakan kendaraan dalam rangka meminimalisir kemacetan pada jam sibuk
	Listrik Operator nasional	Listrik - Selidiki tingkat kerugian komersial - selidiki metode kelembagaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan di area informal. Mungkin memperkenalkan Smart metering untuk meminimalkan kerugian komersial - Selidiki undang-undang, peraturan untuk energi terbarukan dan PSP
Mobilitas Perkotaan	Kemacetan lalu lintas Tingkatkan angkutan umum, optimalkan BRT dan TOD	- Tata ruang secara teoritis dapat mengurangi kebutuhan mobilitas perkotaan dan mengurangi kemacetan - Tata kelola yang baik ditambah dengan tata ruang yang baik dapat menyelesaikan beberapa tantangan - Solusi SMART untuk biaya kemacetan, jalan tol, dan batas kecepatan fleksibel (lihat lampiran 6)
Infrastruktur Cerdas (TIK)	Ict Tidak ada perlindungan data	- Buka platform data - Web/aplikasi pemerintah - Perlindungan data - Solusi SMART yang juga melindungi data dan individu. Keamanan (lihat lampiran 6)

Tabel 22: Tantangan Utama dan Potensi Intervensi – Sosial dan lingkungan

DISIPLIN	TANTANGAN UTAMA	INTERVENSI POTENSIAL
GESI	• Memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. • Mengurangi jumlah kekerasan dan penganiayaan seksual dan penyerangan pada anak-anak. • Meningkatkan jumlah perempuan dalam pemerintahan. • Meningkatkan pemahaman balai kota (SKPD) Makassar tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender. • Meningkatkan koordinasi penanganan dan pencegahan perdagangan manusia. • Meningkatkan standar layanan minimum (MSS) tentang kekerasan dan perdagangan manusia. • Tingkatkan panduan tentang organisasi perempuan. • Meningkatkan ketersediaan data pada statistik gender	Undang-undang sudah diberlakukan. Pemantauan dan pendidikan diperlukan untuk mempromosikan norma-norma yang lebih inklusif.
	Kesehatan	Pengembangan Kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan. Untuk solusi SMART lihat Lampiran 6.
Pengelolaan Lingkungan dan Lahan	Pendaftaran semua sumber polusi	Solusi SMART mungkin membantu. Regulasi pelepasan industri sangat penting. Solusi cerdas diperlukan untuk mendeteksi pelepasan ilegal dan meningkatkan tata kelola.
	Pengelolaan Lahan	Memperbaiki tata kelola pengelolaan lahan dan penataan ruang.
Perubahan Iklim dan Bahaya Alam	Kurangnya koordinasi dengan sektor lain. Kurangnya tata kelola yang memungkinkan penyelesaian informal	Sistem pemantauan dan peringatan SMART. Integrasi desain perkotaan yang tangguh dengan semua sektor lainnya melalui pemetaan dan berbagi data.

Ringkasan

Dalam semua kasus, undang-undang telah dikembangkan selama beberapa tahun untuk menjalankan kebijakan tetapi ada bukti lemahnya tata kelola yang diizinkan dalam beberapa kasus *tingkat pengembangan ad hoc*, mencegah penyediaan layanan yang adil dan dapat diakses untuk seluruh populasi.

Untuk mengatasinya, hubungan antar-organisasi horizontal yang lebih baik antar sektor diperlukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama. Entitas regulasi juga perlu pengembangan dan penguatan lebih lanjut untuk memodifikasi perilaku dan membawa perubahan kelembagaan yang positif. Penggunaan TIK dan solusi cerdas untuk memantau dan mengontrol aktivitas melalui lisensi dan inspeksi adalah salah satu cara untuk memperkuat regulasi (lihat Lampiran 3).

Pada saat yang sama, kebijakan yang mengatasi akar permasalahan tantangan multi-faceted yang dihadapi Makassar sangat dibutuhkan. Dan kebijakan-kebijakan ini perlu tata kelola yang kuat untuk membawa perubahan positif yang diperlukan dalam pembangunan Makassar.

7.2 STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI YANG DITARGETKAN

7.2.1 Profil ekonomi Makassar

Ikhtisar

Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi emerging market terbesar di dunia. Dengan bantuan kebijakan ekonomi yang sehat Indonesia telah mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, kemiskinan yang berkurang tajam, meningkatkan standar hidup bagi jutaan warganya dan memungkinkan munculnya kelas menengah yang semarak.^{73 74} Di Indonesia, 70% dari tenaga kerja diperkirakan terlibat dalam pekerjaan informal, sebagian besar di sektor pertanian.⁷⁵

Makassar merupakan salah satu kunci perekonomian kota di Indonesia. Kota Makassar adalah kota terbesar di Sulawesi Selatan, menyumbang 20% dari populasi dan lebih dari 50% dari perkiraan PDB. Ekonomi dibangun berdasarkan perdagangan, konstruksi dan manufaktur, dan berkembang pesat.

Makassar relatif otonom dari pemerintah pusat, namun sektor publik masih berperan penting dalam fungsi perekonomian. Sekitar 42% dari populasi bekerja tetapi seperempat dari populasi Kota tergolong hidup dalam kemiskinan atau kemiskinan ekstrem.

Dengan menggunakan indikator PBB, 12,6% atau 190.000 orang di Makassar hidup dalam kemiskinan ekstrem (kurang dari USD1/hari) dan 25% atau 380.000 hidup dalam kemiskinan (kurang dari USD2/hari). Temuan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional Indonesia.⁷⁶

Tingkat inflasi tahun kalender Makassar Januari 2020 sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2020 terhadap Januari 2019) sebesar 2,25 persen.

⁷³ Breuer, Luis E., Jaime Guajardo, dan Tidiane Kinda, eds. 2018. *Mewujudkan Potensi Ekonomi Indonesia*. Washington, DC: Dana Moneter Internasional.

⁷⁴ https://www.researchgate.net/publication/325284245_Urbanization_and_Labor_Productivity_in_Indonesia

⁷⁵ <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28438/informal-sector-indonesia.pdf>

⁷⁶ Bank Dunia, 2018. Singkat kemiskinan dan pemerataan: Indonesia. Bank Dunia, 2pp.

https://databank.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_IDN.pdf

Perekonomian Makassar sempat tumbuh di posisi 6,20 persen pada awal 2020 dan merosot menjadi 2,8 persen pada kuartal II-2020.

Karena pandemi COVID-19 kontraksi perekonomian Kota Makassar diharapkan tahun 2020 dan 2021 juga mengalami perubahan investasi publik sebagai berikut:

1. pelonggaran kegiatan ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
2. memastikan pasokan dan distribusi barang untuk menjaga stabilitas harga
3. skema bantuan untuk menjaga kelangsungan produksi
4. alokasi anggaran belanja daerah efektif dalam program stimulus kegiatan ekonomi.

Enam sektor di Kota Makassar telah diprioritaskan untuk dukungan:

1. Perdagangan
2. Transportasi
3. industri pengolahan
4. Konstruksi
5. akomodasi, layanan penyediaan makanan dan minuman
6. layanan perusahaan.

Industri

Fondasi perekonomian Makassar terletak pada sektor tersier dan sekunder. Tabel 23 merangkum 5 sektor teratas yang menyumbang 71% ekonomi Makassar selama 2015-2019. Ini didominasi oleh manufaktur, perdagangan dan konstruksi dengan informasi dan komunikasi dan keuangan.

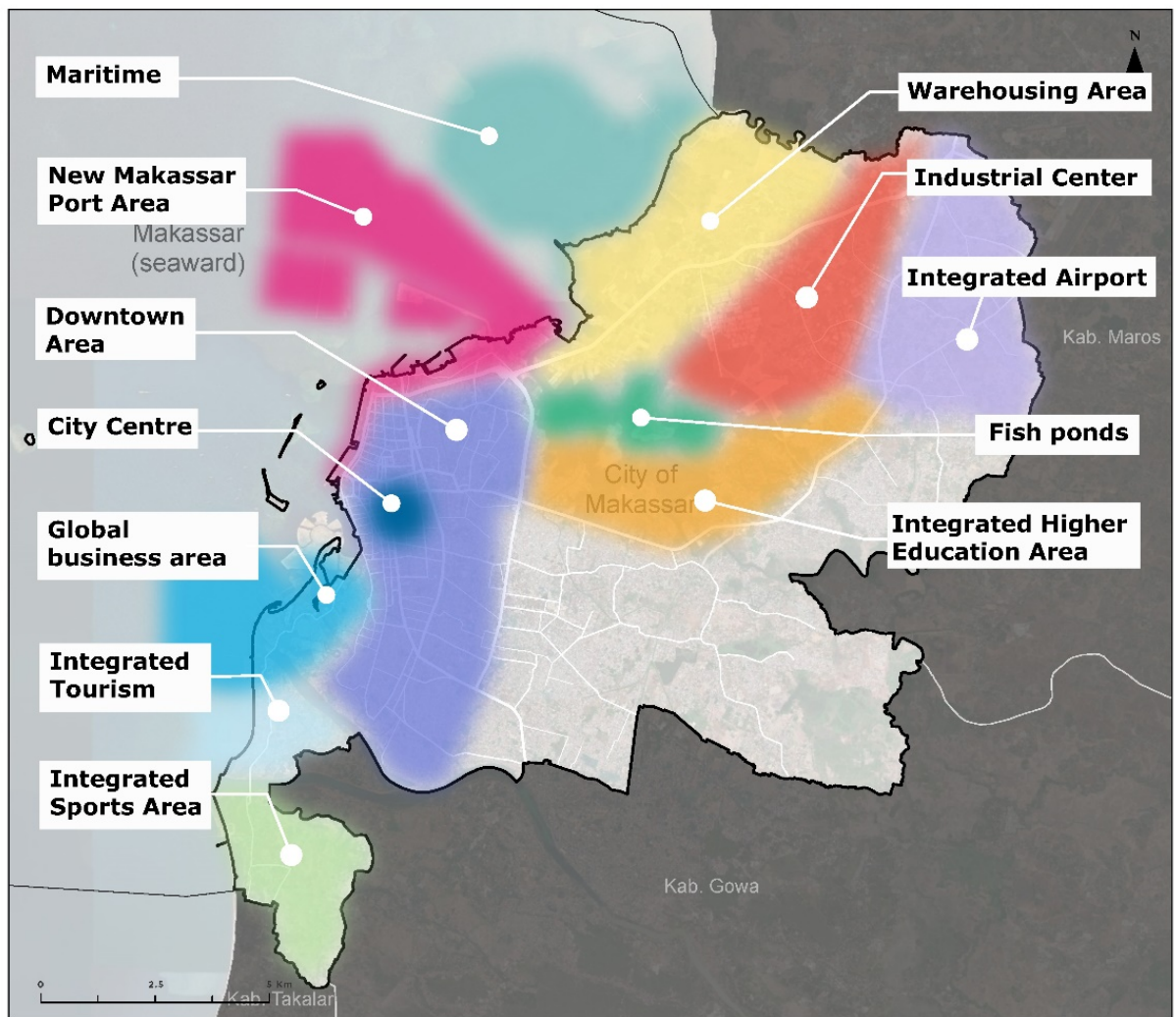
Tabel 23: 5 sektor industri teratas, berdasarkan kontribusi terhadap PDB, 2015-2019

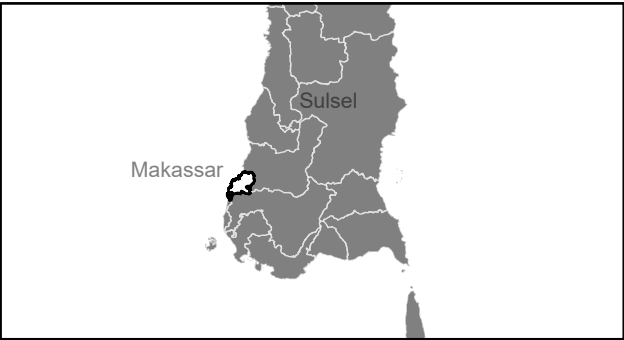
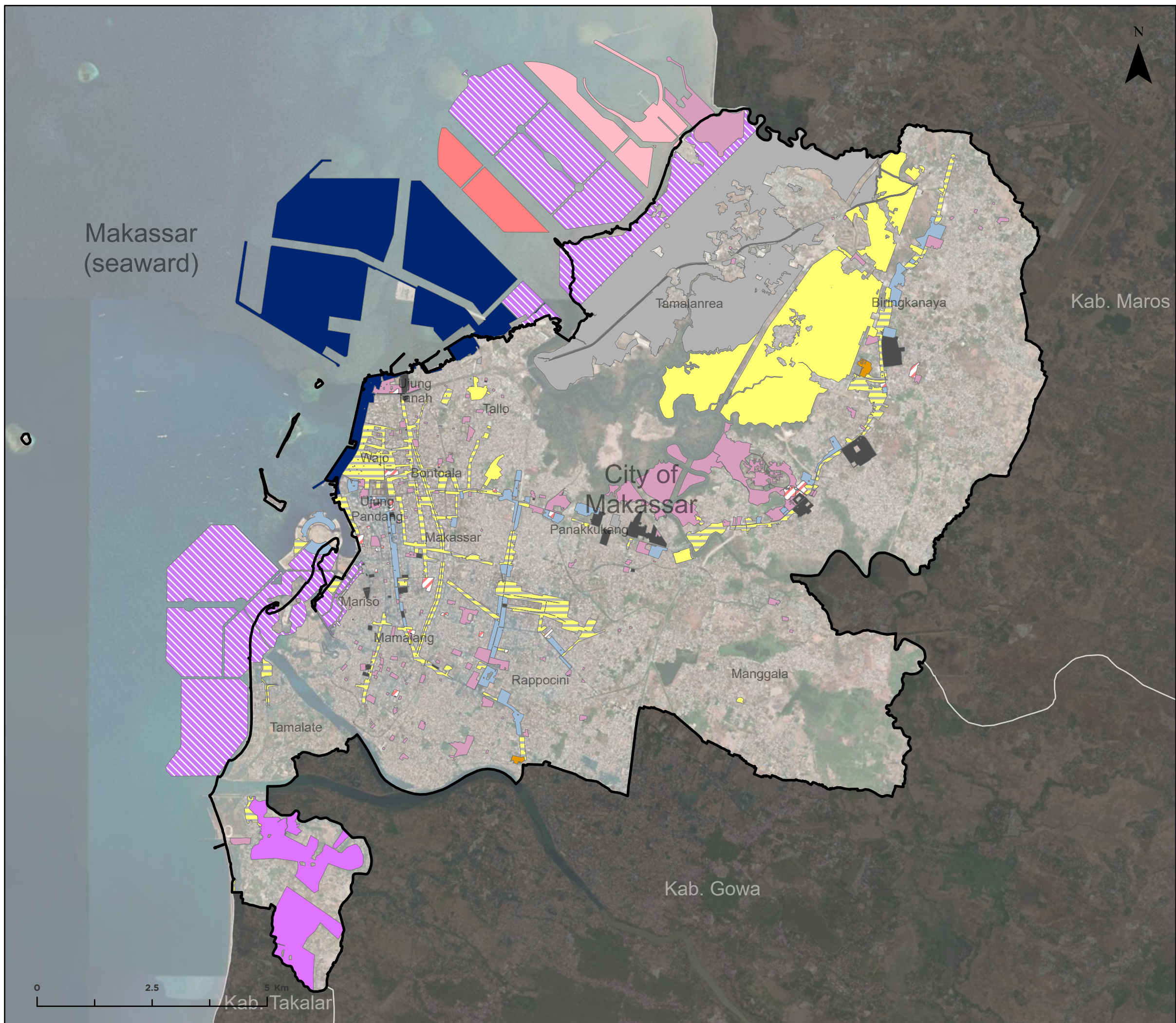
	SEKTOR	2015	2016	2017	2018*	2019**	RATA-RATA
1	Manufaktur	20.24%	20.62%	19.95%	18.34%	18.31%	19.49%
2	Perdagangan Grosir dan Eceran, Perbaikan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Motor	18.29%	18.66%	19.11%	19.82%	20.46%	19.27%
3	Konstruksi	17.13%	17.12%	17.26%	17.95%	18.22%	17.54%
4	Informasi dan Komunikasi	8.92%	8.94%	9.02%	9.24%	9.08%	9.04%
5	Kegiatan Keuangan dan Asuransi	5.98%	6.21%	6.19%	6.06%	5.81%	6.05%

Lihat Gambar 48 untuk ringkasan tingkat tinggi kawasan ekonomi penting di Makassar, berdasarkan zonasi penggunaan lahan.

Gambar 49 peta penggunaan lahan ekonomi yang ada dan masa depan di seluruh Makassar berdasarkan jenis penggunaan lahan, menunjukkan tempat orang bekerja di seluruh kota.

Gambar 47: Kawasan ekonomi dan jalan penting di Makassar





- Key**
- Penggunaan lahan (Land use)
- Bisnis dan Olah Raga (Business and Sports)
 - Energi Center (Energy Center)
 - Gudang (Warehouse)
 - Industri (Industry)
 - Kawasan Campuran (Mixed use)
 - Kawasan Campuran Bisnis (Mixed business)
 - Kawasan Campuran Maritim (Mixed maritime)
 - Kawasan Campuran Pariwisata (Mixed tourism)
 - Kawasan Industri Perikanan (Mixed fishery)
 - Kesehatan (Health)
 - Militer (Military)
 - Pelabuhan (Port)
 - Pendidikan (Education)
 - Perdagangan dan Jasa (Trade and services)
 - Perkantoran (Offices)
 - Terminal

Date: 18/12/2020
 By: JC
 Report: Makassar Urban Situation Assessment

Name: Indonesian 1974 UTM Zone 50S
 Projection: UTM

Figure 48 Economic land uses

Visi ekonomi ⁷⁷

Di luar COVID19, diprediksi perekonomian Kota Makassar akan mulai memasuki fase pemulihan dengan memaksimalkan perbaikan di sektor-sektor strategis. Strategi yang diterapkan antara lain menyiapkan stimulus ekonomi khusus bagi UKM unggul, skema bantuan untuk menjaga kelangsungan produksi, menyiapkan jaringan pengaman sosial yang terdampak dan refocusing serta realokasi anggaran. ⁷⁸

Perkembangan utama perkotaan berikut ini diharapkan dapat merangsang perekonomian lokal di tahun-tahun mendatang:

- Pengembangan Pelabuhan new Makassar
- Kereta kargo Makassar ke Parepare
- Stasiun Kereta Baru
- Pusat Bisnis Terpadu Internasional (Ekspansi Kawasan Bisnis Global ke area yang direklamasi)
- Pusat rekreasi & olahraga baru
- Menumbuhkan kawasan hunian untuk kisaran pendapatan menengah-tinggi
- Pusat maritim, termasuk pelabuhan perikanan, gudang, manufaktur, penyimpanan dingin, pusat pendidikan untuk industri kelautan dan perikanan (timur laut Makassar)
- Pengembangan kawasan pariwisata terpadu.

7.2.2 Pariwisata di Makassar

Ukuran ekonomi wisata di Makassar

Pada Oktober 2020, tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan, karena pembatasan perjalanan yang diberlakukan dalam menanggapi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Tingkat Hunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada Oktober 2020 turun 4,11 poin dibandingkan September 2020, dari 38,38% pada September 2020 menjadi 34,27% pada Oktober 2020. Jika dibandingkan dengan Oktober 2019 (53,35%), ROR untuk hotel dengan klasifikasi bintang pada Oktober 2020 mengalami penurunan sebesar 19% ⁷⁹.

Selain dari penurunan drastis pariwisata dalam menanggapi pandemi COVID-19, perekonomian wisatawan Makassar terbatas. Sebagai kota terbesar di Indonesia timur, kota transit untuk penerbangan internasional dan pengiriman di Indonesia dan didukung oleh potensi berbagai objek wisata dan acara, ada potensi untuk sejumlah besar wisatawan - baik turis asing, wisatawan nasional dan wisatawan lokal. Namun, pada kenyataannya sangat sedikit pengunjung asing yang berkunjung ke Makassar. Jumlah pengunjung mancanegara yang berkunjung ke Makassar, dengan menggunakan titik masuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sebesar 17.771 orang pada 2019 dibandingkan dengan 16.106.954 orang pengunjung mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun yang sama.

Survei pariwisata telah dilakukan untuk menggali pendapat dan harapan wisatawan terkait kondisi destinasi wisata dan objek di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan wisata bahari, wisata kuliner, dan wisata religi sangat penting bagi pengunjung ke Makassar. Wisata warisan dan wisata seni dan budaya adalah kategori dengan kinerja terendah.

⁷⁷ <https://asean.org/storage/2019/02/ASCN-Consolidated-SCAPs.pdf>; http://workworkworkwork.work/kotakita/publications-docs/Makassar%20Climate%20Change%20Vulnerability%20Assessment_Nov%202013.pdf

⁷⁸ <http://bpkad.makassar.go.id/bpkadmakassar/2020/10/15/pemulihan-ekonomi-makassar-fokus-perbaikan-lima-sektor/>

⁷⁹ BPS, 2019 dan 2020 - <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2020/12/01/541/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-sulawesi-selatan--oktober-2020.html>

Penawaran pariwisata yang ada

Beberapa destinasi wisata yang sering dikunjungi dan berpotensi untuk dikembangkan di kota Makassar adalah:

- Kawasan wisata warisan kota tua Makassar antara lain Benteng Rotterdam, arsitektur kolonial gedung perkantoran, gereja dan rumah yang sebagian telah direvitalisasi menjadi kafe dan restoran, Benteng Rotterdam, dan kota China
- Paviliun pantai Losari, yang merupakan ruang publik di pantai tempat Anda dapat menikmati matahari terbenam
- Pusat perbelanjaan souvenir Somba Opu Street
- Fort Rotterdam Corridor - Ruko souvenir Somba Opu - Paviliun Pantai Losari
- Pelabuhan perahu tradisional Pinisi, Paotere
- Lakkang eco-tourism pulau kecil di sungai Tallo
- Wisata kuliner aglomerasi di kota tua Makassar, dan juga tersebar di beberapa pusat kegiatan baru
- Pulau kecil Samalona dengan pasir putih menarik untuk kegiatan snorkeling dan berjemur.

Beberapa destinasi wisata di luar kota Makassar yang sering dikunjungi wisatawan antara lain:

- Sebuah taman miniatur Sulawesi di reruntuhan benteng Somba Opu, sebelumnya ibu kota kerajaan Gowa, di perbatasan antara kota Makassar dan kabupaten Gowa
- Habitat kupu-kupu dan air terjun Bantimurung, di distrik Maros
- Gua bukit karst kuno dengan lukisan kuno di distrik Maros
- Wisata saluran sungai di kawasan karst Rammang-Rammang.

Gambar 49: Pelabuhan Kapal Tradisional Paotere Pinisi, Makassar.⁸⁰



⁸⁰ Konsulat Jenderal Australia, Makassar Indonesia, 2020

Rekomendasi pengembangan pariwisata berkelanjutan

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Makassar harus didasarkan pada rekomendasi sebagai berikut:

- **Berdasarkan prinsip bisnis yang berkelanjutan,** mengembangkan pariwisata berdasarkan rencana bisnis yang transparan dan akuntabel serta manajemen yang baik, yang membuka partisipasi terpadu pro-aktif pengusaha swasta, usaha kecil dan menengah, dengan dibantu dan dikendalikan oleh Pemkot Makassar
- **Berdasarkan prinsip keberlanjutan sosial,** pengembangan pariwisata dijaga oleh keunikan, identitas dan nilai-nilai sosial budaya lokal sebagai salah satu modal utama untuk menarik wisatawan
- **Berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan** sesuai daya dukung lingkungan, dalam arti melestarikan keunikan dan karakteristik alam serta unsur buatan manusia yang merupakan karakteristik lokal, sebagai salah satu modal utama untuk menarik wisatawan
- **Mengembangkan beberapa jenis pariwisata, seperti:**
 - Pengembangan destinasi wisata dengan biaya besar, misalnya pengembangan taman flora dan fauna langka dunia di Pulau Lakkang yang terintegrasi dengan pusat penelitian bioteknologi
 - Pengembangan pariwisata baru dengan biaya sedang, seperti kapal pesiar di sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil dan/atau pengembangan wisata pulau kecil seperti Lae-Lae Kecil, revitalisasi pariwisata Pulau Kayangan, wisata pulau Samalona, wisata pulau Lanjukang dan pulau-pulau kecil lainnya
 - Pengembangan pariwisata baru dengan biaya yang relatif kecil seperti paket wisata kota satu hari bus dan/ atau revitalisasi wisata jalan kaki di sepanjang koridor wisata legendaris Benteng Rotterdam – toko souvenir Somba Opu -kawasan pejalan kaki Losari.

7.2.3 Ekonomi digital

Ekonomi digital Indonesia dalam konteks



Ekonomi digital di Indonesia tumbuh pesat dan merupakan pasar ponsel terbesar ketiga di APAC.⁸¹

Dengan menjadi digital, Indonesia berharap dapat mencapai pertumbuhan hingga USD 150 miliar (10% dari PDB) pada tahun 2025.⁸² Pada awal 2020, ada 175.4m orang Indonesia yang terhubung ke internet.⁸³ (65% dari total populasi).⁸⁴



2020 Go Digital Vision dan Indonesia's e-Commerce Road Map (2015) mendukung pertumbuhan ekosistem e-Commerce untuk pertanian, perikanan dan UKM (Usaha Kecil Dan Menengah) untuk mendigitalkan, memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan lapangan kerja.⁸⁵

- Ukuran pasar e-commerce Indonesia mencapai 13 miliar USD pada 2018 dan telah tumbuh 50% setiap tahun selama 2 tahun.⁸⁶
- 57 juta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) beroperasi, mempekerjakan ~97% dari tenaga kerja sektor.⁸⁷
- e-commerce diharapkan dapat mendukung dan membantu sekitar 56 juta mikro, UMKM yang berkontribusi sekitar 55% dari PDB.⁸⁸
- pengguna e-commerce di Indonesia didominasi perempuan di semua provinsi.⁸⁹
- Di perusahaan TIK, programmer terutama laki-laki dengan rasio sekitar 1 perempuan hingga 9 laki-laki.⁹⁰



Dalam lima tahun ke depan, perkiraan jumlah pelanggan seluler akan mencapai 199 juta, dengan 177 juta menggunakan layanan seluler mereka untuk akses internet.⁹¹



Indonesia diperkirakan akan menyumbang hampir 40% dari seluruh pertumbuhan start-up ASEAN di tahun-tahun mendatang.⁹²



Diperkirakan akan tumbuh 18% setiap tahun dalam lima tahun ke depan, menciptakan peluang kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk populasi muda negara itu dan pada tahun 2022 (e-commerce dapat menyumbang 20% dari tenaga kerja negara, naik dari 3% hanya lima tahun sebelumnya).⁹³



Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terbatas pada wilayah perkotaan.⁹⁴ dan beberapa provinsi dengan kemampuan teknologi tinggi.⁹⁵

⁸¹ <https://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-indonesia-on-brink-of-becoming-digital-economy-giant/>

⁸² https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx

⁸³ <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/supportive-framework-government-and-regulators-are-taking-steps-develop-digital-economy-focus-local#:~:text=The%20digital%20economy%20is%20transforming,sharing%20economy%20and%20boosting%20consumption.&text=There%20were%20around%20175.4m,than%20%24100bn%20by%202025>

⁸⁴ APJII, APA YANG TERJADI? Laporan Survei: Permukaan & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Jakarta (Indonesia): Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Laporan; 2018

⁸⁵ <https://www.baycurrent.co.jp/en/our-insights/pdf/Digitalization%20in%20Indonesia.pdf>

⁸⁶ <https://jakartaglobe.id/context/indonesias-e-commerce-market-larger-than-estimated-consumer-habits-changing-study>

⁸⁷ <https://apfcanada-msme.ca/sites/default/files/2019-03/Micro%20and%20Small%20Businesses%20in%20Indonesia's%20Digital%20Economy.pdf>

⁸⁸ <https://partners.wsj.com/bkpm/indonesia-new-economy/emerging-digital-economy-giant/>

⁸⁹ https://www3.frost.com/files/3115/2878/4354/Digital_Market_Overview_FCO_Indonesia_25May18.pdf

⁹⁰ https://blogs.worldbank.org/sites/default/files/preparing_ict_skills_for_digital_economy-revised_7mar2018.pdf

⁹¹ <https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/government-initiatives-target-wider-broadband-coverage-indonesia>

⁹² <https://atkapital.com/why-the-digital-economy-is-key-to-growth-in-indonesia/>

⁹³ <https://partners.wsj.com/bkpm/indonesia-open-for-business/indonesia-set-to-become-a-digital-economic-powerhouse/>

⁹⁴ <https://www.cambridge.org/core/books/digital-indonesia/recent-history-of-the-indonesian-e-commerce-industry-an-insiders-account/221A58592940494A5371D1182F6523AD>

⁹⁵ <https://e27.co/report-indonesias-digital-economy-development-occurs-only-in-urban-areas-as-disparity-continues-20200131/>

Tantangan utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia

	Kurangnya infrastruktur/geografi yang menantang : Infrastruktur TIK lemah dan penggunaan digital tidak merata di berbagai sektor usaha.
	Kualitas internet : Kualitas data seluler bisa sangat rendah. ⁹⁶ Indonesia memiliki salah satu kecepatan koneksi internet paling lambat di kawasan Asia Pasifik. ⁹⁷
	Digitalisasi rendah di seluruh sektor utama . ⁹⁸ : misalnya, sekitar 51 ribu sekolah (23,95%) tidak tersambung ke Internet
	Kurangnya tenaga kerja terampil: Pekerja terampil adalah tantangan terbesar karena proyeksi kekurangan 9 juta pekerja TIK 2015-30 . ⁹⁹
	Budaya : Warga Indonesia yang terhubung paham teknologi, tetapi secara keseluruhan penetrasi Internet rendah.
	Keterjangkauan : Banyak orang tidak mampu membeli koneksi Internet 95F yang tidak terbatas... ¹⁰⁰
	Peraturan : Peraturan dapat menghambat pertumbuhan dengan menegakkan hukum secara tidak setara antara pemain e-commerce lokal dan global . ¹⁰¹ .

Angka nasional di atas untuk penetrasi digital dimasukkan sebagai langkah proksi untuk Makassar karena kurangnya informasi khusus kota.

Teknologi dan digital inklusi

Meskipun ada pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia sejak pertengahan 2000-an, masih ada kesenjangan gender pada pengguna internet negara dengan banyak wanita Indonesia masih belum tahu bagaimana efektif menggunakan media digital atau internet, terutama dalam kaitannya dengan bisnis / perusahaan. Alasan utama yang diututkan untuk pemisahan digital gender di Indonesia termasuk kurangnya peluang (akses dan keterampilan) untuk penggunaan teknologi. ¹⁰²

Data (dan khususnya data yang tidak diagregasi) tentang inklusi digital di Makassar tidak tersedia, namun sebuah studi tahun 2018 tentang inklusi digital di Indonesia Timur (yang mencakup Makassar) memberikan indikasi kondisi yang baik di Makassar. Penelitian ini berfokus pada mengeksplorasi potensi digitalisasi untuk pengembangan sosial-ekonomi inklusif dan menemukan bahwa hanya 15% dari 143 juta pengguna internet Indonesia yang berlokasi di Indonesia Timur.

⁹⁶https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx

⁹⁷<https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-e-commerce-sector-market-potential-challenges/>

⁹⁸https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx

⁹⁹https://blogs.worldbank.org/sites/default/files/preparing_ict_skills_for_digital_economy-revised_7mar2018.pdf

¹⁰⁰<https://theconversation.com/lack-of-internet-access-in-southeast-asia-poses-challenges-for-students-to-study-online-amid-covid-19-pandemic-133787>

¹⁰¹<https://www.intechopen.com/online-first/the-paradox-of-indonesian-digital-economy-development>

¹⁰² Suwana, L. F. 2017. Memberdayakan Perempuan Indonesia Melalui Membangun Literasi Media Digital. Kasetart Journal of Social Sciences, Vol. 38.

Sekitar setengah dari responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka adalah pengguna internet, sementara setengah lainnya tidak. Dari pengguna internet, 88% mengakses internet dari smartphone mereka. Selain itu, lebih dari 40% responden menemukan masalah dengan stabilitas internet, kecepatan, harga, dan cakupan di Indonesia Timur. Jejaring sosial dan konsumsi berita adalah dua kegiatan online yang paling sering dilakukan oleh responden. Kegiatan terkait perdagangan seperti belanja dan perdagangan adalah salah satu kegiatan yang paling tidak sering dilakukan.¹⁰³

Isu-isu utama yang diidentifikasi oleh penelitian, dan yang memiliki relevansi khusus untuk pertimbangan inklusi digital di Makassar meliputi:

- **Kurangnya kesadaran masyarakat.** Memang, sementara pemanfaatan teknologi digital untuk pengiriman layanan publik di Indonesia telah ada dalam berbagai bentuk selama beberapa waktu, isu sentral adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa layanan publik dapat diakses secara online. Hanya sekitar 42% responden yang menyadari kehadiran online layanan tersebut.
- **Kurangnya inovasi oleh pemerintah daerah,** yang tidak memiliki pengetahuan digital untuk menyesuaikan berbagai sistem online yang ada untuk melayani kebutuhan lokal.
- **Kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem online publik.** Responden (sekitar 60%) mengidentifikasi perlunya sistem yang lebih komprehensif, karena keadaan sistem online saat ini masih secara tidak nyaman mengharuskan mereka untuk secara fisik pergi ke kantor publik untuk beberapa bagian lain dari aplikasi online, misalnya. Selanjutnya, sebanyak sekitar 40% responden bahkan tidak menyadari keberadaan platform online untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, seperti Call Center 24/7, website pemerintah atau media sosial. Untuk tujuan komunikasi publik dan umpan balik yang efektif, baik situs web pemerintah daerah dan media sosial memiliki ruang besar untuk perbaikan karena banyak dari mereka belum diperbarui selama bertahun-tahun.

Beberapa intervensi sektoral utama di Makassar, berdasarkan penilaian di atas, harus fokus pada:¹⁰⁴

- Kegiatan peningkatan kapasitas, mengingat buruknya kesadaran masyarakat akan teknologi digital, harus secara khusus ditargetkan kepada tiga pemangku kepentingan daerah yang berbeda: (a) pejabat pemerintah, (b) pekerja layanan publik lokal dan (c) usaha lokal dan UMKM. Selain itu, komunitas lokal dapat memperoleh manfaat dari lokakarya atau seminar, yang ditujukan untuk audiens umum yang besar, yang dirancang untuk memberikan pengetahuan umum dasar tentang potensi manfaat teknologi digital. Memang, akses dan keterampilan yang lebih baik, terutama untuk wanita, adalah cara kunci di mana ketidaksetaraan gender yang ada dapat ditantang - termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan pekerjaan / penghasilan. Fokus juga harus ditempatkan pada peningkatan kapasitas oleh wanita, untuk wanita.
- Bagi pejabat pemerintah/PNS tingkat bawah, lokakarya dasar teknologi digital harus dilengkapi dengan pelatihan teknis dan langsung yang bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara platform sederhana untuk menyampaikan dan mendukung berbagai program pemerintah.
- Selain peningkatan kapasitas, program bantuan juga dapat melibatkan proyek untuk mengembangkan platform online, yang dirancang untuk secara khusus memenuhi

¹⁰³ Pusat Studi Strategis dan Internasional. 2018. Menjelajahi Potensi Digitalisasi untuk Inklusif Sosial Ekonomi Pengembangan di Indonesia Timur. <https://www.csis.or>

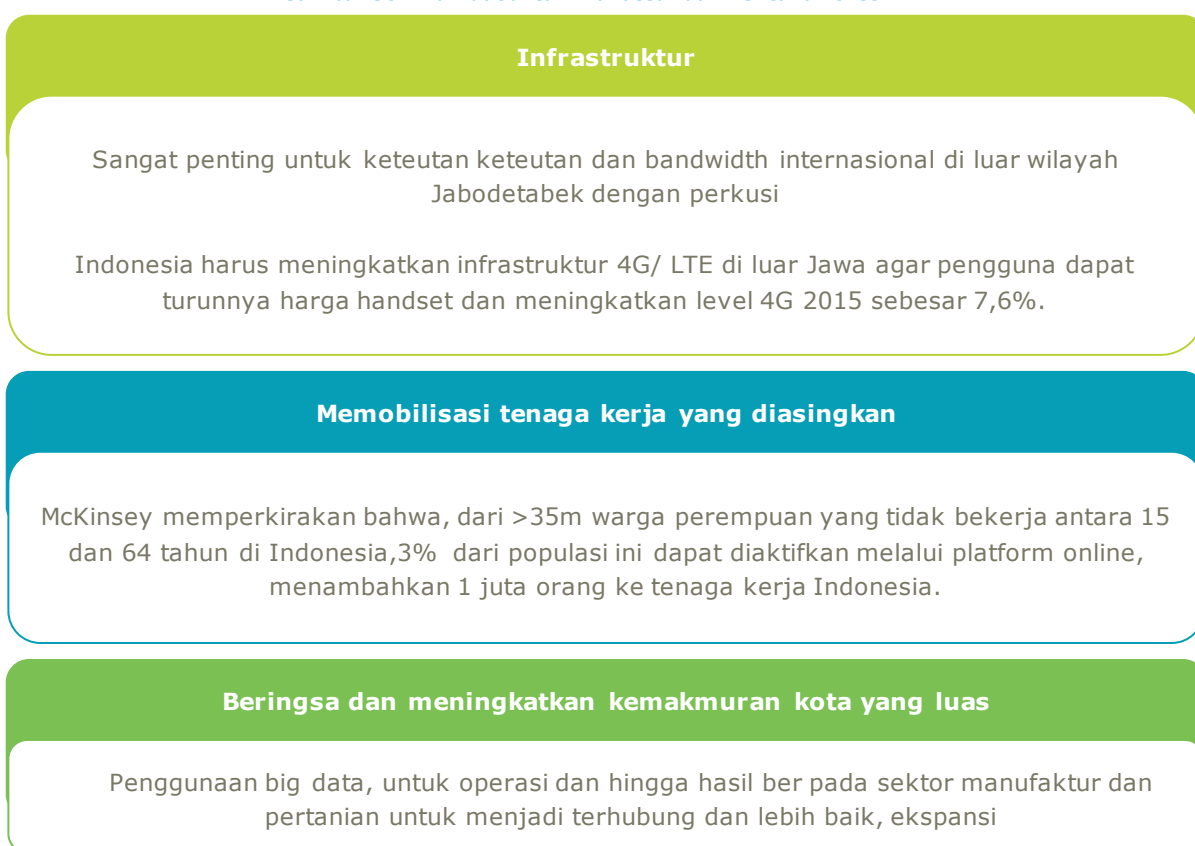
¹⁰⁴ Pusat Studi Strategis dan Internasional. 2018. Menggali Potensi Digitalisasi Pembangunan Sosial Ekonomi Inklusif di Indonesia Timur. <https://www.csis.or>

kebutuhan lokal. Contoh potensial adalah pengembangan halaman media sosial untuk kantor teknis pemerintah daerah.

- Mengingat kurangnya infrastruktur digital yang komprehensif, khususnya di pemukiman kumuh, intervensi yang dapat dilengkapi dengan pengembangan fasilitas digital di area publik direkomendasikan. Ini termasuk Wi-Fi publik, terutama di daerah dengan potensi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan kolaborasi pemerintah daerah atau penyedia layanan terkait dan juga akan menumbuhkan penetrasi dan akses digital yang lebih inklusif di seluruh kota.

Peluang ekonomi digital utama bagi Indonesia

Gambar 50: Manfaat untuk Makassar dari rencana holistik ¹⁰⁵



¹⁰⁵https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx

Tren perkembangan ekonomi smart city di Makassar

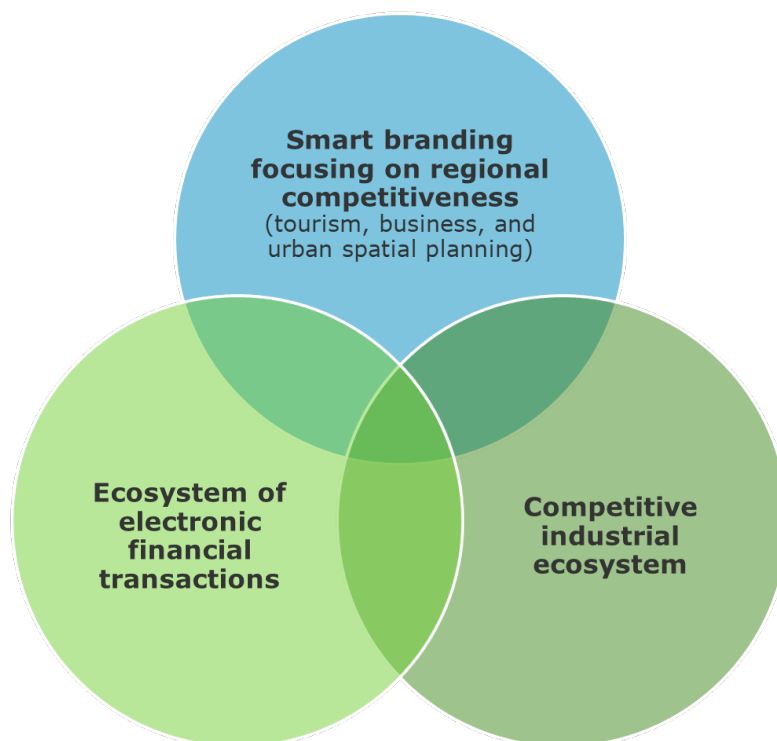
Untuk keperluan Penilaian Situasi ini, tren nasional menjadi indikasi perekonomian digital saat ini di Makassar. Sebagai bagian dari investigasi yang sedang berlangsung, karakteristik ekonomi digital nasional akan dibandingkan dengan tren yang ada di Makassar.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)¹⁰⁶ Kota Makassar sedang dalam masa transisi. Penting bahwa revisi RPJMD di masa depan mempertimbangkan implikasi untuk ekonomi digital dan memperluas aksesibilitas warga ke Internet, terutama di sektor-sektor utama (misalnya pendidikan).

Arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan selama pandemi COVID19 tetap difokuskan pada:

1. Penerapan prinsip smart city untuk mendukung aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19
2. Memperkuat penanggulangan bencana terutama di daerah perkotaan berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan daerah non-perkotaan, dengan populasi besar, kepadatan tinggi dan investasi besar.¹⁰⁷

Gambar 51: Elemen perkembangan ekonomi yang cerdas



¹⁰⁶ Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020-2021 dipandu oleh lima hal. Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan 6 urusan pelayanan dasar wajib. Kedua, Surat Edaran Mendagri Nomor: 050/5038 Bangda tanggal 3 Oktober 2018 tentang penyusunan RKPD 2020 untuk Kota Makassar. Ketiga, arah kebijakan dan target RPJPD Kota Makassar untuk tahun 2005 hingga 2025, Keempat, prioritas pembangunan RPJMD 2018-2023 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kelima, hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis SKPD 2014-2018. Saat ini pada tahap penyusunan awal forum konsultasi publik, dilakukan untuk menyelaraskan proposal antara hasil Kecamatan Musrembang dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) untuk Aparatur Daerah, serta saran dan masukan tentang peningkatan RKPD untuk setiap SKPD.

¹⁰⁷ Pidato Presiden REPUBLIK Indonesia Diadili Majelis Tahunan Permusyawaratan Umat dan Persidangan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, 14 Agustus 2020.

7.2.4 Daya tarik investasi (Ramah terhadap investasi)

Profil investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat FDI dan penanaman modal dalam negeri. ¹⁰⁸ Realisasi FDI dari 2016 hingga Maret 2020 dirangkum dalam Tabel 24 menyoroti Britania Raya sebesar US\$ 179.801,40 ribu (36,6%), Malaysia US\$ 166.236,20 ribu (33,8 %), Hong Kong (SAR) US\$ 65.028,60 ribuan (13,2%).

Tabel 24 Profil FDI di Makassar 2016-Mar 2020 (USD '000). ¹⁰⁹

NEGARA	NILAI TOTAL US\$ (RIBUAN)	2016	2017	2018	2019
Inggris	179,801	1,427	176,655	1,361	346
Malaysia	166,236	3,044	22,092	74,716	66,381
Hong Kong (SAR)	65,028	41,213	16,029	5,927	1,848

Peraturan

Pada awal masa jabatan kedua Presiden Jokowi, untuk mendukung PKE, Pemerintah Indonesia menerbitkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Ada 76 undang-undang yang diubah berdasarkan Omnibus Law, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. Di antaranya, Omnibus Law memperkenalkan ketentuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan perubahan uu ketenagakerjaan yang ada. Investor masa depan hanya perlu mengacu pada undang-undang ini daripada melalui 76 undang-undang atau lebih ketika mencoba berinvestasi di Indonesia.

Omnibus Law ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kemudahan berbisnis, misalnya dalam perpajakan, ia mengatakan akan mengurangi pajak penghasilan (PPh/Pajak *Penghasilan*) turun menjadi 20% hingga 2023, di mana saat ini PPh untuk perusahaan sekitar 25%. Kemudian UU juga menyampaikan bahwa pajak atas dividen akan dihilangkan, jika diinvestasikan kembali di Indonesia dan warga negara asing hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima di Indonesia.

Tberikut 11 klaster dalam Omnibus Law:

1. Penyederhanaan perizinan lahan
2. Persyaratan investasi
3. Pekerjaan
4. Kenyamanan dan perlindungan bagi Usaha Kecil Menengah
5. Kemudahan berbisnis
6. Dukungan Inovasi dan Penelitian
7. Administrasi pemerintah
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Zona Ekonomi Khusus

¹⁰⁸ <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-read?id=kepala-dpmptsp-sulsel-merilis-realisis-investasi-triwulan-ii-tahun-2020-sebesar-3.7-trilyun> ; <https://inipasti.com/realisasi-investasi-sulsel-2019-tak-capai-target/>

¹⁰⁹ DPMPTSP

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomiannya adalah dengan mendukung Kemitraan Swasta Publik untuk infrastruktur. Peraturan dan panduan KPBU mencakup penyediaan untuk berbagai proyek infrastruktur yang akan disampaikan melalui pengaturan KPBU.

Gambar 52: Target KPBU

	Transportasi
	Jalan
	Air dan air limbah
	Telekomunikasi
	Listrik
	Minyak dan gas
	Konservasi energi
	Fasilitas kota
	Fasilitas pendidikan, olahraga, dan seni
	Infrastruktur publik
	Fasilitas pariwisata

7.3 KEBERLANJUTAN KEUANGAN YANG INKLUSIF DAN TRANSPARAN

7.3.1 Anggaran nasional

Peraturan Pemerintah No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan dasar hukum sistem pengelolaan keuangan daerah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, cakupan, dan pengawasan keuangan daerah. ¹¹⁰

Defisit anggaran nasional turun. Pada 2021 RUU APBN ¹¹¹ defisit anggaran diproyeksikan sebesar 5,5% dari PDB atau Rp971 triliun. Hal ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran tahun 2020 sebesar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039 triliun. ¹¹² Fokus anggaran nasional dirangkum dalam Tabel 25.

Kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan berikut pada tahun 2021:

- Tingkat pengangguran 7,7-9,1%
- Tingkat kemiskinan 9,2-9,7 persen
- Ketimpangan 0,377-0,379,
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78-72,95.

7.3.2 Kerangka kerja pembiayaan kota

Peraturan yang mengatur urusan keuangan kota meliputi:

- Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar
- Peraturan Pemerintah Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prinsip Pengelolaan Keuangan Kota Makassar

¹¹⁰ Daftar ini diterjemahkan langsung dari peraturan

¹¹¹ UU RI Nomor 9 Tentang APBN Tahun Anggaran 2021

¹¹² Sekretariat Kabinet untuk Republik Indonesia, 2020. Penyajian Pernyataan Pemerintah tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangannya Sebelum tsidang Paripurna DPR RI. Oleh Kantor Asisten Deputi Sekretaris Kabinet untuk Dokumen Negara & Terjemahan, 14 Agustus, <https://setkab.go.id/en/address-of-the-president-of-the-republic-of-indonesia-on-the-presentation-of-the-government-statement-on-the-bill-on-the-state-budget-for-the-2021-fiscal-year-and-its-financial-note-before-the-plenar/>

Tabel 25: Ringkasan investasi anggaran nasional di sektor-sektor utama, Indonesia, 2021

SEKTOR	ANGGARAN (Rp TRILIUN)	PROPORSI PENGELUARAN NASIONAL (%)	AKTIVITAS UTAMA
Transfer ke Pemerintah Daerah dan Dana Desa	Rp 796 triliun	29%	- Layanan kesehatan - Jaring pengaman sosial - Pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19
Pendidikan	Rp 550 triliun	20%	- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia - Kapasitas untuk beradaptasi dengan teknologi yang terus berubah, dan produktivitas melalui pengetahuan yang lebih baik dalam ekonomi digital - Transformasi kepemimpinan kepala sekolah - Transformasi pendidikan dan pelatihan guru
Pembangunan Infrastruktur	Rp 414 triliun	15%	- Pemulihan ekonomi - Penyediaan layanan dasar - Konektivitas yang disempurnakan
Pemulihan Ekonomi Nasional	Rp 365 triliun	13%	- Kesehatan - Perlindungan sosial
Sembuhh	Rp 169,7 triliun	6.2%	- Pengadaan dan distribusi vaksin - Nutrisi untuk ibu dan balita - Manajemen penyakit menular - Asuransi kesehatan nasional yang efektif - Pencegahan, deteksi, dan respons penyakit - Sistem kesehatan terintegrasi
Ketahanan pangan	Rp 104 triliun	4%	- Mempromosikan produksi komoditas pangan melalui pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi - Merevitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan serta distribusi pangan; dan mengembangkan perkebunan makanan skala besar untuk meningkatkan produktivitas pangan
Ict	Rp 30,5 triliun	1.1%	- Mempercepat transformasi digital pemerintah - Memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah - Mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan bersama - Memastikan partisipasi publik dalam bidang pembangunan prioritas dan mempromosikan kesetaraan dengan akses internet tambahan di sekitar 4.000 desa dan Kecamatan di wilayah 3T
Pengembangan Pariwisata	Rp 14 triliun	0.5%	- Dorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata - Kebijakan tersebut dilakukan melalui pemulihan pariwisata dengan mengembangkan 5 destinasi wisata prioritas: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang

7.3.3 Analisis keuangan kota

Analisis pendapatan: pajak, tarif, dan transfer

Tabel 26 memberikan ringkasan neraca untuk Makassar untuk tahun 2018 dan 2019, pendapatan yang tidak stabil, transfer pusat dan daerah, pendapatan dan pengeluaran. Masalah utama yang timbul meliputi:

- Pengeluaran melebihi pendapatan setiap tahun selama 2016-2020, meskipun tampaknya menyempit, yang berarti pendapatan dan pengeluaran lebih selaras
- Jumlah pendapatan dan pengeluaran yang berfluktuasi.

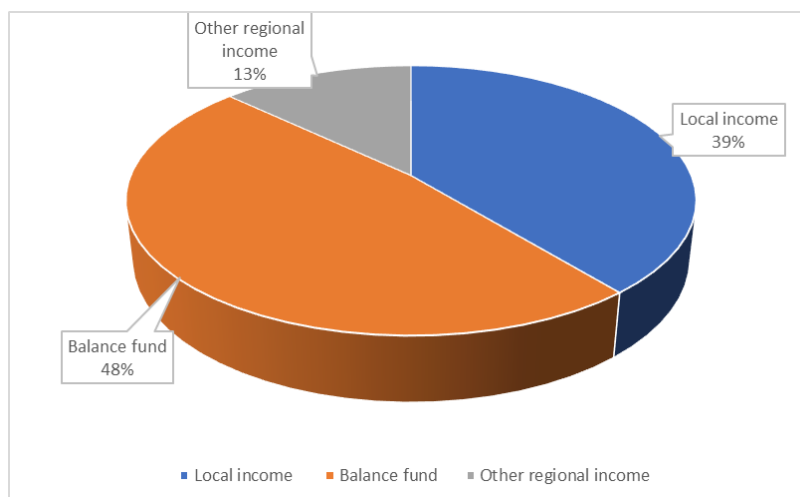
Tabel 26: Ikhtisar APBD Kota Makassar, 2016-2020, ID rupiah, miliaran

		2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran	Surplus/defisit	-166	-422	-219	-163	-79
Pendapatan		3,659	3,394	3,898	4,100	4,139
	Pendapatan lokal	1,305	1,333	1,484	1,649	1,749
	dana perimbangan	1,617	1,838	1,910	1,911	1,852
	pendapatan daerah lainnya	737	224	504	539	537
Pengeluaran		3,825	3,816	4,118	4,263	4,218
	pengeluaran tidak langsung	1,510	1,439	1,305	1,224	1,650
	Pengeluaran langsung	2,316	2,377	2,813	3,039	2,568

Ada 3 unsur pendapatan untuk kota Makassar:

- Pendapatan lokal
- Transfer pusat melalui Dana Perimbangan
- Transfer pusat melalui Dana Lain

Gambar 53: Pendapatan rata-rata ke Kota Makassar, 2016-2020¹¹³



¹¹³ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

Tabel 27: Pendapatan ke Kota Makassar, 2016-2020 (Rp RPD miliaran)

	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA %
Pendapatan lokal	1,305	1,333	1,484	1,649	1,749	39%
Dana perimbangan	1,617	1,838	1,910	1,911	1,852	48%
Pendapatan daerah lainnya	737	224	504	539	537	13%

Dari penghasilan ke Makassar, 39% berasal dari pajak dan retribusi lokal – disagregasi lebih lanjut dalam Tabel 28; 48% dari Dana Perimbangan dan 13% dari pendapatan daerah lainnya. Pentingnya pajak daerah di Makassar adalah 35%, jauh lebih tinggi dari rata-rata untuk Indonesia 12%.¹¹⁴ Mayoritas pendapatan daerah adalah dalam bentuk pajak lokal - lihat Tabel 28 - dengan pungutan regional menjadi sumber pendapatan kedua.

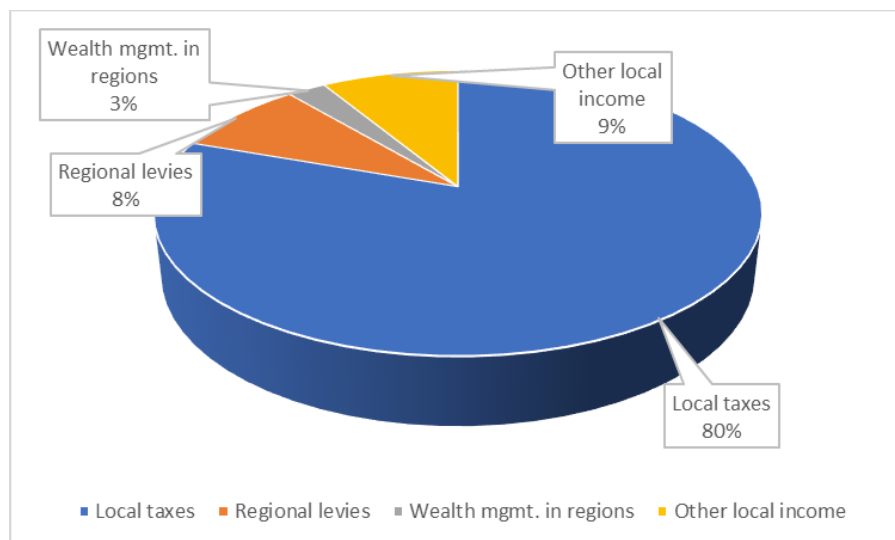
Tabel 28: Pendapatan dari pajak daerah, retribusi dan manajemen kekayaan, 2016-2020, IND rupiah miliaran¹¹⁵

	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
Pendapatan daerah (TOTAL)	1,305	1,333	1,484	1,649	1,749	
Pajak lokal	1,063	1,063	1,156	1,315	1,451	80%
Pungutan regional	146	95	133	133	128	8%
Kekayaan mgmt. di daerah	14	31	45	47	47	2%
Pendapatan lokal lainnya	81	144	149	155	124	9%

¹¹⁴ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

¹¹⁵ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

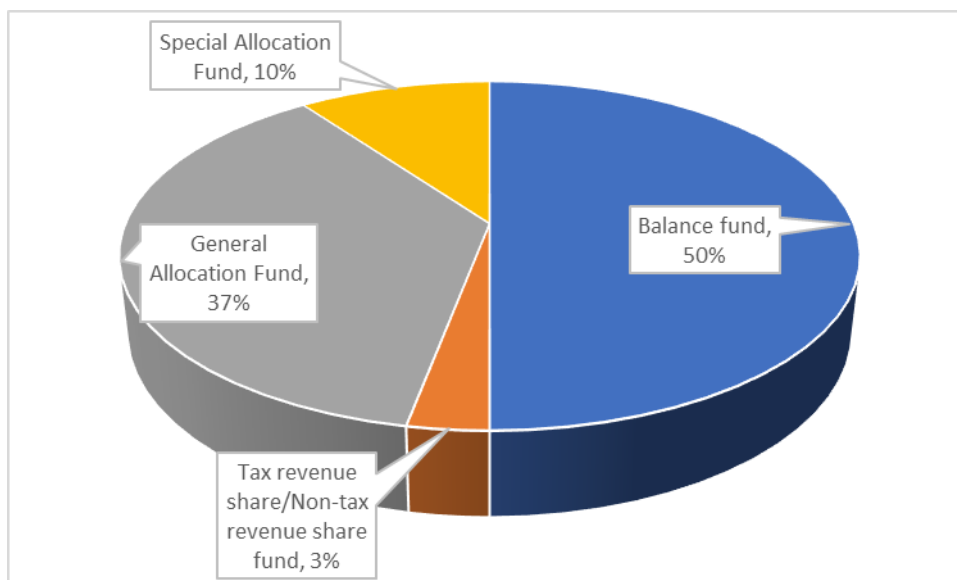
Gambar 54: Lokal income, rata-rata, 2016-2020¹¹⁶



Ada beberapa mekanisme pemindahan pusat ke Kota Makassar termasuk

- Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus – alokasi rata-rata antara 2016-2020 ditunjukkan pada Gambar 56
- Mekanisme lain - alokasi rata-rata antara 2016-2020 ditunjukkan pada Gambar 57.

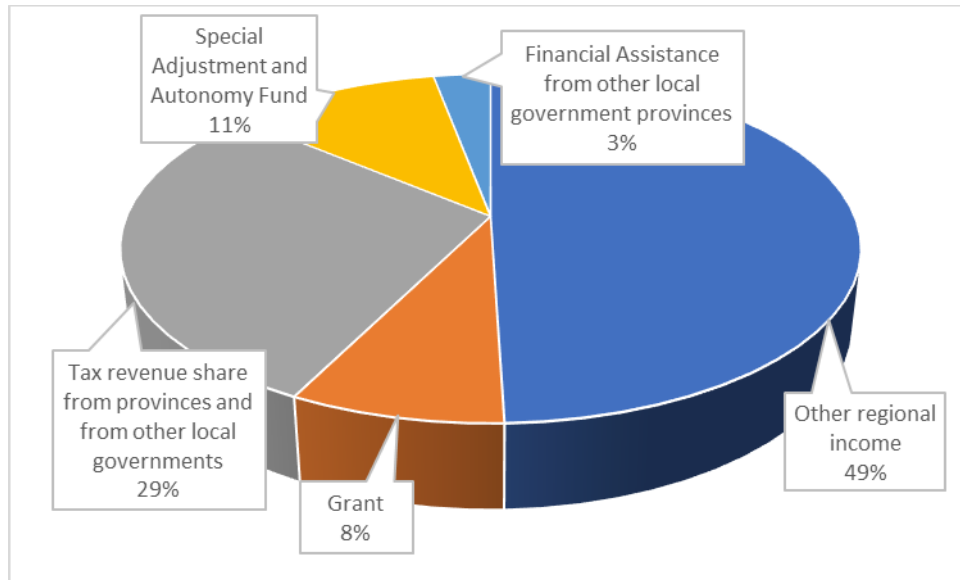
Gambar 55: Transfer pusat melalui Dana Perimbangan (rata-rata % 2016-2020)¹¹⁷



¹¹⁶ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

¹¹⁷ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

Gambar 56: Transfer pusat melalui Dana Lain (rata-rata % 2016-2020).¹¹⁸



¹¹⁸ OECD, 2019. MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PENDAPATAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERTUMBUHAN DAN CARA RAMAH EKUITAS MAKALAH KERJA DEPARTEMEN EKONOMI No. 1534. OECD, 45pp. ([Dalam Bahasa Inggris](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)) [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2019)3/en/pdf)

Analisis pengeluaran

Profil pengeluaran Kota Makassar tetap sejalan dengan pendapatannya dan dirangkum dalam Tabel 29 .

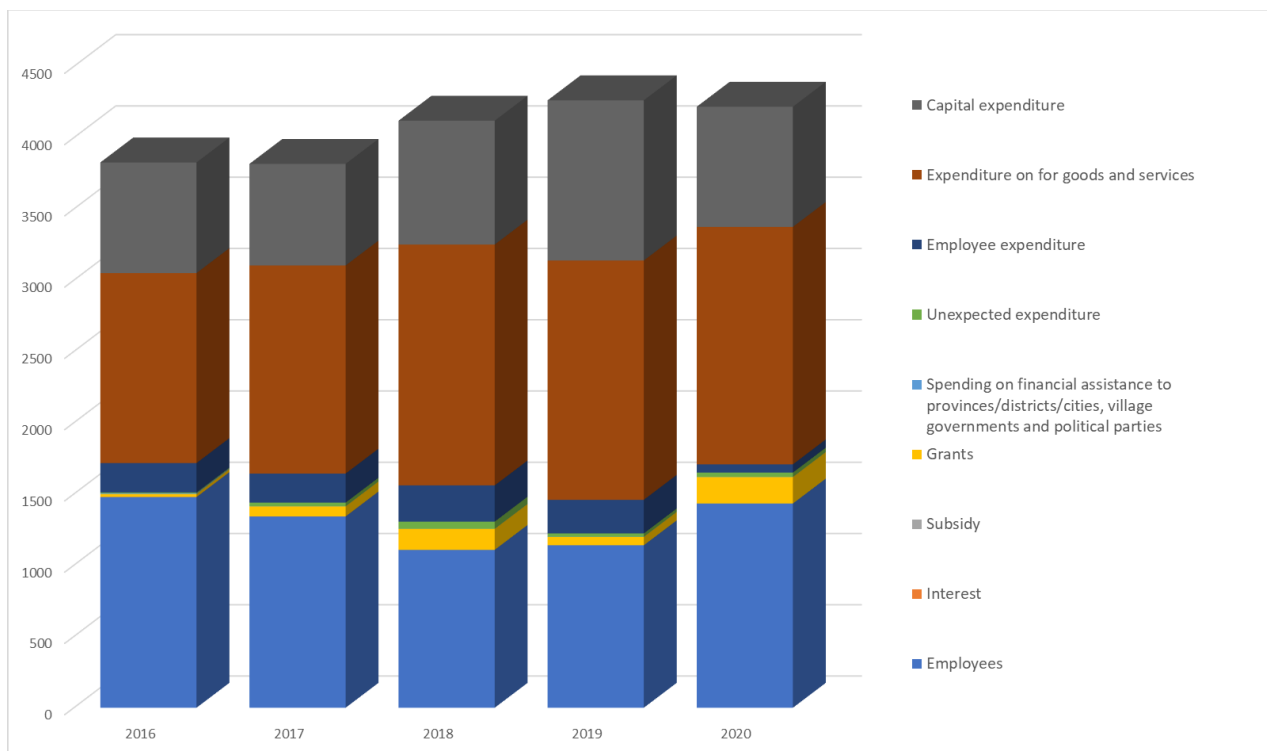
Tinjauan Pengeluaran Publik Bank Dunia menyoroti kurangnya ruang fiskal yang kritis karena kurangnya pendapatan yang berdampak pada pengeluaran rendah bersamaan, dan kebutuhan untuk menargetkan intervensi yang tepat, dengan fokus baru yang diperlukan pada infrastruktur dan pendidikan anak usia dini. ¹¹⁹

Tabel 29: Pengeluaran daerah, Kota Makassar, Rp miliaran, 2016-2020E

PENGELUARAN DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pengeluaran tidak langsung	1,510	1,439	1,305	1,224	1,650
Karyawan	1,478	1,342	1,108	1,140	1,433
Menarik	1	1	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-
Hibah	21	70	147	59	186
Belanja bantuan keuangan ke provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik	5	1	1	1	1
Pengeluaran tak terduga	5	25	50	23	30
B. Pengeluaran langsung	2,316	2,377	2,813	3,039	2,568
Pengeluaran karyawan	207	204	254	236	58
Pengeluaran untuk barang dan jasa	1,333	1,460	1,690	1,679	1,666
Belanja modal	776	713	869	1,124	843
Total pengeluaran daerah	3,825	3,816	4,118	4,263	4,218

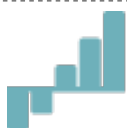
¹¹⁹ Bank Dunia, 2020. Ulasan Pengeluaran Publik Indonesia: Pengeluaran untuk Hasil yang Lebih Baik 2020. Bank Dunia, Washington DC, Amerika Serikat, <http://pubdocs.worldbank.org/en/781931592798309485/Indonesia-PER-main-findings.pdf>

Gambar 57: Pengeluaran Daerah 2016-2020



Ringkasan

Analisis keuangan kota menunjukkan bahwa Kota Makassar mengalami tekanan-tekanan utama sebagai berikut.



Makassar mengalami defisit dengan pengeluaran melebihi pendapatan setiap tahun sepanjang 2016-2020



Makassar alami pendapatan dan pengeluaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun



Makassar mengandalkan dana pusat untuk sekitar setengah dari pendapatan kota



Makassar memiliki rata-rata penghasilan pajak daerah yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (35% dari total pendapatan)

7.3.4 Kebutuhan dan rencana pengembangan

Tantangan utama yang dihadapi kota-kota di seluruh ASEAN dari sudut pandang keberlanjutan ekonomi dan keuangan dirangkum untuk Makassar di Tabel 30.

Tabel 30: Tantangan ekonomi dan keuangan utama Makassar, ringkasan

TANTANGAN	PENILAIAN SITUASI	INFORMASI LEBIH LANJUT DIPERLUKAN
Penyediaan layanan dasar	Lihat Bab 6 tentang Masalah Sosial untuk deskripsi lengkap	Alokasi anggaran untuk investasi kemiskinan tertentu
Urbanisasi	Bukti semakin urbanisasi tidak ditanggung oleh data kependudukan.	Data tren kependudukan di pinggiran kota Makassar (di luar batas kota resmi)
Fleksibilitas	Penelitian lebih lanjut diperlukan di sini untuk memastikan fleksibilitas yang ada di Makassar	Proses pengambilan keputusan Peluang untuk memanfaatkan pendapatan lokal atau hipotesis Bagaimana data dan proses digital diintegrasikan ke dalam sistem manajemen keuangan
Daya saing (pada cerdas dan digital)	Makassar dianggap sebagai pemimpin di Indonesia untuk elemen cerdas dan digital Beberapa proyek (termasuk untuk ADB) sedang berlangsung untuk memastikan daya saing kota	Bukti pengeluaran dan subsidi dan investasi lainnya oleh kota dalam cerdas dan digital dan dalam meningkatkan daya saing
Keuangan	Keuangan Makassar tampaknya dikelola dengan baik, dengan overspend tahunan yang relatif kecil dan menyempit, tingkat otonomi keuangan yang relatif tinggi dengan pendapatan lokal menyumbang lebih dari sepertiga dari total pendapatan.	Disagregasi komposisi pendapatan dan pengeluaran lokal

Untuk program bantuan teknis AASCTF, kami menilai keberlanjutan keuangan menggunakan pendekatan DRIFT¹²⁰ (Data, Revenue management, Inclusivity, Financial models, Transparent decisions) untuk memastikan fondasi cerdas dan digital di kota dan peluang / risiko untuk menanamkan ini. Untuk Penilaian Situasi ini, analisis DRIFT disediakan dalam Tabel 31.

Tabel 31: Penilaian DRIFT Makassar untuk keberlanjutan keuangan

TANTANGAN	PENILAIAN SITUASI	TINDAKAN YANG DIPERLUKAN
Data	Seri data yang solid tersedia, tetapi perbaikan harus dilakukan untuk meningkatkan dukungan keputusan dari data	Data yang disaggregasi ke kelompok sosial ekonomi, sektor industri dan Kecamatan untuk warga
Manajemen pendapatan	Tampak kuat meskipun pemahaman kita berada pada tingkat tinggi	- Memahami dari kota bagaimana keputusan yang dibuat seputar pendapatan (pajak dll), tingkat otonomi kota, informasi yang diperlukan untuk meningkatkan - Sumber pendapatan adalah kunci untuk memahami
Inklusivitas	Lihat bagian tentang GESI	- Realitas ekonomi kemiskinan dan akses kurang pasokan ke layanan dan utilitas penting - kesehatan, energi, tempat tinggal, air dan makanan - dan potensi untuk menyelaraskan kembali anggaran dan investasi kota untuk menghadapi tantangan ini. - Dampak kebijakan saat ini, investasi, dll terhadap populasi
Model keuangan	Informasi terbatas tersedia	- Bukti pengeluaran dan subsidi dan investasi lainnya oleh kota dalam cerdas dan digital dan dalam meningkatkan daya saing - Peran sektor swasta dalam fungsi Makassar dari sudut pandang ekonomi dan keuangan perlu dipahami dengan lebih baik.
Keputusan transparan	Informasi terbatas tersedia	- Keputusan tidak memiliki bukti dan transparansi, termasuk: - Data yang disaggregasi oleh pengelompokan sosial ekonomi dan wilayah/provinsi/kabupaten - Area pertumbuhan populasi dan pengelompokan sosial ekonomi yang ada - Tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan ruang lingkup keputusan - Pandangan populasi tentang isu-isu utama, prioritas - Pandangan komunitas bisnis

¹²⁰ Lihat AASCTF, 2020. Prinsip keberlanjutan keuangan untuk kota cerdas. AASCTF Briefing, Draf, 20 Desember.

7.4 JENIS KELAMIN, PEMUDA, DAN INKLUSI

STATISTIK GENDER, PEMUDA, DAN INKLUSI

KEDRDD

- Kota ini terdiri dari empat kelompok pak utama, Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, dan Tonghoa, sertang dalam jumlah yang lebih kecil dari Maluku, Jawa, Manado.
- Di antara populasi Makassar 89,8% adalah Muslim, 6,2% adalah Kristen Protestan, 2,8 % adalah Kristen Katolik, 1,08% adalah Umat Buddha dan 0,11% adalah hindu.

WANITA DAN ANAK-ANAK

- Makassar memiliki perempuan (50,5%) untuk laki-laki (49,5%) Rasio.
- 27,9% dari total populasi berada di antara kelompok usia 0-14 tahun.

ORANG TUA DAN P PANGKUAN

- 3,56 % dari populasi berada dalam kelompok usia 60-70 tahun dan 1,87 % berada dalam kelompok usia 70 + tahun.
- Diperkirakan ada 36.000 orang di Makassar yang memiliki beberapa bentuk kecacatan.

7.4.1 Norma dan Kepercayaan Budaya

Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam secara etnis di Asia, dan Makassar tidak terkecuali. Makassar telah mengalami peningkatan populasi yang besar dari waktu ke waktu dengan latar belakang karakteristik yang beragam, meliputi aspek etnis, agama, dan regiasal-asalan. Latar belakang yang beragam ini telah memunculkan kelompok masyarakat dengan nilai-nilai budaya dan kepercayaan mereka sendiri di kota. Secara etnis kota ini didominasi oleh orang Bugis dan Makassar, keduanya memiliki profil yang kuat di Indonesia. Ada juga jumlah kelompok etnis Toraja dan Mandar yang lebih kecil. Ada komunitas Cina yang cukup besar, sekitar 3,5% dari populasi. Kemudian ada juga kantong pendatang sementara dan permanen dari kepulauan timur sejauh Papua. Persaingan intra dan antar-etnis adalah umum, tetapi ada tingkat konflik komunal kekerasan yang relatif rendah.

Mayoritas warga Bugis dan Makassar adalah muslim yang taat, serta festival doa dan keagamaan mendominasi kehidupan budaya kota. Masjid berada di hampir setiap sudut jalan. Suku Mandar adalah muslim; orang-orang Toraja sebagian besar kristen. Banyak migran dari pulau-pulau timur adalah Kristen. Singkatnya, keragaman latar belakang masyarakat saat ini, baik dari segi etnis, agama, maupun tradisi budaya, menunjukkan dampak yang lebih positif terhadap dinamika pembangunan kota, dibandingkan dengan dampak negatifnya.

Provinsi ini dianggap sebagai benteng Islam, seperti yang disebutkan di atas. Menyusul ationdesentralipolitik dan karena semakin berkembangnya gerakan Islamisasi di Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki jumlah anggaran rumah tangga berbasis syariah terbesar kedua setelah Provinsi Islam Aceh. Sebagian besar mertua berbasis syariah daerah di Sulawesi Selatan mengatur pakaian perempuan, syarat membaca Al-Qur'an, dan pembayaran zakat (atau sedekah). Norma dan keyakinan budaya, terutama seputar peran gender, oleh karena itu sangat

berakar pada tradisi Islam yang menerapkan definisi yang lebih konservatif tentang peran perempuan dalam masyarakat, dengan persepsi yang sama konservatif pada komunitas LGBTIQ+.

Etnis Bugis mencatat memiliki lima jenis kelamin yang hidup berdampingan secara harmonis. Selain makkunrai (wanita) dan oroané (pria), masyarakat Bugi mengidentifikasi calalai (perempuan transgender), calabai (laki-laki transgender) dan bissu. Bissu adalah jenis kelamin kelima, yang mewujudkan semua jenis kelamin atau tidak satu pun dari mereka: itu melampaui jenis kelamin. Secara umum, konsep gender Barat adalah kesetaraan dan kemitraan yang setara antara pria dan wanita dalam semua aspek. Bugis memiliki sistem gender yang secara resmi diuraikan tetapi tidak terdiri dari prinsip organisasi utama budaya mereka. Wanita dan pria diserap secara merata dalam keasyikan dengan lokasi sosial. Untuk kedua jenis kelamin perbedaan hierarkis dibedakan dalam kontinum sosial yang sama atas dasar apa yang tampaknya askripsi dan prestasi individu. Pola diferensiasi gender hanya terdiri dari jalur umum --berbeda untuk pria, wanita, dan calabai (waria laki-laki)--yang diikuti individu dalam pencarian masing-masing untuk mengetahui lokasi sosial mereka.¹²¹

7.4.2 Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermitra dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang menyampaikan kegiatan pemberdayaan bagi perempuan serta memberikan perlindungan bagi anak terlantar. Functions utama organisasi meliputi:¹²²

- Meningkatkan kualitas perempuan, melalui berbagai jenis pelatihan dan kursus keterampilan.
- Pemenuhan hak dan advokasi untuk kepentingan anak-anak.
- Perlindungan perempuan, khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga.

Penghalang sosial budaya utama untuk pemberdayaan perempuan di Makassar terdiri dari asumsi gender tentang peran pria dan wanita, yang memiliki implikasi untuk praktik sehari-hari dalam pemerintahan, bisnis, rumah tangga dan di tingkat individu.

Hambatan ini didukung dan diperkuat oleh kegagalan lembaga regulasi untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang mempromosikan kesetaraan gender.

Indonesia berada di peringkat ke-85 dalam Global Gender Gap Index.¹²³ dari 153 negara, dropping dari posisi ke-68 pada tahun 2006. Secara komparatif, kinerja Indonesia yang diukur dalam sub-indeks Kesenjangan Gender Global mendekati skor rata-rata keseluruhan untuk pendidikan dan kesehatan, namun pada pemberdayaan politik negara mencetak skor jauh di bawah rata-rata, sementara pada partisipasi ekonomi dan peluang yang dilakukannya di atas skor rata-rata.

Perlawanan terhadap konsep kesetaraan gender masih dapat kuat di Indonesia, dan sebagaimana diutamakan oleh Bank Dunia istilah gender masih disalahpahami, dan "upaya pengarusutamaan gender baik di sektor pemerintah maupun non-pemerintah tetap berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, daripada lebih fokus secara luas pada isu-isu hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, serta kesenjangan antara peluang ekonomi perempuan dan laki-laki".

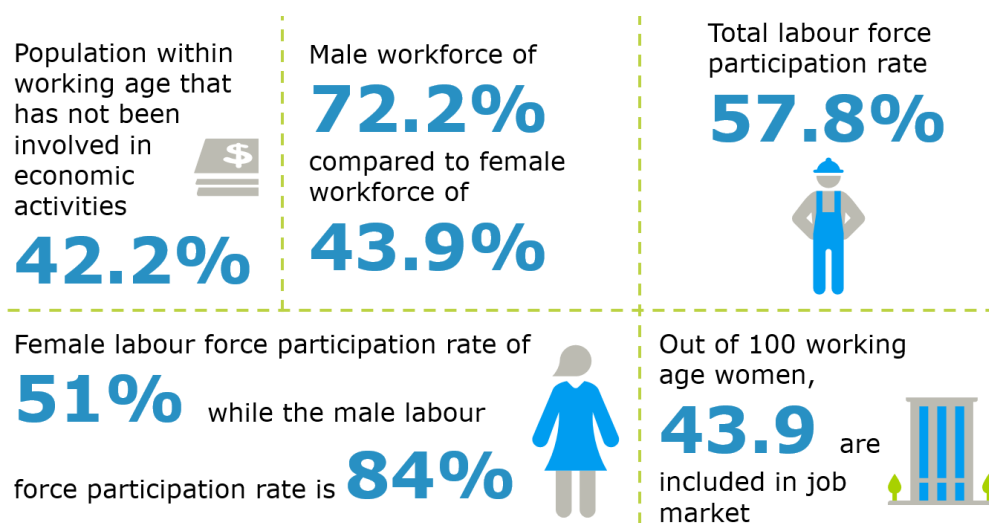
¹²¹ Millar, S.B 1983. Tentang Menafsirkan Jenis Kelamin di Masyarakat Bugis. Ahli Etnologi Amerika. Vol. 10 (3).

¹²² Dinas P3A, Makassar, 2020

¹²³ Forum Ekonomi Dunia. 2020. Laporan Kesenjangan Gender Global 2020. <http://www3.weforum.org>.

Terlepas dari perubahan ekonomi Indonesia yang dramatis selama dua dekade terakhir, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja berbayar telah melihat sedikit perubahan.

Sekitar 51%, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia jauh di bawah laki-laki (sekitar 84%). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Makassar rendah, 57,8%. Persentase penduduk dalam usia kerja yang belum dilibatkan dalam kegiatan ekonomi adalah 42,2%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga menunjukkan kesenjangan antara tenaga kerja laki-laki 72,16%, dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan 43,9%. Dari 100 wanita usia kerja, hanya 43,9 yang termasuk dalam pasar kerja.



Ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada pendapatan rendah untuk rumah tangga. Selain itu, sementara perempuan secara aktif berkontribusi pada perekonomian nasional dan rumah tangga, mereka dikecualikan dari banyak struktur dan proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga, lokal dan nasional. Bahkan ketika wanita terlibat dalam posisi pengambilan keputusan, mereka sering ditemukan di garis samping, atau menempati posisi tingkat rendah. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan juga menjadi penghalang kritis bagi perkembangan kebijakan ekonomi dan sosial yang mempertimbangkan perspektif dan kepentingan sosial, politik, dan ekonomi spesifik mereka. ¹²⁴

Menurut Daraba dkk dengan informan di ¹²⁵ Makassar menunjukkan bahwa budaya lokal yang diadopsi oleh mayoritas warga, khususnya "generasi tua" yang berdomisili di Makassar masih merangkul budaya patriarki. Penghalang sosial budaya utama untuk pemberdayaan perempuan di Makassar (dan lebih luas melalui Indonesia sebagai catatan di atas) terdiri dari asumsi gender tentang peran pria dan wanita di lingkup publik dan swasta, yang memiliki implikasi untuk praktik sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi juga untuk praktik pemerintah, bisnis, rumah tangga dan individu. Hambatan ini didukung dan diperkuat oleh kegagalan lembaga regulasi untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat, tempat kerja, dan dalam bisnis.

¹²⁴ Bank Dunia. (2013). Kesetaraan gender: Ringkasan Kebijakan 1. Pengarusutamaan gender. <https://tinyurl.com/y7otk3cg>.

¹²⁵ Daraba, apa yang terjadi? D. 2018. Model Kemitraan Pelayanan Publik Dasar Berbasis Perspektif Gender di Kota Makassar, Indonesia. Jurnal Masalah Hukum, Etika, dan Peraturan.

Kemiskinan adalah isu persimpangan utama yang memperburuk ketidaksetaraan gender sosial budaya yang ada.

Hal ini khususnya terjadi bagi rumah tangga berkepala perempuan di Makassar. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah rumah tangga berkepala perempuan telah tumbuh di kota. Berdasarkan data Tahun 2019 dari Dinas Pengendalian Penduduk, di Kota Makassar hari ini terdapat 42.362 rumah tangga berkepala ____¹²⁶. Di antara 15 Kecamatan di Makassar, kelima Kecamatan dengan jumlah kepala keluarga perempuan tertinggi adalah Tallo, Biringkanaya, Tamalate, Panakkukang, dan Rappocini. Kecamatan-Kecamatan ini juga mencatat sebagai daerah kumuh terbesar di Kota. Umpan balik dari KII yang dilakukan dengan perwakilan pemerintah untuk mendukung Penilaian Situasi ini menunjukkan bahwa pembesaran progresif pemukiman kumuh di daerah perifer Kota adalah masalah sosial utama, dengan dampak khusus bagi perempuan miskin, yang kurang mampu mengakses layanan dan peluang ekonomi, antara lain.

Wanita dari daerah kumuh di Makassar, dan khususnya rumah tangga berkepala wanita, terkenal bekerja terutama di pasar tradisional (yang ada lebih dari 10 di Makassar), toko mikro sisi jalan, pusat perbelanjaan sebagai tenaga penjual, industri jasa (hotel, restoran, pusat hiburan), layanan publik, dan pekerjaan wiraswasta lainnya. Dari perempuan yang dipekerjakan di Makassar, 64% pekerjaan berada di sektor informal, di mana pekerjaan berisiko tinggi eksploitasi. ____¹²⁷ terhadap pemberdayaan perempuan (atas dan kemiskinan above) juga merupakan faktor kunci, termasuk lebih sedikit peluang pelatihan untuk perempuan, tanggung jawab rumah tangga, dan kendala budaya atau agama.

Wawancara informan utama yang dilakukan di Makassar menguatkan temuan di atas, termasuk mencatat bahwa pengarusutamaan berbasis gender belum menjadi prioritas semua kebijakan dan program kota. Oleh karena itu pertimbangan gender tidak merata dan tidak konsisten. Selain itu, budaya patriarki dinilai tetap kuat, dan bahwa secara umum, kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu gender dianggap rendah – baik di kalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat sipil. Isu lintas pemotongan yang semakin penting di Kota Makassar, dan lebih luas lagi melalui Indonesia dan daerah ini terkait dengan perencanaan dan respons perkotaan responsif gender untuk perubahan iklim dan bencana. Mengenai hal ini, tantangan utama mencerminkan yang dijelaskan di atas, termasuk pengecualian perempuan sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pembuatan kebijakan terkait perubahan iklim. Selain itu, perempuan tidak diberikan informasi yang memadai tentang perubahan iklim dan dampak terkaitnya. Akibatnya, pengalaman perempuan dalam menanggapi dampak perubahan iklim, serta dalam mencegah dan beradaptasi dengan mereka, sangat sering diabaikan dan dikecualikan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan pada 2018 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang paling lazim terhadap perempuan di Indonesia. Lebih lanjut, masih ada impunitas luas bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan kegagalan mekanisme negara untuk melindungi perempuan. Kesalahpahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga di tingkat masyarakat pasti berdampak pada pemahaman kelembagaan (misalnya, petugas kepolisian) dan mempengaruhi pelaksanaan undang-undang.
____¹²⁸

¹²⁶ Dinas PPKB Makassar, 2020

¹²⁷ KII dengan Perwakilan Pemerintah. 2020. Makassar.

¹²⁸ Afrianty, D. 2018. Agen Untuk Perubahan - Organisasi Perempuan Lokal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Institute for Religion, Politics, and Society (RPIS) Vol.17.

Terakhir, tantangan utama dalam memahami dinamika dan konteks gender di Kota Makassar adalah relatifnya paucity data yang tersedia yang memungkinkan pemahaman bernuansa situasi bagi perempuan di Makassar.

Rata-rata: Jenis jenis

- Kesadaran penciptaan kota yang setara gender dan inklusif di antara pemerintah kota/pelayan masyarakat. Meningkatkan kesadaran akan stereotip gender, dan cara-cara di mana ini diabadikan adalah metode kunci di mana norma dan budaya sosial dapat diatasi dan di mana kesetaraan gender dapat dibina.
- Fokus pada perluasan layanan pemerintah kepada perempuan di pemukiman kumuh dan menyediakan mekanisme untuk cara-cara yang bermakna di mana perempuan dapat lebih berpartisipasi baik secara ekonomi maupun sosial dalam kehidupan perkotaan.
- Pemantauan proaktif terhadap implementasi perubahan dan program dari perspektif gender dan inklusi sosial.
- Data yang lebih banyak dan lebih baik. Terdapat kesenjangan ketersediaan dan konsistensi data kondisi demografis dan sosial ekonomi, termasuk data yang tidak tersumbatnya kemiskinan di Kota Makassar. Upaya yang memprioritaskan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data yang tidak diagregasi adalah kunci dalam menginformasikan pengiriman layanan perkotaan yang responsif, memahami tren, dan menggunakan data untuk merencanakan dan memenuhi tuntutan di masa depan dengan lebih baik.
- Penilaian gender dan inklusi terhadap perubahan iklim terkait risiko/dampak dan inklusi dalam perencanaan / layanan perkotaan yang memungkinkan kebutuhan, prioritas, dan preferensi perempuan (dan kelompok rentan lainnya) dipertimbangkan secara efektif.
- Mendidik masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga penting untuk memastikan orang memahami dengan tepat apa yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa pemahaman yang tepat tentang hukum, korban tidak menyadari hak-hak mereka dan mereka mungkin tidak didukung oleh masyarakat setempat untuk menggunakan hak-hak mereka. Selain itu, layanan pemerintah yang memberikan dukungan, informasi, dan sarana untuk

7.4.3 Anak-anak dan remaja

Data dari Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 8.189 anak terlantar yang tidak dapat ditampung di panti asuhan yang tersedia. Sebuah laporan investigasi tahun 2017 tentang kemiskinan dan disparitas anak perkotaan di Indonesia mengidentifikasi bahwa anak-anak di daerah perkotaan mengalami fasilitas umum yang buruk, termasuk air bersih, toilet umum, dan taman bermain. Kendala akses terutama seputar hambatan biaya untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Keberadaan anak-anak miskin perkotaan yang tinggal di pemukiman ilegal juga seringkali tidak cukup diidentifikasi oleh kebijakan pembangunan perkotaan yang ada, yang akibatnya telah mengecualikan anak-anak untuk mencapai layanan dasar yang memadai. Di Makassar, beberapa masalah utama yang diidentifikasi dalam kelompok fokus dengan anak-anak termasuk kurangnya taman bermain atau ruang hijau di mana untuk bermain, mengakibatkan anak-anak bermain di tempat-tempat berbahaya seperti jalan, gang, tanggul atau tepi sungai. Pendidikan yang kurang inklusif adalah tantangan lain, bagi anak-anak miskin perkotaan, dan terutama mereka penyandang disabilitas.

Struktur populasi kota Makassar berada dalam transisi dari populasi muda ke apa yang disebut populasi menengah, ditandai dengan proporsi pemuda yang tinggi (10-24) dan kelompok anak-anak (0-9) (Tabel 32). Populasi pemuda saat ini hanya lebih dari sekitar 23% dari populasi kota

Makassar, berjumlah lebih dari 360 ribu orang. Jika anak-anak di bawah usia 10 tahun ditambah, maka totalnya mencapai 41% dari total penduduk Kota Makassar. ¹²⁹

Tabel 32: Proyeksi Jumlah Pemuda dan Anak di Makassar, th.2020-2030

KELOMPOK USIA	2020	2025	2030
0 – 9 Tahun	268,619	253,421	227,112
10 – 24 Tahun	360,344	377,304	389,935
Total	628,963	630,725	617,047
(% dari Total Populasi)	(41,19%)	(39,12%)	(35,34%)

Data dari Dinas Sosial Kota Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 8.189 anak terlantar yang tidak dapat ditampung di panti asuhan yang tersedia. ¹³⁰ A 2017 tentang kemiskinan dan disparitas anak perkotaan di Indonesia ¹³¹ anak-anak di daerah perkotaan mengalami fasilitas umum yang buruk, termasuk air bersih, toilet umum, dan taman bermain. Mereka juga menghadapi kendala, seperti hambatan cost untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Keberadaan anak-anak miskin perkotaan yang tinggal di pemukiman ilegal juga seringkali tidak cukup diidentifikasi oleh kebijakan pembangunan perkotaan yang ada, yang akibatnya telah mengecualikan anak-anak untuk mencapai layanan dasar yang memadai. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga memaksa anak-anak untuk bekerja dan ini memaparkan mereka pada lingkungan yang berisiko. Sementara orang tua berjuang untuk memenuhi kebutuhan, anak-anak sering kurang dalam pengawasan dan perawatan berkualitas.

Di Makassar, laporan yang sama, mengidentifikasi beberapa masalah utama yang diidentifikasi dalam kelompok fokus dengan anak-anak untuk memasukkan kurangnya taman bermain atau ruang hijau di mana untuk bermain, yang merupakan masalah yang sangat akut bagi masyarakat miskin perkotaan. Bermain di masa kanak-kanak adalah kegiatan perkembangan kritis, membentuk keterampilan kognitif dan emosional.

Kurangnya tempat bermain adalah alasan bahwa anak-anak kemudian bermain di tempat-tempat yang berbahaya, seperti jalan, gang dan di tanggul atau tepi sungai (disebut sebagai masalah tertentu di Makassar).

Seperti yang menghindari di bagian-bagian di atas, pendidikan yang kurang inklusif adalah tantangan lain, bagi anak-anak miskin perkotaan, dan terutama mereka yang cacat. Kurangnya inklusivitas dalam pendidikan yang dialami oleh anak-anak dikaitkan dengan kebijakan khusus lokal di tingkat sekolah, yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat sekitar. Misalnya, dalam banyak kasus, siswa hamil sebelum menikah menghentikan pendidikan mereka karena tekanan dan stigma implisit. Tantangan lainnya termasuk kualitas dan relevansi pendidikan, ketidakmampuan sekolah kejuruan, dan kurangnya guru sains. ¹³² dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan juga diidentifikasi sebagai masalah utama karena biaya tersembunyi, meskipun pemerintah menyediakan beberapa program bantuan. Contoh biaya

¹²⁹ Kantor BPS Sulawesi Selatan 2015

¹³⁰ Dinas Sosial Makassar, 2020.

¹³¹ Bima, L., dkk. Kemiskinan dan Disparitas Anak Perkotaan: Suara Anak yang Tak Terdengar Hidup dalam Kemiskinan di Indonesia. Laporan Penelitian SMERU. Unicef.

¹³² Goodwin, N., dan Martam, I. 2014. Pemuda Indonesia di 21st Abad. Unfpa. <https://indonesia.unfpa.org>.

tersembunyi dalam pendidikan adalah biaya untuk transportasi, seragam, buku, dan biaya untuk acara sekolah. ¹³³

Seperti disebutkan di atas, pemuda Indonesia semakin online dan terhubung melalui perangkat seluler, dengan ponsel pintar sumber utama koneksi. Negara ini memiliki 122 juta pengguna Facebook, pemirsanya terbesar keempat di dunia. Ini juga memiliki salah satu populasi terbesar pengguna Instagram di wilayah ini, menjadikan Indonesia produsen cerita Instagram terbesar di dunia. Di balik popularitas ini adalah populasi muda yang paham digital. TIK adalah masalah crosscutting dan dengan cepat mempengaruhi bagaimana pemuda berkomunikasi, belajar, mengalami, dan bekerja. Indonesia perlu memanfaatkan nilai pendidikan dan ekonomi TIK, serta menggunakan konektivitas pemuda untuk menumbuhkan partisipasi dan kolaborasi yang ditingkatkan dengan pemerintah.

Selain memperluas jangkauan sarana dan prasarana umum di daerah miskin perkotaan, intervensi skala luas utama harus mencakup perluasan program perlindungan sosial dan menyediakan transportasi bersubsidi atau gratis (yang lebih mudah diakses oleh anak-anak miskin). Membina ruang publik dan hijau yang aman, termasuk taman bermain, adalah area fokus lain untuk perencanaan kota yang terkait dengan anak-anak dan remaja. Memperluas akses ke pendidikan dan khususnya pendidikan kejuruan (dan berbasis digital) adalah area yang direkomendasikan untuk intervensi lebih lanjut. Meningkatkan partisipasi pemuda dan kolaborasi dengan pemerintah melalui, misalnya platform media sosial yang sudah banyak digunakan, dalam rangka menumbuhkan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif yang lebih memenuhi kebutuhan pemuda adalah area fokus lain yang direkomendasikan.

Gelandangan: Remaja dan anak-anak

- Selain memperluas jangkauan sarana dan prasarana umum di daerah miskin perkotaan, intervensi skala luas utama harus mencakup perluasan program perlindungan sosial dan menyediakan transportasi bersubsidi atau gratis (yang lebih mudah diakses oleh anak-anak miskin). Membina ruang publik dan hijau yang aman, termasuk taman bermain, adalah area fokus lain untuk perencanaan kota yang terkait dengan anak-anak dan remaja.
- Memperluas akses ke pendidikan dan khususnya pendidikan kejuruan (dan berbasis digital) adalah area yang direkomendasikan untuk intervensi lebih lanjut. Meningkatkan partisipasi pemuda dan kolaborasi dengan pemerintah melalui, misalnya platform media sosial yang sudah banyak digunakan, dalam rangka menumbuhkan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif yang lebih memenuhi kebutuhan pemuda adalah area fokus lain yang direkomendasikan.

7.4.4 Orang yang lebih tua

Yang sangat rentan adalah orang-orang yang lebih tua di pemukiman kumuh di kota Makassar, yang menghadapi tantangan majemuk yang terkait dengan kemiskinan. Mobilitas dan akses ke fasilitas dan layanan oleh orang yang lebih tua juga merupakan masalah saat ini yang telah diperburuk oleh COVID-19. Mayoritas eldercare terus mengambil bentuk perawatan informal yang disediakan oleh rumah tangga (terutama wanita) tanpa dukungan atau saran dari pengasuh profesional.

Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu dari sepuluh negara teratas di dunia dalam hal proporsi populasi berusia 80 tahun ke atas pada tahun 2050. Indeks Perlindungan Sosial ADB

¹³³ Bima, L., dkk. Kemiskinan dan Disparitas Anak Perkotaan: Suara Anak yang Tak Terdengar Hidup dalam Kemiskinan di Indonesia. Laporan Penelitian SMERU. Unicef.

menunjukkan bahwa Indonesia menghabiskan 2,1% dari PDB agregat untuk pengeluaran perlindungan sosial. Menurut laporan World Social Protection, hanya 14,1% dari populasi lansia yang menerima pensiun usia tua di Indonesia. Sementara 75% yang bekerja di sektor non-formal tidak memiliki keamanan usia tua sama sekali.¹³⁴ Transfer Tunai Bersyarat (CCT) diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pemerintah juga telah menerapkan Kartu Keluarga Sejahtera bagi penduduk yang lebih tua. Saat ini ada 150.000 orang yang lebih tua di atas 70 tahun yang kurang mampu. Mereka menerima bantuan sosial sebesar Rp 2.000.000 per tahun. Program ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa ada sistem berorientasi nilai yang harus menjaga orang tua dalam keluarga mereka.¹³⁵

Meningkatnya jumlah lansia Indonesia dirawat di institusi, tetapi mayoritas eldercare terus mengambil bentuk perawatan informal yang disediakan oleh rumah tangga (terutama wanita) tanpa dukungan atau saran dari pengasuh profesional. Berbagai kelompok etnis di Indonesia memiliki harapan yang berbeda tentang eldercare, tetapi orang tua yang menua sering dirawat oleh orang yang lebih muda putri di rumah mereka sendiri.¹³⁶ Orang tua dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk tinggal bersama anak-anak karena mereka memiliki sumber daya¹³⁷ untuk membayar pengasuh atau mendukung kerabat yang lebih miskin yang merawat mereka di rumah.¹³⁸

Di Kota Makassar, jumlah lansia dalam populasi meningkat dari tahun ke tahun, terutama karena meningkatnya harapan hidup.

Data kependudukan terbaru Kota Makassar menemukan populasi berusia 60 tahun ke atas (dianggap sebagai "penduduk lanjut usia") telah mencapai 9,2% dari total penduduk Kota Makassar, atau sekitar 140 ribu jiwa. Tantangan utama yang dialami oleh orang tua adalah persimpangan antara usia dan meningkatnya kecacatan. Yang sangat rentan adalah orang-orang yang lebih tua di pemukiman kumuh di kota Makassar, yang menghadapi tantangan majemuk yang terkait dengan kemiskinan.

Sebuah studi terbaru tentang interaksi sosial dan kualitas hidup lansia di Kota Makassar¹³⁹ menemukan kesempatan bagi orang yang lebih tua untuk memiliki interaksi sosial yang bermakna sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan mereka telah berada di sekitar urhood neighbordan kegiatan keagamaan. Kondisi kesehatan ditemukan memiliki hubungan yang kuat dengan bagaimana orang tua merasakan kualitas hidup mereka. Kondisi kesehatan mereka akan mempengaruhi mobilitas mereka, di mana juga akan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ada sejumlah program yang saat ini sedang disidang dan dilaksanakan dengan menyasar lansia di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan terpadu bagi lansia (Posyandu Lansia), termasuk layanan konseling kesehatan dan gizi serta gym. Makassar merupakan salah satu kota di mana program ini dipromosikan, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menginisiasi Posyandu Lansia yang masih berjalan hingga saat ini, dengan respon positif dari warga.

¹³⁴ ILO; Laporan Perlindungan Sosial Dunia 2017-2019.

¹³⁵ 2018; Departemen Orang Tua, Pemerintah Thailand; Perawatan untuk Lansia di ASEAN+3

Peran Keluarga dan Dukungan Lokal dan Nasional Sistem.

¹³⁶ Kevane, M & Levine, D. 20003. Mengubah Status Putri di Indonesia. Pusat Penelitian Ekonomi Internasional dan Pembangunan, Seri Kertas Kerja.

¹³⁷

¹³⁸ Thomas, D., et al. 2012. Memangkas biaya atrisi: Hasil dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 98 (1), Halaman 108 – 123.

¹³⁹ Bernard, G. 2018. Interaksi Sosial dan Kualitas Hidup Lansia di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jurnal IOSR Humaniora dan Ilmu Sosial. Vol. 23 (2).

Inisiatif semacam itu sangat penting ketika mengakui dampak COVID-19 yang tidak proporsional pada orang yang lebih tua di Indonesia. Proporsi orang yang lebih tua (60 tahun ke atas) menyumbang 41% untuk kematian terkait COVID-19, sementara proporsi mereka untuk kasus positif COVID-19 hanya 10,9 persen menurut data Gugus Tugas Nasional COVID-19 per 22 September 2020¹⁴⁰.

Batangan kata-kata: Orang yang lebih tua

- pegambatan yang menua di Kota Makassar – termasuk jasa jasa terpadu untuk lansia yang membangun program sukses yang ada. Di sini juga, teguran mana mana pada akses oleh orang yang lebih tua ke layanan, terutama bagi mereka yang terletak di kumuh kumuh di mana terkait usia bersinggungan dengan pemasyarakatan.
- Teknologi ngiat dalam meningkatkan smart delivery layanan kepada lansia, khususnya dalam jasa jasa yang berkelanjutan dan jangka panjang dalam kondisi COVID-19. Di sini, layanan kesehatan digital/virtual, layanan koneksi sosial, dan layanan dukungan untuk keluarga penyiapan orang yang lagi tua harus diprioritaskan untuk diingatkan di masa depan.

7.4.5 Penyandang disabilitas

Masalah utama yang menghambat akses ke program perlindungan sosial untuk Penyandang Disabilitas (PwD), adalah data. Data tentang disabilitas di Indonesia bervariasi dalam metodologi antara institusi yang berbeda dan menyulitkan untuk menggambarkan tren atau membandingkan set data di seluruh waktu atau survei yang berbeda. Sebagian besar, PwD tidak terlihat dalam data. Ini paling jelas dalam kurangnya identitas hukum bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya akta kelahiran, tanpa itu bentuk identifikasi dan akses lain ke program dan layanan perlindungan sosial sangat dibatasi.

Ada penelitian terbatas yang dilakukan terkait persoalan PwD di Makassar Indonesia. Namun, karena aspek sosial budaya, ekonomi disabilitas serupa di Indonesia, sebuah kajian terkait kota Banjarmasin telah dirujuk dalam rangka memberikan gambaran indikatif isu-isu umum. Masalah utama yang terkait dengan PwD termasuk kurangnya desain inklusif di jalan-jalan kota yang telah menyebabkan kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua penyandang disabilitas berjuang untuk mengakses fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan, sekolah, transportasi umum, dan ruang publik. Banyak penyandang disabilitas di Indonesia hampir tidak meninggalkan rumah mereka karena keterbatasan mobilitas. Situasi mereka diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan stigma yang terkait dengan kecacatan di kalangan masyarakat setempat. Untuk anak-anak penyandang disabilitas, kurangnya akses ke sekolah, dan peningkatan kemungkinan perundungan di sekolah disorot sebagai tantangan utama. Ada juga kekurangan akut guru yang berkualitas dan fasilitas yang akomodatif di sekolah-sekolah inklusif.¹⁴¹

Penilaian Cepat dampak COVID-19 di Indonesia¹⁴² telah menemukan bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses informasi pendidikan tentang wabah COVID-19 dan program jaring pengaman sosial pemerintah. Sebagian besar responden juga mengalami pengurangan pendapatan 80-90%, baik karena kehilangan pekerjaan atau kerugian dalam bisnis rumahan kecil mereka.

¹⁴⁰ <https://reliefweb.int/report/indonesia/addressing-older-persons-vulnerability-during-covid-19-pandemic>

¹⁴¹ 2019, UNESCO dan Kota Kiji, Kota Banjarmasin: Profil Kota Yang Inklusif Disabilitas.

¹⁴² <https://www.newmandala.org/indonesian-disability-activism-amidst-the-covid-19-pandemic/>

Mengilah: P pemangkasan

- Semakin banyak data yang lebih baik tentang PwD di Makassar untuk perencanaan dan pengiriman jasa yang lebih baik untuk Penyandang Disabilitas.
- Di-Waspada yang belah pada alat baca/pendaftaran digital untuk akses layanan pemerintah yang lebih mudah (kesehatan, dukungan, pendidikan).

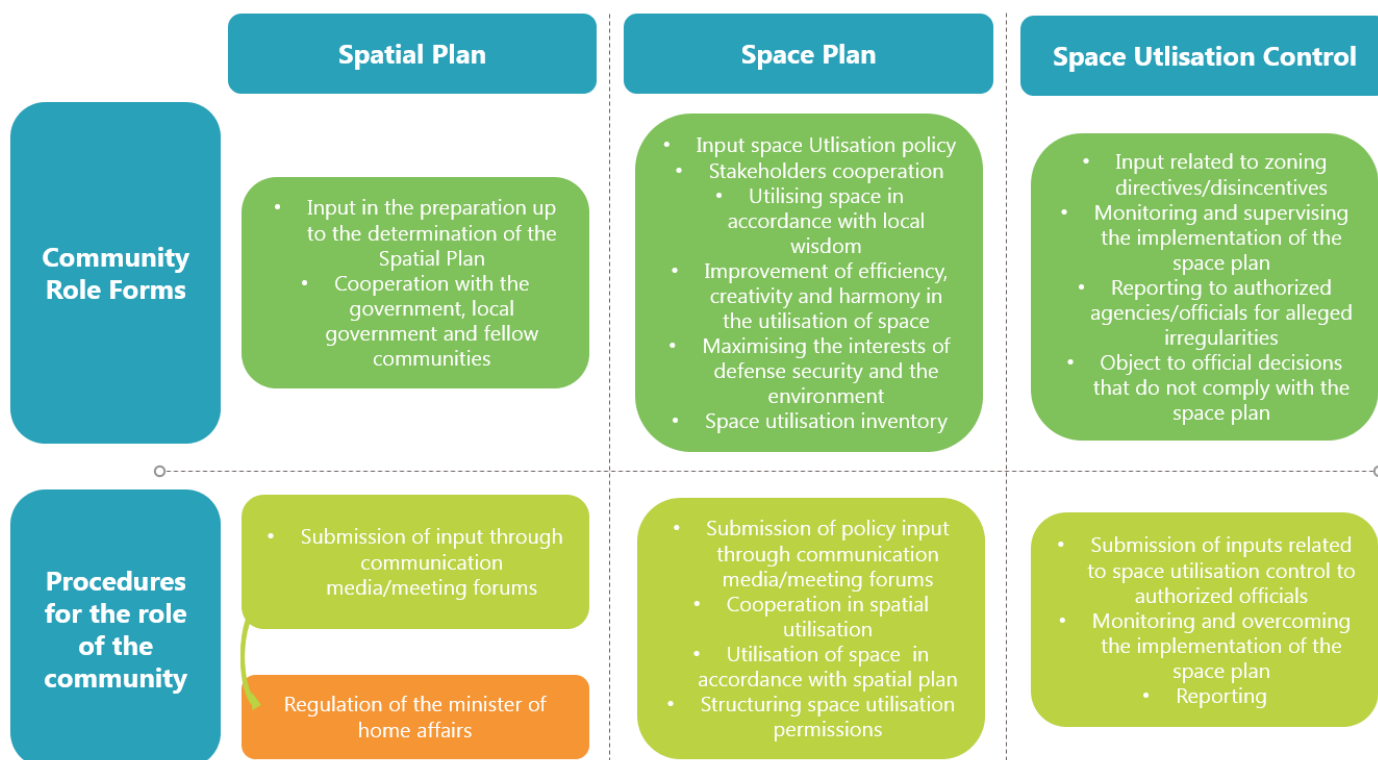
7.5 KETERLIBATAN WARGA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengidentifikasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Undang-Undang itu d rafted dalam masa reformasi dengan semangat Good Governance - mencatat bahwa pelaksanaan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diusulkan untuk dicapai melalui:

- Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
- Partisipasi dalam pemanfaatan ruang (penggunaan lahan)
- Partisipasi dalam kontrol pemanfaatan ruang.

Gambar 58: Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang



8. KESIMPULAN DAN LANGKAH SELANJUTNYA

8.1 TEMUAN KUNCI

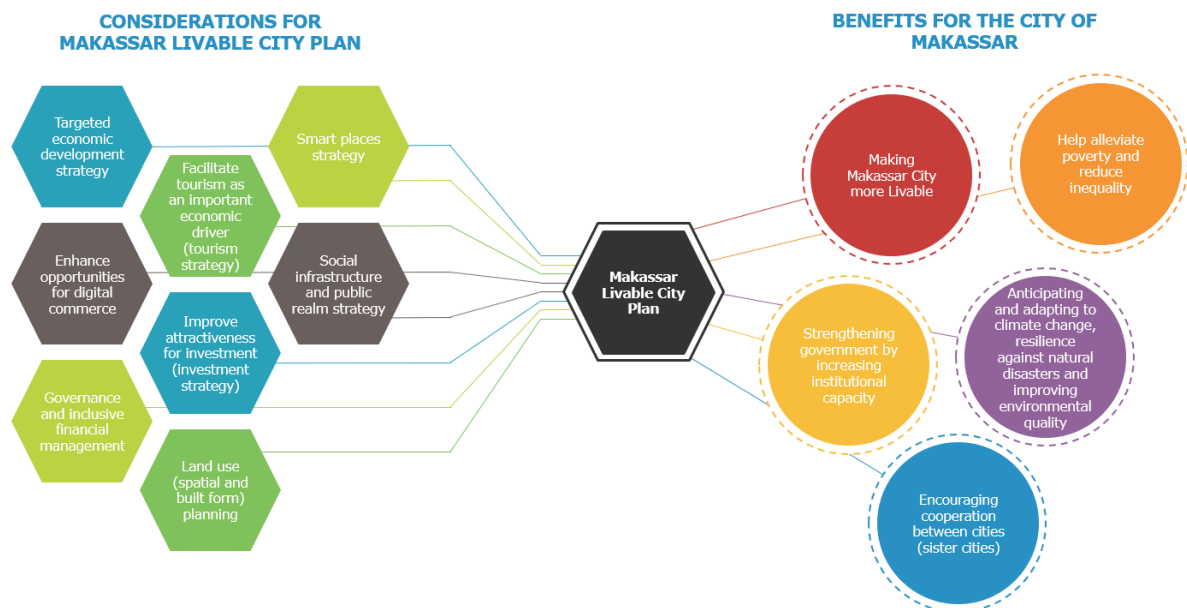
Dalam merumuskan Rencana Kota Layak Huni Makassar, isu-isu utama yang diangkat dalam Penilaian Situasi akan dibahas. Beberapa masalah utama meliputi:



Elemen kunci pendekatan pengembangan Rencana Kota Layak Huni Makassar meliputi

- Integrasi dengan rencana tata ruang provinsi
- Mengintegrasikan Big Data [Catatan: Keputusan Presiden 39 Tahun 2019: Satu Data untuk Indonesia (Big Data) dan Peraturan Wali Kota Makassar No 22 Tahun 2020]

Gambar 59 menunjukkan ringkasan pertimbangan rencana Kota Layak Huni Makassar yang diidentifikasi dalam laporan ini dan mengidentifikasi beberapa manfaat luas bagi Kota Makassar.



Gambar 59 Benefits dari Rencana Kota Layak Huni Makassar

8.2 LANGKAH BERIKUTNYA

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, kami mengusulkan pendekatan kolaboratif dengan institusi di tingkat kota, melibatkan tim spesialis nasional dan internasional bersama dengan analisis data cerdas dan instrumen keterlibatan. Tujuan kami adalah untuk bekerja sama dengan pemerintah kota dan merumuskan analisis dan output yang diperlukan oleh Makassar. Tujuan kami adalah mengintegrasikan rencana untuk Makassar yang cerdas dan layak huni di bawah strategi payung tunggal. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperkuat database yang ada dan membuat seperangkat instrumen untuk Kota Makassar ke depannya.

VOLUME PENDUKUNG

Volume 1. Pembangunan perkotaan

Volume 2. Air dan sanitasi

Volume 3. Sosial dan GESI

Volume 4. Lingkungan, pengelolaan lahan, dan energi

Volume 5. Tata kelola perkotaan

Volume 6. Keberlanjutan keuangan dan pengembangan ekonomi

Volume 7. Pariwisata

Volume 8. Mobilitas perkotaan

Volume 9. Infrastruktur pintar

Volume 10. Perubahan iklim dan bahaya alam

TENTANG ASEAN AUSTRALIA SMART CITIES TRUST FUND

ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF) membantu kota-kota ASEAN dalam meningkatkan sistem perencanaan, pengiriman layanan, dan manajemen keuangan mereka dengan mengembangkan dan menguji solusi dan sistem perkotaan digital yang sesuai. Dengan bekerja dengan kota-kota,

AASCTF memfasilitasi transformasi mereka menjadi lebih layak huni, tangguh, dan inklusif, sementara dalam proses mengidentifikasi praktik terbaik dan berikutnya yang dapat diskalakan untuk direplikasi di seluruh kota di Asia dan Pasifik.



6 ADB Avenue, Kota Mandaluyong 1550 Metro Manila, Filipina